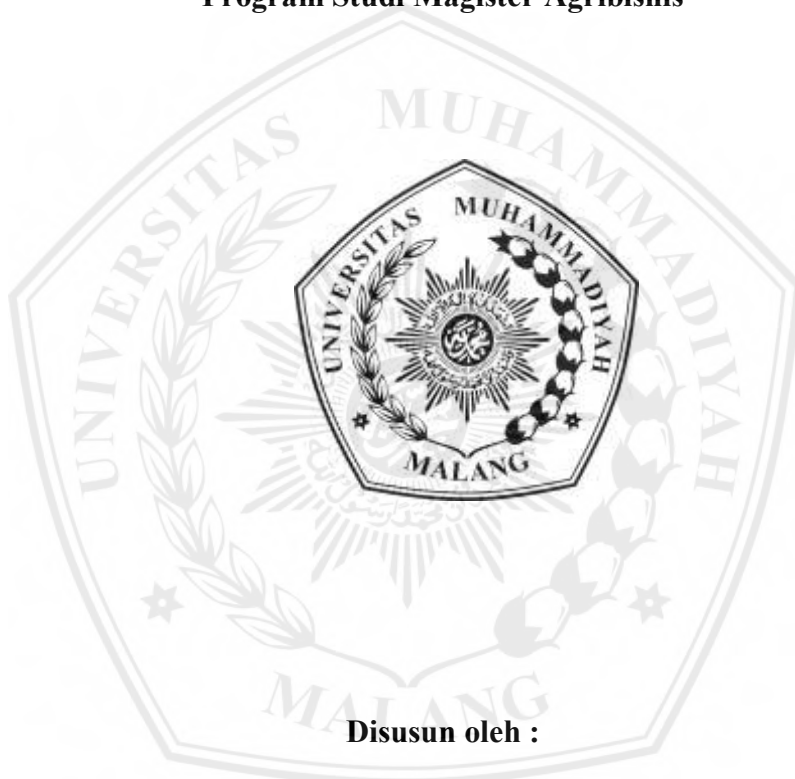


**PERSEPSI PEGAWAI DINAS KEHUTANAN DAN PEDAGANG KAYU
TERHADAP PENERAPAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : P.21/MENLHK-II/2015
TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
YANG BERASAL DARI HUTAN HAK**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Agribisnis**



Disusun oleh :

**AYUN RICHANA
NIM : 201310390211010**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Juli 2017**

PERSEPSI PEGAWAI DINAS KEHUTANAN DAN PEDAGANG KAYU TERHADAP
PENERAPAN PERATURAN MATERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.21/MENLHK-II/2015 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

Diajukan oleh :

AYUN RICHANA
201310390211010

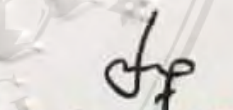
Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Jum'at / 28 Juli 2017

Pembimbing Utama


Dr. Ir. Anas Tain, MM

Pembimbing Pendamping


Dr. Damat, MP

Direktur
Program Pascasarjana


Dr. Latipun, M. Kes

Ketua Program Studi
Magister Agribisnis


Dr. Anas Tain, MM

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

AYUN RICHANA

201310390211010

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal. Jum'at / 28 Juli 2017
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

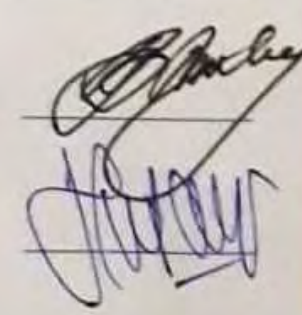
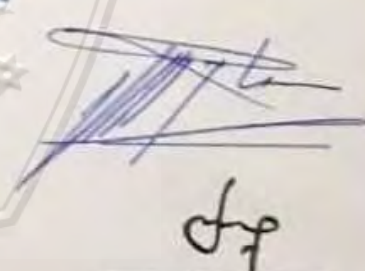
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Ir. Anas Tain, MM

Sekretaris : Dr. Damat, MP

Penguji I : Prof. Dr. Ir. H. Jabal Tarik L, M.Si.

Penguji II : Dr. Ir. Sutawi, MP.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **AYUN RICHANA**
NIM : **201310390211010**
Program Studi : **Magister Agribisnis**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **PERSEPSI PEGAWAI DINAS KEHUTANAN DAN PEDAGANG KAYU TERHADAP PENERAPAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR ; P.21/MENLHK-II/2015 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Juli 2017
atakan,

AYUN RICHANA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga kami mampu menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Persepsi Pegawai Dinas Kehutanan dan Pedagang Kayu Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak”.

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Agribisnis, Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada :

1. Dr. Ir. Anas Ta'in, MM selaku dosen pembimbing utama yang dengan kearifan seorang bapak senantiasa membangkitkan semangat kami untuk terus menulis dan dengan wawasan keilmuannya senantiasa mengarahkan untuk segera menyelesaikan tesis dengan memberikan sesuatu yang berarti bagi pengembangan ilmu penulis.
2. Dr. Ir. Damat, MP selaku dosen pembimbing pendamping yang dengan keluasan ilmunya memberikan begitu banyak pencerahan untuk

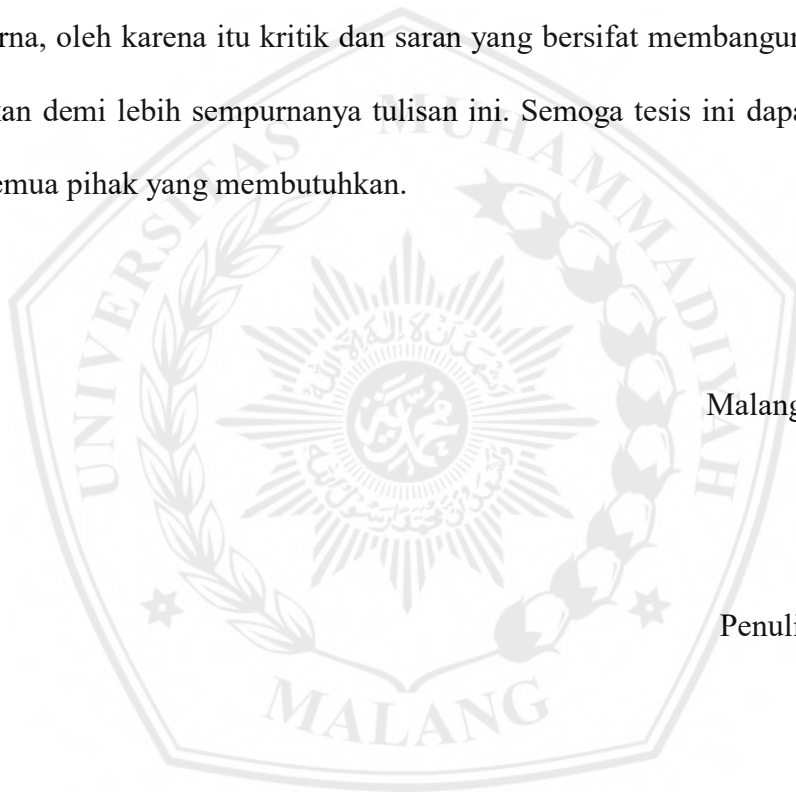
memahami setiap fenomena yang ada baik yang berkaitan langsung dengan tesis ini maupun hubungannya dengan kehidupan masyarakat.

3. Seluruh jajaran Dinas Kehutanan Kabupaten Malang yang telah membantu data dan waktu serta masukan-masukan bagi tesis ini.
4. Suami, anak-anak, orang tua dan seluruh keluargaku tercinta yang telah membantu dan mendukung baik moril dan materiil.

Kami menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi lebih sempurnanya tulisan ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2017

Penulis



DAFTAR ISI

Daftar Isi	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Batasan Masalah	9
1.6 Definisi Istilah	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Pustaka	13
2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu	13
2.1.2 Persepsi	14
2.1.3 Pembangunan Kehutanan	28
2.1.4 Penatausahaan Hasil Hutan	31
2.1.5 Potensi dan Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat	35
2.2 Kerangka Pemikiran	39
2.3 Hipotesis	40

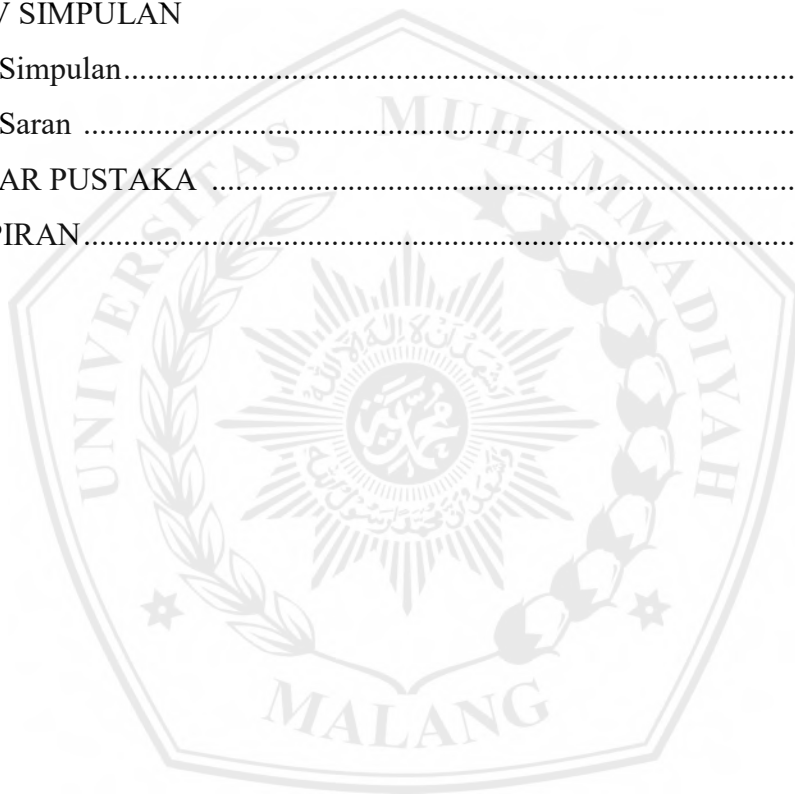
BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Subjek Objek dan Tempat Penelitian	41
3.2 Metode Penelitian	42
3.2.1 Desain Penelitian	42
3.2.2 Data dan Sumber Data	43
3.2.3 Metode Penarikan Sampel	46
3.2.4 Rancangan Uji Hipotesis	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Malang	56
4.1.1 Sejarah Dinas Kehutanan Kabupaten Malang.....	56
4.1.2 Struktur Organisasi	57
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	57
4.1.4 Visi dan Misi Dinas Kehutanan.....	75
4.2 Gambaran Umum Responden.....	76
4.2.1 Responden Dinas Kehutanan.....	77
4.2.2 Responden Pedagang Kayu	82
4.3 Deskripsi Variabel.....	88
4.3.1. Persepsi Petugas Dinas Kehutanan.....	89
4.3.2. Persepsi Pedagang Kayu.....	97
4.4. Uji Instrumen Penelitian.....	106
4.4.1. Uji Validitas.....	107
4.4.2. Uji Reliabilitas.....	110
4.4.3. Uji Normalitas Data.....	111
4.5 Hasil Analisis Uji Beda	113
4.5.1. Uji Perbandingan Persepsi Dinas dengan Pedagang tentang P.21/MENLHK-II/2015.....	113
4.5.2. Uji Perbandingan Kasus <i>Illegal Logging</i> sebelum dan sesudah P.21/MENLHK-II/2015	115
4.5.3. Uji Perbandingan Jumlah Kerugian <i>Illegal Logging</i> sebelum dan sesudah P.21/MENLHK-II/2015	118

4.6 Pembahasan	121
4.6.1. Uji Perbandingan Persepsi Dinas dengan Pedagang tentang P.21/MENLHK-II/2015	121
4.6.2. Uji Perbandingan Kasus <i>Illegal Logging</i> sebelum dan sesudah P.21/MENLHK-II/2015	124
4.6.3. Uji Perbandingan Jumlah Kerugian <i>Illegal Logging</i> sebelum dan sesudah P.21/MENLHK-II/2015	126
BAB V SIMPULAN	
5.1 Simpulan.....	128
5.2 Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN.....	132



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Perbedaan Peraturan.....	37
3.1	Data Sekunder yang digunakan untuk Penelitian	44
3.2	Kategori Skor Jawaban Responden.....	45
3.3	Operasional Variabel.....	54
4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	77
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	78
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	79
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	81
4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	82
4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	84
4.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	85
4.8	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	86
4.9	Persepsi Petugas Dinas Kehutanan	89
4.10	Rentangan Skala Variabel Persepsi Pegawai Dinas Kehutanan ..	97
4.11	Persepsi Pedagang Kayu	98
4.12	Rentangan Skala Variabel Persepsi Pedagang	106
4.13	Hasil Uji Validitas Kuesioner Persepsi Pegawai Dinas	108
4.14	Hasil Uji Validitas Kuesioner Pedagang.....	109
4.15	Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Pegawai dinas dan Pedagang	111
4.16	Hasil Uji Normalitas Data.....	112
4.17	Deskripsi Persepsi Pegawai Dinas dan Pedagang	113
4.18	Independent Sample Test	114
4.19	Perbandingan Jumlah Kasus <i>Illegal Logging</i>	116
4.20	Independent Samples Test	117
4.21	Perbandingan Kerugian Akibat Kasus <i>Illegal Logging</i>	119
4.22	Independent Samples Test	120

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Halaman
4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	77
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	79
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	80
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	82
4.5	Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	83
4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	84
4.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	86
4.8	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	87
4.9	Perbandingan Jumlah Kasus <i>Illegal Logging</i>	117
4.10	Perbandingan Jumlah Kerugian Akibat <i>Illegal Logging</i>	120

**PERSEPSI PEGAWAI DINAS KEHUTANAN DAN PEDAGANG KAYU
TERHADAP PENERAPAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.21/MENLHK-II/2015 TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL
DARI HUTAN HAK**

Ayun Richana (NIM 201310390211010)

ayunrich@yahoo.com

Anas Tain (NIDN 0021026602)

anas@umm.ac.id

Damat (NIDN 0028026402)

damatumm@gmail.com

ABSTRAK

Tata kelola hutan belum dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Tata kelola hutan yang buruk tersebut mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan baru dengan merevisi Peraturan Menteri Kehutanan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat sekaligus memberikan jaminan legalitas kepada industri yang menggunakan bahan baku dari hasil hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi dari pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu terhadap penerapan peraturan baru dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan peraturan baru terhadap jumlah kasus dan kerugian akibat *illegal logging*. Penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif komparasional, data primer dikumpulkan dari hasil wawancara dan pengisian kuisioner dari 30 sampel penelitian yang diambil dari pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu rakyat di Wilayah UPTD Bantur dan UPTD Donomulyo. Data sekunder berasal dari studi literatur yang bersumber dari instansi terkait (Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dan Perum Perhutani KPH Malang). Statistik pengolahan data primer menggunakan analisis statistik parametrik. *Independent sample t-test* digunakan untuk uji beda persepsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara persepsi antara pegawai dinas dan pedagang terhadap P.21/MENLHK-II/2015 yang didukung dari hasil uji *independent sampel t-test*. Nilai uji persepsi pedagang lebih tinggi dari persepsi pegawai dinas karena pedagang merasa jauh lebih diuntungkan terhadap adanya regulasi baru, sebagai contoh adanya pemangkasan biaya serta percepatan birokrasi terhadap pengurusan surat kayu. Sementara itu, pegawai dinas memiliki kelemahan dalam kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan regulasi baru tersebut. Terkait dengan kasus *illegal logging*, terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah kasus dan kerugian akibat *illegal logging* sebelum dan setelah penerapan P.21/MENLHK-II/2015 yaitu penurunan jumlah kasus dan kerugian yang signifikan. Penyederhanaan dan kemudahan regulasi pemerintah mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan pencurian berkurang, yang menyebabkan kerugian negara juga berkurang.

Kata kunci: Persepsi, Penatausahaan hasil hutan, *illegal logging*

**THE PERCEPTION OF FOREST GOVERNANCE STAFFS AND WOOD
TRADERS ON THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY FROM
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY P.21/MENLHK-
II/2005 ABOUT MANAGEMENT OF FOREST PRODUCTS
FROM LOCAL FOREST AREA**

Ayun Richana (NIM 201310390211010)

ayunrich@yahoo.com

Anas Tain (NIDN 0021026602)

anas@umm.ac.id

Damat (NIDN 0028026402)

damatumm@gmail.com

ABSTRACT

Forest governance was not implemented efficiently, effectively, transparently, and accountably yet. Due to this poor instigation, the government eventually decided to revise the regulation from Ministry of Forestry to guarantee and protect community's right in the meantime it also provides legal assurance to industries that use raw materials from community forest. This study aims to investigate the different perceptions of Forestry Bureau staffs and wood traders towards the implementation of the new regulation from the Ministry of Environment and Forestry P.21/MENLHK-II/2015 in Malang district. Using quantitative descriptive comparison analysis, this study also seeks to investigate the significant effect from the implementation of the new regulation towards the number of illegal logging cases and the financial losses from those illegal activities. 30 samplings taken from Forest Service Employees (Wasganis PHPL) and wood traders from the region of UPTD Bantur and UPTD Donomulyo who were willingly to participate in this study. The comparison test reveals that there is significant difference in the number of illegal logging cases before and after the implementation of the new regulation of P.21/MENLHK-II/2015 in which the new regulation has significantly decreased the number of the cases and financial losses caused by illegal logging.

Key Word: perceptions, Forest product governance, illegal logging

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Hutan adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hutan dikuasai oleh negara, yang dimaksud hal ini adalah hutan alam atau hutan hasil budidaya (tanaman) yang berada di dalam kawasan hutan negara. Selain melakukan pengelolaan terhadap hutan negara, pemerintah telah mempromosikan dan mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat antara lain dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahan-lahan rakyat atau lahan milik. Dalam menjalankan kebijakannya tersebut pemerintah berupaya menggalakan kebijakan untuk menanam berbagai pohon berbasis hutan hak. Salah satu program tersebut diantaranya adalah pencanangan gerakan sengonisasi sebagai alternatif pemenuhan bahan baku industri yang sekaligus juga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat. Sebagai hasilnya saat ini beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah telah menjadi sentra kayu sengon.

Adanya program tersebut tentunya berdampak positif terhadap industri yang menjadikan kayu sebagai bahan baku utama dan sekaligus memberikan peran yang signifikan kepada masyarakat untuk turut serta memberikan jaminan terhadap kelangsungan industri kehutanan nasional. Selain itu juga

tentunya upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat akan tercapai. Selain program pemberdayaan, pemerintah juga melakukan kebijakan terkait penatausahaan kayu khususnya yang berasal dari hutan hak. Hal tersebut dilakukan karena maraknya kasus *illegal logging* yang ada di Indonesia.

Sejak tahun 2005 kasus *illegal logging* terus meningkat hingga mencapai 2,8 juta hektar pertahun sampai tahun 2013. Pada tahun 2005 Indonesia memiliki kawasan hutan 126,8 juta hektar dengan berbagai pembagian fungsi, yaitu fungsi konservasi (23,2 juta hektar), kawasan lindung (32,4 juta hektar), hutan produksi terbatas (21,6 juta hektar), hutan produksi (35,6 juta hektar), dan hutan produksi konversi (14,0 juta hektar). Namun tahun 2013 organisasi lingkungan dunia Green Peace menyebutkan bahwa 72 % hutan Indonesia telah musnah. Setengah wilayah hutan masih ada dalam kondisi terancam musnah karena penebangan komersial, kebakaran hutan, serta pembukaan hutan untuk kebun kelapa sawit dan pertanian. *Illegal Logging* telah menyebabkan 600.000 hektar hutan Sumatera Utara rusak. Kerusakan tersebut terdapat di hutan produksi dan hutan lindung. *Illegal Logging* juga menyebabkan lebih dari 700.000 hektar hutan di Kalimantan Selatan rusak. Departemen Kehutanan memperkirakan jumlah lahan hutan di seluruh Indonesia yang rusak akibat penjarahan mencapai 2,8 juta hektar per tahun. Hingga kini sudah mencapai 60 juta hektar yang telah musnah. Kerugian yang diderita negara mencapai 40 triliun - 50 triliun rupiah per tahun (<http://ppid.dephut.go.id/2015>).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat kebijakan dengan adanya regulasi baru guna lebih meningkatkan kegiatan ekonomi, memangkas ekonomi biaya tinggi, penyederhanaan perizinan, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adanya regulasi tersebut disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya: 1) Tata kelola hutan belum dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel; 2) Prosedur Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) banyak memberikan ruang bagi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; 3) Pengelolaan hutan produksi belum sepenuhnya dilandasi oleh prinsip *good governance* dan hutan lestari; dan 4) sistem *official assesment* dipandang belum memadai dan rumit.

Selain itu laporan dari Dirjen Bina Usaha Kehutanan (2014) menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang dihadapi di kawasan hutan produksi yaitu: 1) Pengawasan pasca pemberian izin usaha masih lemah, 2) Ketimpangan akses usaha masyarakat dengan usaha korporasi sangat tinggi, 3) Pemanfaatan ruang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) belum optimal sehingga produktivitas hutan produksi masih rendah, ketaatan pemegang izin masih rendah dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) belum beroperasi. Disisi lain, Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dengan sistem *official assesment* terlalu rumit, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum efektif, industri hasil hutan kurang kompetitif, dan distorsi harga pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Guna menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat dan sekaligus memberikan jaminan legalitas kepada industri yang menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil hutan rakyat pemerintah mengambil kebijakan dengan merevisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P. 30/Menhut-II/2012 menjadi PermenLHK No:P. 21/MENLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, dan telah berlaku sejak tanggal diundangkan, tanggal 4 Juni 2015. Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah melakukan revisi khususnya terkait penyerdahanaan birokrasi dan berusaha memfasilitasi masyarakat dengan pengusaha industri melalui penatausahaan yang memadai. Selain itu penatausahaan hasil hutan rakyat juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat baik penghasil maupun pengguna hasil hutan rakyat, yang sekaligus dapat membedakan antara hasil hutan milik negara dan hasil hutan milik masyarakat.

Adanya penyerdahanaan birokrasi tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan tentang jenis dokumen angkut dari hutan hak yang hanya dibagi menjadi 2 jenis blanko saja yaitu nota angkutan dan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) yang tertuang pada pasal 4-5. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa nota angkutan digunakan untuk pengangkutan semua jenis kayu yang berasal dari hutan hak yang berada di Jawa, Bali dan Lombok, dari lokasi tebang atau tempat pengumpulan di sekitar penebangan ke tujuan, sedangkan SKAU untuk pengangkutan semua jenis kayu di Luar Jawa, Bali dan Lombok kecuali untuk jenis-jenis: jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari,

mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai. Pokok-pokok perubahan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 21/MENLHK-II/2015 adalah tidak ada izin penebangan; di Pulau Jawa, Bali dan Lombok menggunakan nota angkutan; tidak ada pengangkatan penerbit nota angkutan; pengadaan dan pengisian blangko oleh pembeli atau pemilik ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak; penggandaan dan pengisian blangko nota angkutan dapat digandakan dengan ditulis tangan atau difotocopi; penyuluh kehutanan melakukan pendampingan PUHH Hutan Hak; dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau surat keterangan kepala desa/lurah.

Pemerintah pusat berharap dengan adanya Penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 21/MENLHK-II/2015 maka produktivitas dan kemandirian ekonomi rakyat lebih cepat tercapai, ketersediaan data dan informasi hasil hutan hak/rakyat lebih maksimal. Di sisi lain terbitnya aturan baru yang berisi penyederhanaan izin dan PUHH akan berdampak pada tugas Wasganis PHPL. Adanya perubahan kebijakan *official assessment* ke *self assessment* dalam PUHH, maka peran Wasganis PHPL sudah tidak ada atau berkurang, pelaksanaan PUHH dan PNPB dengan pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui post audit.

Dalam upaya sosialisasi peraturan baru tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai sosialisasi Implementasi Kebijakan

Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang dilaksanakan sejak terbitnya peraturan tersebut. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kelompok Tani Hutan Hak, pemegang IUPHHK, perangkat Desa, Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL), Wasganis PHPL-PKB dan Perum Perhutani dari Kabupaten Magetan, Madiun dan Ngawi. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan bahwa peraturan dapat direalisasikan dan diimplementasikan di lapangan dengan segera dan dapat diketahui tugas dan fungsi masing-masing kelompok.

Salah satu dampak besar dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 21/MENLHK-II/2015 adalah mengenai fungsi dan tugas Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Wasganis-PHPL). Wasganis PHPL merupakan Pegawai Kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama direktur jenderal. Berkurangnya tugas dan wewenang Wasganis PHPL tentunya memberikan persepsi sendiri bagi pegawai Dinas Kehutanan khususnya Wasganis PHPL.

Persepsi berkurangnya wewenang dan fungsi Dinas Kehutanan khususnya Wasganis PHPL dapat berupa persepsi positif maupun negatif. Demikian juga dengan pedagang kayu dalam hal ini adalah masyarakat, mereka pasti memiliki persepsi terkait terbitnya peraturan tersebut. Adanya regulasi baru dengan pemangkasan sistem birokrasi dari sistem *official assessment* ke *self assessment* akan membuat pedagang kayu lebih leluasa dalam menjalankan usahanya. Kotler (2000: 76) menjelaskan persepsi sebagai

proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.

Liliweru (2003:137) menjelaskan bahwa persepsi ialah yang menentukan seseorang memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain dan pesan tersebut akan diolah serta mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Apabila persepsi tersebut positif maka sikap dan perilaku akan terdorong ke arah positif demikian juga sebaliknya. Mulyana (2001: 171) menjelaskan bahwa untuk membentuk sebuah persepsi maka setiap individu harus melakukan tahap atau proses pemilihan, pengorganisasian, serta penginterpretasian sebagai stimuli yang diterimanya mengenai suatu hal, yang selanjutnya mengungkapkan pandangan, pendapat, ataupun tanggapan mengenai hal tersebut.

Persepsi masyarakat selaku pedagang kayu dan pegawai Dinas Kehutanan khususnya Wasganis PHPL tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 dapat bersifat positif dan negatif dan juga bisa sama dan berbeda. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Persepsi Pegawai Dinas Kehutanan Dan Pedagang Kayu Terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak”.

1. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi pegawai Dinas Kehutanan dengan pedagang kayu terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang?
3. Bagaimana dampak penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang terhadap jumlah kasus dan jumlah kerugian *illegal logging*?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui persepsi pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang.
2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi pegawai Dinas Kehutanan dengan pedagang kayu terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang.

3. Mengetahui dampak penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang terhadap jumlah kasus dan jumlah kerugian dari *illegal logging*.

1. 4 Kegunaan Penelitian

1. 4. 1 Kegunaan Teoritis (Keilmuan)

Sebagai tambahan pengetahuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan terkait Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak dan lebih khusus lagi tentang penyederhanaan birokrasi dalam sistem perdagangan kayu.

1. 4. 2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyusunan peraturan tentang penatausahaan kayu rakyat di masa yang akan datang. Bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang sebagai masukan dalam menentukan keputusan untuk pembinaan dan pengawasan peredaran kayu rakyat di Kabupaten Malang.

1. 5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, pembatasan masalah penelitian ini adalah persepsi pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil

Hutan yang Berasal dari Hutan Hak. Pada penelitian ini hanya terbatas dengan ruang lingkup persepsi pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu peneliti akan mengumpulkan data jumlah kasus *illegal logging* yang terdapat di Kabupaten Malang kemudian membandingkan sebelum dan sesudah diberlakukannya peraturan yaitu pada periode Juni-Oktober 2014 dengan Juni-Oktober 2015.

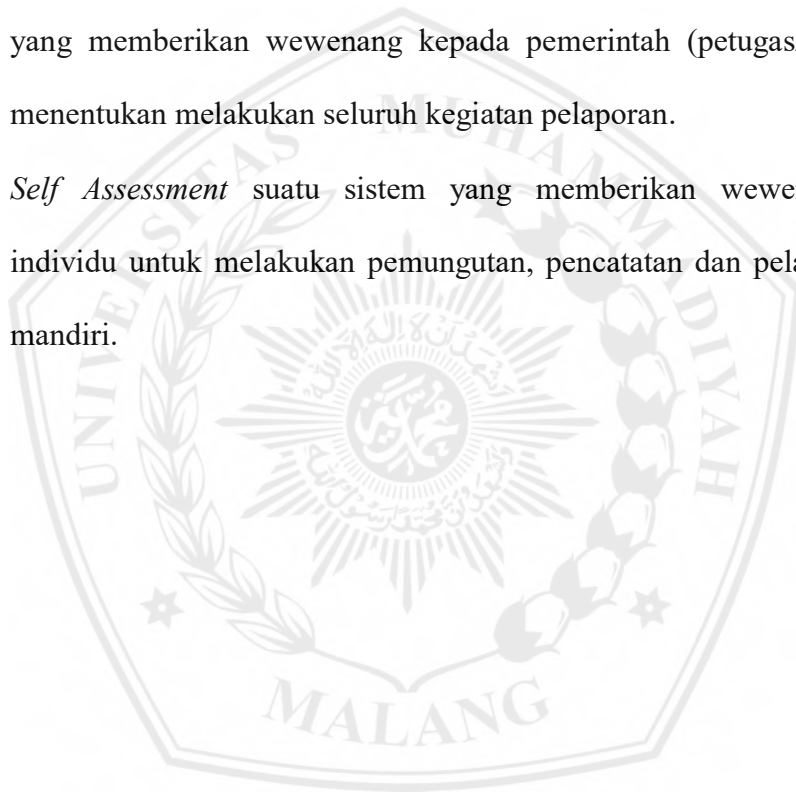
1. 6 Definisi Istilah

1. Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan.
2. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usahaz (HGU), Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
3. Hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yang selanjutnya disebut hasil hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas area hutan hak atau lahan masyarakat.

4. Kayu olahan hutan hak/kayu olahan rakyat adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di lokasi tebangan dengan menggunakan alat gergaji mekanis dan/atau non mekanis.
5. Nota angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.
6. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan semua jenis kayu hutan hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik hasil hutan hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT), Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL) dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT).
7. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).
8. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat Ganis PHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan

kualifikasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.

9. *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi
10. *Official Assestment* adalah sistem pemungutan, pencatatan dan pelaporan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas/dinas) untuk menentukan melakukan seluruh kegiatan pelaporan.
11. *Self Assessment* suatu sistem yang memberikan wewenang kepada individu untuk melakukan pemungutan, pencatatan dan pelaporan secara mandiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu dilaksanakan oleh Astana, dkk (2014) dengan judul “Dapatkah SVLK Mendorong Tata Kelola Kehutanan ke Arah yang Lebih Baik” menunjukkan hasil bahwa Dalam hal pemberantasan pembalakan ilegal dan perdagangannya, skema SVLK juga mempunyai nilai tambah yakni dalam hal mencegah perusahaan melakukan pembalakan ilegal di areal yang dilindungi, menebang pohon pada sisi sungai dan areal kemiringan tajam, melakukan pembalakan berlebihan atau menebang pohon yang tidak sesuai rencana kerja. Penerapan SVLK juga mengendalikan penebangan pohon pada pembukaan jalan tanpa izin, sebuah kajian nilai tambah sistem verifikasi legalitas kayu.
2. Penelitian selanjutnya dilaksanakan oleh Ngakan, dkk (2006) dengan judul Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat Dusun Pampli terhadap hasil hutan adalah sangat besar. Hasil hutan yang mereka manfaatkan adalah, berturut-turut dari yang paling banyak: rotan, kayu bahan bangunan, kayu bakar, sayuran dan obat-obatan, serta udang dan ikan. Semua laki-laki dewasa di Dusun Pampli pernah bekerja sebagai pemungut rotan. Selain beras yang mereka hasilkan dari

sawah, hampir semua kebutuhan hidup lainnya mereka penuhi dari bekerja mengumpulkan hasil hutan, terutama rotan.

3. Penelitian relevan selanjutnya dilakukan oleh Anik Fatun (2013) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan peraturan dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), terdapat pengaruh negatif antara keadilan distributif dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), terdapat pengaruh negatif antara keadilan prosedural dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), tidak terdapat pengaruh antara budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

2.1.2 Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan

mengerti tentang apa yang diindera. Mulyana (2001:167) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses internal yang memungkinkan kita untuk memilih, mengorganisasikan serta menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita dan dari proses tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita nantinya. Dari persepsilah yang menentukan kita untuk memiliki suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antara individu, dan sebagai konsekuensinya maka semakin cenderung membentuk suatu kelompok budaya ataupun kelompok identitas. Menurut Kotler (2000: 76) persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.

Menurut Yuwono (2006: 19), persepsi merupakan produk atau proses psikologi yang dialami seseorang setelah menerima stimuli yang mendorong tumbuhnya motivasi untuk memberikan respon melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan. Persepsi dapat berupa kesan, penafsiran atau penilaian berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Dalam hubungan ini persepsi merupakan suatu proses pengambilan keputusan tentang pemahaman seseorang kaitannya dengan suatu obyek, stimuli atau individu lain (Junianto, 2007: 72).

Liliweru (2003:137) menyatakan bahwa persepsi yang dimiliki oleh seseorang merupakan *frame of reference* seseorang yang dapat menjadi sebuah saringan untuk menyaring pesan yang dikirim dan disandi balik. Persepsi disebut inti dari komunikasi karena jika persepsi itu sendiri sifatnya tidak akurat maka tidak akan tercipta pula sebuah komunikasi yang efektif. Persepsilah yang menentukan seseorang memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain.

Jadi dapat disimpulkan secara sederhana bahwa untuk membentuk sebuah persepsi maka setiap individu harus melakukan tahap atau proses pemilihan, pengorganisasian, serta penginterpretasian sebagai stimuli yang diterimanya mengenai suatu hal, yang selanjutnya mengungkapkan pandangan, pendapat, ataupun tanggapan mengenai hal tersebut.

Dalam kaitannya dengan persepsi masyarakat dan aparaturnya maka persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan atau respon masyarakat terhadap peraturan yang telah dikeluarkan, yang dapat dibedakan menjadi respon negatif seseorang atau menolak, karena ketidaksetujuan atau ketidakcocokan dan juga persepsi positif atau persetujuan dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

b. Jenis Persepsi

Mulyana (2001:171), mengemukakan bahwa pada dasarnya persepsi manusia terbagi menjadi dua yakni :

1) Persepsi Terhadap Objek Lingkungan Fisik

Persepsi tiap orang dalam menilai suatu objek atau lingkungan fisik seseorang dapat melakukan kekeliruan, sebab terkadang indera seseorang menipu diri orang tersebut. Hal tersebut disebabkan karena :

- a) Kondisi yang mempengaruhi pandangan seseorang seperti keadaan cuaca yang membuat fatamorgana, pembiasan cahaya seperti dalam peristiwa ketika seseorang melihat bahwa tongkat yang dimasukkan ke dalam air akan

terlihat bengkok padahal sebenarnya tongkat tersebut berposisi lurus. Hal inilah yang biasa disebut dengan ilusi.

- b) Latar belakang pengalaman yang berbeda antara seseorang dengan orang lain
- c) Budaya yang berbeda
- d) Suasana psikologis yang berbeda juga dapat menimbulkan perbedaan persepsi seseorang dengan orang lain di dalam mempersepsikan suatu objek.

2) Persepsi Terhadap Manusia Atau Persepsi Sosial

Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang dialami seseorang didalam lingkungan orang tersebut. Sedangkan menurut Brehm dan Kassin, persepsi sosial adalah penilaian-penilaian yang terjadi dalam upaya manusia dalam memahami orang lain. Persepsi sosial dikatakan lebih sulit dan kompleks disebabkan karena :

- a) Manusia bersikap dinamis oleh karena itu persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu dan lebih cepat daripada persepsi terhadap objek.
- b) Persepsi sosial tidak hanya menanggapi sifat-sifat yang tampak dari luar, namun juga sifat-sifat ataupun alasan-alasan internalnya.
- c) Persepsi sosial bersifat interaktif karena pada saat seseorang mempersepsikan orang lain, maka orang lain tersebut tidak diam saja melainkan turut mempersepsikan orang tersebut.

c. Karakter Persepsi

Menurut Busch dan Houston yang dikutip oleh Sumarwan (2000:113), karakteristik persepsi dapat didefinisikan sebagai berikut :

1) Bersifat selektif

Manusia mempunyai keterbatasan dalam hal kapasitas atau kemampuan mereka dalam memperoleh semua informasi dari lingkungan. Seseorang pasti berhadapan dengan sub kumpulan yang terbatas dari objek-objek maupun peristiwa yang banyak sekali dalam lingkungan mereka. Masyarakat cenderung memperhatikan aspek lingkungan yang berhubungan dengan urusan pribadi mereka. Mereka mengesampingkan urusan-urusan lain yang tidak memiliki kaitan dengan urusan pribadi mereka.

2) Terorganisir dan teratur

Suatu perangsang atau pendorong tidak bisa dianggap terisolasi dari perangsang lain. Rangsangan-rangsangan dikelompokkan ke dalam suatu pola ataupun informasi yang membentuk keseluruhan, Jadi ketika seseorang memperhatikan sesuatu, perangsang harus berusaha untuk mengatur. Stimulus adalah apa yang dirasakan dan arti yang terdapat didalamnya adalah fungsi dari perangsang tersebut atau pendorong itu sendiri.

3) Subyektif

Persepsi merupakan fungsi dari faktor pribadi hal-hal yang berasal dari sifat penikmat atau perasa, kebutuhan, nilai-nilai, motif, pengalaman, masa lalu, pola pikir, dan kepribadian seseorang dalam individu dalam memainkan sebuah peran dalam persepsi.

d. Komponen Persepsi

Seperti telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya bahwa inti dari komunikasi adalah persepsi, sedangkan inti dari persepsi itu sendiri adalah

interpretasi atau penafsiran. Berikut ini penguraian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persepsi selain dari penafsiran itu sendiri. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan persepsi atau komponen dari persepsi antara lain :

1) Penginderaan (Sensasi)

Penginderaan dapat ditangkap melalui alat-alat indera kita antara lain :

- a) Mata sebagai indera penglihatan dalam menyampaikan pesan nonverbal ke otak untuk kemudian diinterpretasikan. Otak menerima kira-kira dua pertiga pesan melalui rangsangan visual sehingga dapat dikatakan penglihatan sebagai indera yang paling utama.
- b) Telinga sebagai indera pendengaran juga dalam menyampaikan pesan nonverbal ke otak untuk kemudian ditafsirkan dan suara ini dapat diterima dari semua arah.
- c) Hidung sebagai indera pembau
- d) Kulit sebagai indera peraba
- e) Lidah sebagai indera pengecap maupun perasa

2) Atensi

Dalam proses persepsi, atensi sangat tidak terhindarkan sebab sebelum seseorang memberikan respon atau menafsirkan kejadian ataupun rangsangan apapun, orang tersebut terlebih dahulu memperhatikan kejadian atau rangsangan tersebut. Dalam hal ini rangsangan yang menarik perhatian seseorang akan dianggap lebih penting oleh orang tersebut, daripada rangsangan yang tidak menarik perhatiannya. Rangsangan yang tidak menarik perhatian seseorang akan cenderung diabaikan oleh orang tersebut.

3) Interpretasi

Interpretasi sebuah pesan yang diperoleh seseorang melalui salah satu atau lebih indera orang tersebut merupakan tahap terpenting dalam proses persepsi. Namun tidak semua pesan atau rangsangan yang ditangkap oleh indera seseorang akan diinterpretasikan semuanya oleh orang tersebut, karena berbagai alasan antar lain: tidak sesuai dengan kepentingannya, keterbatasan kemampuan panca indera dalam menangkap rangsangan yang terlampau banyak dalam satu waktu yang sama, dan tidak semua rangsangan memiliki daya tarik yang sama bagi orang tersebut. (Mulyana, 2001:168-170)

Menurut Hamka (2002: 101-106), indikator persepsi ada dua macam, yaitu;

1. Menyerap, yaitu stimulus yang berada di luar individu diserap melalui indera, masuk ke dalam otak, mendapat tempat. Di situ terjadi proses analisis, diklasifikasi dan diorganisir dengan pengalaman -pengalaman individu yang telah dimiliki sebelumnya. Karena itu penyerapan itu bersifat individual berbeda satu sama lain meskipun stimulus yang diserap sama.
2. Mengerti atau memahami, yaitu indikator adanya persepsi sebagai hasil proses klasifikasi dan organisasi. Tahap ini terjadi dalam proses psikis. Hasil analisis berupa pengertian atau pemahaman. Pengertian atau pemahaman tersebut juga bersifat subjektif, berbeda - beda bagi setiap individu.

Menurut Walgito (2003: 54 -55), persepsi memiliki indikator - indikator sebagai berikut:

1. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu.

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pencecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu, baru saja atau sudah lama.

2. Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong -golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran -gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut apersepsi).

3. Penilaian atau evaluasi

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman , terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual.

Tubbs dan Moss (2003:39- 40) mengemukakan bahwa komponen persepsi terdiri dari seleksi atau selektif, organisasi dan penafsiran. Persepsi adalah suatu proses aktif dimana setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalaman secara selektif. Pemilihan stimuli tersebut bergantung pada minat, motivasi, keinginan, dan harapan. Manusia cenderung mengorganisasikan stimuli secara efektif, berarti bahwa stimuli diurutkan dan disajikan dalam sebuah gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan dapat diindra. Stimuli dipersepsi dan diorganisasi secara selektif, selanjutnya stimuli ditafsirkan secara selektif pula. Artinya stimuli diberikan makna secara unik oleh orang yang menerimanya sesuai masa lalu, asumsi perilaku, suasana hati, dan harapan orang tersebut. Oleh Mulyana (2001:169) dikatakan bahwa tiga tahap ataupun komponen persepsi baik sensasi, atensi, dan interpretasi atau seleksi (mencakup sensasi dan atensi), organisasi dan interpretasi pada dasarnya adalah sama.

e. Proses Terjadinya Persepsi

Mulyana (2001:172) menyatakan proses persepsi secara umum terbagi dalam empat tahap, yakni :

1) Perhatian dan Seleksi (*Attention and Selection*)

Pemilihan secara selektif hanya memberikan kesempatan pada proporsi yang kecil dari seluruh informasi yang ada. Proses seleksi ini berasal dari proses yang terkontrol, yaitu individu secara sadar memutuskan informasi mana yang akan diperhatikan dan mana yang diabaikan.

2) Organisasi (*Organization*)

Pada tahap ini seluruh informasi yang telah masuk seleksi pada tahap sebelumnya akan diorganisasikan. Adapun cara untuk mengorganisasi informasi secara efisien adalah schema. Schema adalah kerangka kognitif yang menggambarkan pengetahuan yang diorganisasi dengan pemberian konsep atau stimulus yang dibangun melalui pengalaman.

3) Interpretasi (*Interpretation*)

Setelah perhatian digambarkan pada stimulus tertentu dan informasi telah diorganisasi maka individu akan mencoba untuk memperoleh jawaban tentang makna dari informasi tersebut. Tahap ini sangat dipengaruhi oleh *causal attribution*, yaitu sebuah percobaan untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi seperti itu.

4) Pencarian Kembali (*Retrieval*)

Informasi yang telah disimpan dalam memori harus dicari kembali bila informasi tersebut digunakan. Individu akan lebih mudah mendapatkan kembali informasi yang telah tersimpan bila telah terskema dan terorganisir.

Jadi proses persepsi diawali dengan perhatian dan seleksi terhadap informasi yang ada, kemudian informasi yang telah terseleksi tersebut tersebut diorganisir, setelah itu mulailah tahap interpretasi yaitu individu mencoba memahami makna informasi tersebut. Ketika individu membutuhkan informasi tersebut, maka dilakukan tahap pencarian kembali. (Schermerhorn, 1994:153-155)

f. Faktor yang mempengaruhi Persepsi

Rakhmat (2001: 66) menjelaskan persepsi dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

1) Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :

a) Fisiologis.

Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

b) Perhatian.

Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.

c) Minat.

Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.

d) Kebutuhan yang searah.

Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek/ pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

e) Pengalaman dan ingatan.

Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.

f) Suasana hati.

Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat

mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :

a) Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus.

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besar hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.

b) Warna dari obyek-obyek.

Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be perceived*) dibandingkan dengan yang sedikit.

c) Keunikan dan kontrasan stimulus.

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali diluar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

d) Intensitas dan kekuatan dari stimulus.

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.

e) Motion atau gerakan.

Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

f) Faktor psikologis

Faktor psikologis yang mempengaruhi persepsi diantaranya:

a) Emosi; akan mempengaruhi seseorang dalam menerima dan mengolah informasi pada suatu saat, karena sebagian energi dan perhatiannya adalah emosinya tersebut. Seseorang yang sedang tertekan karena baru bertengkar dengan pacar dan mengalami kemacetan, mungkin akan mempersepsikan lelucon temannya sebagai penghinaan.

b) Impresi; stimulus yang salient / menonjol, akan lebih dahulu mempengaruhi persepsi seseorang. Gambar yang besar, warna kontras, atau suara yang kuat dengan pitch tertentu, akan lebih menarik seseorang untuk memperhatikan dan menjadi fokus dari persepinya. Seseorang yang memperkenalkan diri dengan sopan dan berpenampilan menarik, akan lebih mudah dipersepsikan

secara positif, dan persepsi ini akan mempengaruhi bagaimana ia dipandang selanjutnya.

- c) Konteks; walaupun faktor ini disebutkan terakhir, tapi tidak berarti kurang penting, malah mungkin yang paling penting. Konteks bisa secara sosial, budaya atau lingkungan fisik. Konteks memberikan ground yang sangat menentukan bagaimana figur dipandang. Fokus pada figur yang sama, tetapi dalam ground yang berbeda, mungkin akan memberikan makna yang berbeda.

2.1.3 Pembangunan Kehutanan

a. Permasalahan Sektor Kehutanan

Permasalahan yang selama ini dihadapi sektor kehutanan pada umumnya merupakan masalah lama atau masalah yang sudah dirasakan sejak sekitar tahun 1990- an. Sebelum masa itu potensi hutan produksi alam negara masih dapat diandalkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan lapangan kerja. Namun pada era selanjutnya, kehutanan mengalami pukulan yang cukup berat, dimana potensi hutan alam semakin menurun, hutan-hutan alam mengalami degradasi (penurunan baik luasan maupun kualitasnya) akibat dari mismanajemen, perambahan dan *illegal logging* serta perencanaan konversi hutan untuk kepentingan lain yang kurang tepat. Dengan semakin menurunnya kualitas hutan, maka kemampuan hutan alam untuk memberikan pasokan bahan baku kepada

industri perkayuan terus semakin menurun. Akibat langsung yang dirasakan adalah semakin banyak industri kehutanan yang harus ditutup, yang berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan industri perkayuan. Hancurnya sektor kehutanan telah berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan sosial, dengan kata lain, akibat kehancuran ini identik dengan semakin meningkatnya jumlah rakyat miskin. Hilangnya penghasilan masyarakat ini telah memberikan dorongan bagi masyarakat untuk mudah tergiur dengan bujukan untuk melakukan kegiatan *illegal logging*.

b. Kebijakan Pembangunan Kehutanan

Departemen Kehutanan telah menetapkan program-program prioritas untuk mengatasi permasalahan bidang kehutanan, antara lain: pemberantasan *illegal logging*, revitalisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan pemantapan kawasan hutan. Program pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu: meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan.

Kegiatan pembangunan kehutanan berbasis masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka

ketergantungan masyarakat terhadap hutan semakin berkurang dan diharapkan tekanan terhadap hutan negara juga akan semakin berkurang. Demikian juga apabila masyarakat dapat menanam lahan-lahan miliknya dengan komoditas kehutanan, maka kebutuhan terhadap hasil hutan dapat dipenuhi secara mandiri, bahkan komoditas yang dihasilkan akan dapat memberikan penghasilan yang cukup signifikan.

c. Kebutuhan Bahan Baku Industri

Semakin menurunnya pasokan bahan baku dari hutan baik karena turunnya kualitas hutan alam dan semakin mahalnya kayu kelompok jenis *Dipterocarpaceae*, menuntut adanya upaya untuk mencari solusi melalui substitusi bahan baku industri dengan memanfaatkan kayu dari hasil budidaya masyarakat. Dari beberapa pengamatan terhadap industri kehutanan yang memanfaatkan bahan baku rakyat, ternyata produk mereka cukup mendapatkan tempat di pasar internasional.

Reaksi pasar internasional ini didukung dengan adanya isu dan gerakan *anti illegal logging* yang dinilai telah menghancurkan hutan tropis. Kayu tanaman masyarakat dianggap sebagai salah satu komoditas yang ramah lingkungan. Selain itu gencarnya semangat untuk mempromosikan produk yang ramah lingkungan dan adanya *procurement policy* dari negara pengimpor kayu yang hanya akan menerima produk kayu legal yang dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya, telah merubah kebijakan industri dalam hal pemenuhan bahan bakunya seiring dengan tuntutan adanya upaya memberantas *illegal logging*,

Uni Eropa telah memberikan respon melalui *Forest Law Enforcement Governance and Trade –Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA)*, yaitu suatu respon yang menawarkan kepada negara-negara produsen atau eksportir yang menjual produknya ke pasar Eropa, untuk membuat kesepakatan bersama yang intinya hanya akan menjual dan menerima kayu-kayu yang benar-benar legal. Penentuan standar legalitas akan dirumuskan bersama dengan melalui suatu proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga independen secara transparan. Sebagai upaya memberantas *illegal logging*, pembangunan kehutanan berbasis masyarakat perlu terus dikembangkan. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kayu akibat ketidakseimbangan antara *demand* dan *supply*, tanpa harus memberikan tekanan terhadap hutan negara yang semakin menurun kualitasnya.

2.1.4 Penatausahaan Hasil Hutan

a. Prinsip-prinsip Penatausahaan Hasil Hutan

Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan. Penatausahaan ini dimaksudkan sebagai suatu sistem monitoring peredaran hasil hutan mulai dari hulu sampai ke hilir (sampai dengan tempat tujuan akhir) dengan tujuan mengamankan aset negara. Dalam sistem penatausahaan hasil hutan ini,

pada setiap simpul (setiap pemberhentian dalam pengangkutan hasil hutan) dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang kompeten dan berwenang sebagai suatu proses verifikasi. Dengan sistem penatausahaan yang dilaksanakan dan mengalir secara konsisten, diharapkan dapat memberikan jaminan legalitas terhadap hasil hutan tersebut.

Prinsip legalitas hasil hutan yang berasal dari hutan negara adalah bahwa suatu komoditas hasil hutan dapat secara bebas diperdagangkan atau dimanfaatkan setelah melalui suatu proses verifikasi secara utuh dan dinyatakan memenuhi ketentuan (*compliance*), mulai dari: legalitas perizinan (izin pemanfaatan), legalitas izin pemanenan (RKT), legalitas pemanenan (kebenaran blok dan petak tebangan), legalitas pengukuran dan pengujian untuk menetapkan hak-hak negara, legalitas pemenuhan kewajiban kepada negara (PSDH dan DR) dan legalitas pengangkutan hasil hutan. Jadi, legalitas harus dilihat secara utuh mulai dari hulu sampai ke hilir. Dokumen yang diterbitkan mulai dari hutan sampai di tempat tujuan akhir, pada dasarnya merupakan suatu dokumen yang menggambarkan mekanisme yang dapat dipakai untuk proses lacak balak (pembuktian mundur ke asal-usul).

b. Deregulasi Sistem Penatausahaan Hasil Hutan

Walaupun penatausahaan hasil hutan dimaksudkan sebagai upaya sebagai sistem lacak-balak atau *Chain of Custody*, namun sistem penatausahaan hasil hutan yang berlaku sebelumnya telah banyak

membebani investor karena timbulnya ekonomi biaya tinggi. Kewajiban pemeriksaan oleh petugas kehutanan pada setiap simpul tidak memberikan iklim kondusif bagi kegiatan investasi dan malah menimbulkan ketidakpastian, karena dalam perlakuan tidak ada perbedaan yang proporsional mana aset negara dan mana aset privat.

Biaya yang timbul dari sistem penatausahaan seperti sebelumnya akan menurunkan daya saing di pasar internasional. Sistem penatausahaan hasil hutan dalam 30 tahun terakhir telah mengalami beberapa kali perbaikan, mulai dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment*, kemudian kembali ke *official assessment*. Apabila kita berkilas balik, dalam periode awal tahun 1990 an, kayu/hasil hutan diangkut dan dibayar PSDH/DR nya setelah sampai di tempat tujuan (industri penerima). Industri penerima dalam hal ini disebut sebagai wajib pungut dan wajib setor PSDH/DR. Pada kondisi tersebut status hasil hutan sebenarnya masih sebagai aset negara, oleh karena itu dilindungi dengan dokumen negara.

Jika penatausahaan hasil hutan tidak tepat, misalnya pada saat hasil hutan masih berstatus sebagai aset negara, dokumen angkutannya (SAKB) diterbitkan secara *self assessment* oleh perusahaan. Hal ini sangat beresiko terhadap terjadinya tindak kecurangan. Pada prinsipnya sistem penatausahaan harus konsisten dengan status hasil hutan. Pada saat statusnya masih sebagai aset negara maka seharusnya verifikasi dan dokumen diterbitkan oleh pejabat negara secara *official assessment*.

Pada saat status hasil hutan sudah sebagai aset privat, maka penerbitan dokumen dilaksanakan secara *self assessment* oleh perusahaan pemilik. Status hasil hutan sebagai aset negara atau sebagai aset privat ditentukan melalui serangkaian proses verifikasi mulai dari hulu, yaitu:

- 1) Izin pemanfaatannya sah
- 2) Memiliki izin pemanenan tahunan yang sah
- 3) Melakukan pemanenan secara benar
- 4) Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan secara benar dan sah
- 5) Memenuhi semua kewajiban kepada negara secara benar dan sah
- 6) Laporan Hasil Pemanenan (LHP) sah. Pengertian sah dalam setiap butir di atas adalah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara yang ditunjuk.

Dalam penatausahaan hasil hutan yang baru (Permenhut Nomor 55 Tahun 2006) telah secara jelas dibedakan antara wilayah aset negara dan wilayah aset privat. Setelah melalui serangkaian verifikasi yang mengalir secara konsisten sebagaimana tersebut di atas, maka setelah Laporan Pemanenan Hasil Hutan disahkan, sejak saat itu status hasil hutan bergeser dari aset negara menjadi aset privat. Namun sebagai proses *screening* akhir, untuk kayu bulat dari hutan alam, dokumen diterbitkan secara *official assessment* oleh pejabat negara. Proses tersebut di atas berbeda dengan hasil hutan yang berasal dari hutan tanaman. Untuk hasil hutan yang dipanen dari kegiatan investasi dalam bentuk IUPHHK Tanaman atau yang populer disebut dengan HTI, dokumen pengangkutan diterbitkan secara *self assessment*, karena hasil hutannya merupakan aset perusahaan.

2.1.5 Potensi dan Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat

a. Potensi Hasil Hutan Rakyat

Pengertian hutan hak adalah hutan yang dibangun diatas lahan masyarakat yang dapat dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah berupa: Sertifikat hak milik, Leter C, Girik, Sertifikat HGU atau sertifikat Hak pakai. Dewasa ini hutan rakyat sudah sangat berkembang khususnya di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Nilai dari hasil hutan rakyat ini cukup signifikan untuk memberikan jaminan hidup bagi masyarakat. Jenis-jenis yang dikembangkan pada umumnya jenis *fast growing species*, walaupun ada juga yang menanam jenis jati. Khusus untuk jenis cepat tumbuh, misalnya sengon (*Paraserianthes falcataria*), telah cukup memberikan andil terhadap pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan. Selain itu saat ini sudah banyak kegiatan pembangunan industri kecil, misalnya industri *veneer* dari bahan baku kayu sengon di Pulau Jawa yang mendekati sumber bahan baku guna pemenuhan kebutuhan industri di luar Pulau Jawa.

Hal tersebut di atas merupakan kegiatan *out sourcing* dari beberapa industri plywood di Pulau Kalimantan. Dari kegiatan *out sourcing* ini komponen *veneer* sengon memberikan kontribusi yang cukup signifikan sebagai bahan pembentuk plywood, dengan kandungan mencapai 70%. Kegiatan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (atau *Ecolabel*) untuk hutan rakyat juga sudah berjalan di beberapa daerah misalnya di Wonogiri, artinya masyarakat telah memberikan komitmen terhadap kelestarian hutan yang dibangunnya sebagai sumber penghidupan dalam jangka panjang. Hal ini

tidak saja memberikan harapan berkurangnya tekanan terhadap hutan alam negara, tetapi juga dengan teknik pemanenan yang terkendali, akan memperbaiki kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem, sehingga akan berpengaruh positif terhadap aspek lingkungan. Secara umum pembangunan hutan berbasis masyarakat telah dapat memenuhi kriteria kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan sekaligus akan memberikan kontribusi terhadap kelestarian sosial (kesejahteraan masyarakat).

b. Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.21/MENLHK-II/2015

Pada prinsipnya secara umum penatausahaan hasil hutan dari tanah hak adalah sama dengan penatausahaan hasil hutan dari hutan tanaman, yaitu diperlukan sebagai aset privat (milik masyarakat). Namun karena menyangkut kebenaran asal-usul, maka sebagai *screening* bahwa hasil hutan tersebut benar-benar berasal dari lahan milik, dalam hal ini diperlukan keterlibatan kepala desa/lurah atau yang sederajat untuk memberikan legalitas. Dokumen legalitas yang diperlukan untuk melindungi peredaran hasil hutan dari lahan hak adalah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU). Maksud penatausahaan hasil hutan rakyat adalah untuk memberikan kemudahan dalam rangka menghindari biaya tinggi, meningkatkan daya saing serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil hutan yang dapat difasilitasi dengan SKAU adalah hasil hutan hasil budidaya/tanaman rakyat atau pemilik perkebunan dan bukan dari hasil

pemanenan dari hutan alam. SKAU ini merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Dengan semua kemudahan yang diberikan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membangun hutan di tanah miliknya.

Tabel 2.1 Perbedaan Peraturan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 30/Menhut-II/2012	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015
Mengontrol Penatausahaan Hasil Hutan Rakyat dengan menjaga kelestarian hutan sesuai dengan program yang dicanangkan	Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat baik penghasil maupun pengguna hasil hutan rakyat, yang sekaligus dapat membedakan antara hasil hutan milik negara dan hasil hutan milik masyarakat.
Birokrasi panjang	Birokrasi lebih sederhana
Terdapat izin penebangan; di Pulau Jawa, Bali dan Lombok menggunakan nota angkutan; Ada pengangkatan penerbit nota angkutan;	Tidak ada izin penebangan; di Pulau Jawa, Bali dan Lombok menggunakan nota angkutan; Tidak ada pengangkatan penerbit nota angkutan;
Pengadaan dan pengisian blangko oleh pembeli atau pemilik ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak dan wasganis PHPL;	Pengadaan dan pengisian blangko oleh pembeli atau pemilik ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak;
Penggandaan dan pengisian blangko nota angkutan harus dilakukan di dinas dan dilegalisir	Penggandaan dan pengisian blangko nota angkutan dapat digandakan dengan ditulis tangan atau difotocopi;

Penyuluh kehutanan tidak hanya melakukan pendampingan PUHH Hutan Hak namun juga mengecek dan mengawasi proses transaksi;

Bertujuan mengontrol dan melestarikan hutan hak sesuai dengan kebutuhan namun tetap berprinsip pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

tugas Wasganis PHPL sangat sentral

Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara langsung

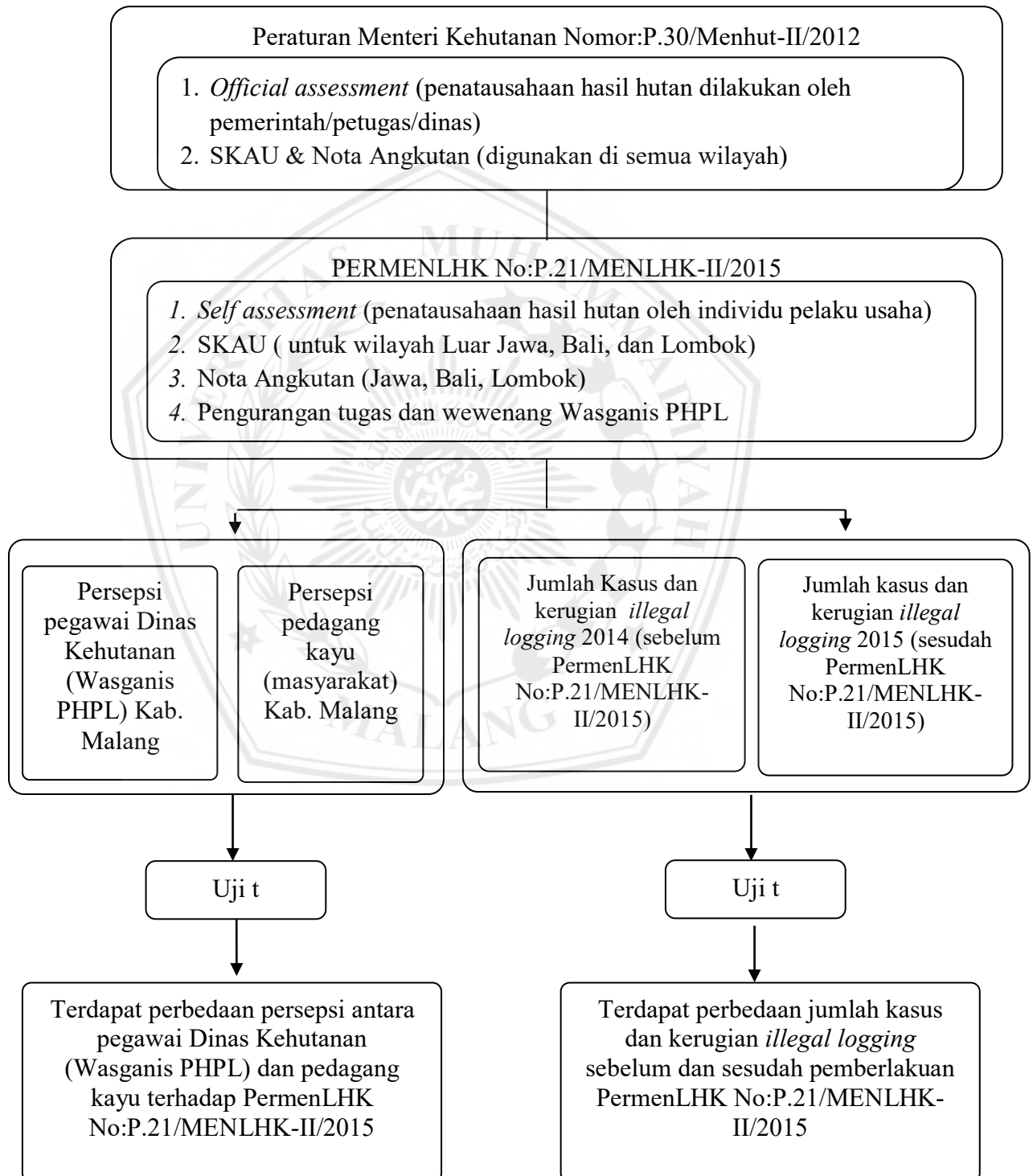
Penyuluh Kehutanan melakukan pendampingan PUHH Hutan Hak dan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau surat keterangan kepala desa/lurah.

Bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi rakyat lebih cepat tercapai, ketersediaan data dan informasi hasil hutan hak/rakyat lebih maksimal.

tugas Wasganis PHPL. Adanya perubahan kebijakan *official assessment* ke *self assessment* dalam PUHH, maka peran Wasganis PHPL sudah tidak ada atau berkurang, Pelaksanaan PUHH dan PNBP dengan pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui post audit.

2.2 Kerangka Pemikiran

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2012 telah direvisi dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2015, yang di dalamnya terdapat perubahan dalam penatausahaan hasil hutan antara lain dijabarkan sebagai berikut :



2.3 Hipotesis

1. Diduga terdapat perbedaan persepsi antara pegawai Dinas Kehutanan dengan pedagang kayu terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang.
2. Diduga terdapat perbedaan jumlah kasus *illegal logging* sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang
3. Diduga terdapat perbedaan jumlah kerugian akibat *illegal logging* sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Subjek Objek dan Tempat Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak yang menyederhanakan proses birokrasi tata cara pengangkutan hasil hutan dengan melihat persepsi Pegawai Dinas Kehutanan serta pedagang kayu di Wilayah Kabupaten Malang sebagai salah satu sentra produksi kayu rakyat di Propinsi Jawa Timur. Subyek dari penelitian ini adalah para pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Malang khususnya Wasganis PHPL dan pedagang kayu rakyat yang merupakan objek yang terkena kebijakan atas berlakunya peraturan. Penelitian dilaksanakan 2 bulan yaitu pada bulan November dan Desember 2015.

Tempat penelitian dilakukan di Wilayah UPTD Bantur dan UPTD Donomulyo. UPTD Bantur meliputi 8 kecamatan yaitu Kecamatan Bantur, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Pakisaji, Kepanjen, Pagelaran, Turen dan Gondanglegi.. Wilayah UPTD Donomulyo meliputi 8 kecamatan yaitu Kecamatan Donomulyo, Pagak, Kalipare, Sumberpucung, Kromengan, Ngajum, Wononsari, dan Wagir. Kedua UPTD ini terletak pada wilayah Kabupaten Malang bagian selatan dan timur, dimana pada wilayah selatan dan timur ini banyak terdapat lahan-lahan marginal yang digunakan oleh

masyarakat untuk pengembangan hutan rakyat. Dipilihnya kedua UPTD tersebut karena memiliki potensi kayu rakyat yang besar dan keragaman jenis kayu yang cukup tinggi sehingga bisa memberikan kemudahan dalam pengambilan data khususnya untuk mengetahui persepsi pedagang kayu dan persepsi pegawai Dinas Kehutanan terkait penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah pedoman dan teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi menghasilkan penelitian. Desain penelitian dimaksud dapat memberikan petunjuk atau arahan yang sistematis kepada peneliti tentang kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Desain penelitian ini bersifat observasi, wawancara, dan dokumentasi. Deskriptif dimaksudkan penelitian disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kuantitatif komparasional untuk mengetahui persepsi pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dan pedagang kayu rakyat terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 di Wilayah Kabupaten Malang. Analisis dilakukan dengan tabel distribusi frekuensi digunakan untuk menghitung besarnya frekuensi data dari masing-

masing kategori data, sedangkan nilai rata-rata (*mean*) digunakan sebagai dasar untuk melakukan uji beda antara persepsi pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dan pedagang kayu terhadap berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015.

3.2.2. Data Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif.

- a. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, visi dan misi, struktur organisasi dan hasil wawancara dengan pedagang maupun Dinas Kehutanan.
- b. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data kuantitatif yang diperlukan adalah hasil angket dari pedagang dan instansi terkait antara lain Dinas Kehutanan dan Perhutani.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dan pengisian kuisioner dari pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dan pedagang kayu rakyat, sedangkan data sekunder berasal dari studi literatur, data dari Pemerintah

Kabupaten Malang, Perum Perhutani KPH Malang, serta instansi terkait di Kabupaten Malang.

Data sekunder yang digunakan antara lain sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1 Data sekunder yang digunakan untuk penelitian

No	Jenis data	Instansi asal data	Ket
1	Data produksi kayu rakyat	Dinas Kehutanan	
2	Data pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Malang	Dinas Kehutanan	
3	Data struktur organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang	Dinas Kehutanan	
4	Data <i>illegal logging</i> bulan Juni – Oktober 2014	Perum Perhutani KPH Malang	
5	Data <i>illegal logging</i> bulan Juni – Oktober 2015	Perum Perhutani KPH Malang	

Data yang dihasilkan dari penelitian ini adalah data atas jawaban pertanyaan indikator untuk mengetahui persepsi pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu rakyat terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 berupa pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada responden dengan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner disusun menggunakan metode *Likert* dimana responden diminta untuk menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap isi pernyataan dalam lima kategori jawaban mulai dari “Sangat Tidak Setuju” (STS), “Tidak Setuju” (TS), Tidak Tahu / Ragu-Ragu” (TT/RR), “Setuju” (S), “Sangat Setuju” (SS).

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisioner, dalam penelitian ini kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup yaitu kuisioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan, format jawaban dari kuisioner disusun dengan menggunakan Skala Likert. Dengan menggunakan Skala Likert, ada lima alternative jawaban yang diberikan skor, yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Kategori Skor Jawaban Responden

No.	Klasifikasi Jawaban	Item
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Tidak Ada Pendapat	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : *Sugiyono (2005)*

2. Wawancara, digunakan untuk mengetahui alasan mengambil posisi persepsi pedagang dan Dinas Kehutanan.
3. Studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data kasus *illegal logging* Juni-Oktober 2014 dan Juni-Oktober 2015.

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2005:90), mengatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini populasi penelitian adalah pegawai Dinas Kehutanan khususnya Wasganis PHPL dan pedagang kayu rakyat di Wilayah UPTD Bantur dan UPTD Donomulyo. Selain data persepsi, peneliti juga mengambil data kasus *illegal logging*, yaitu Kasus *illegal logging* sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 pada periode Juni-Okttober 2014 dan Juni-Okttober 2015.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2005: 91), sampel n adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi maka dilakukan pengambilan sampel.

Penarikan sampel terhadap responden pedagang kayu rakyat dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pegawai Dinas Kehutanan yang dijadikan sampel penelitian utamanya adalah Wasganis PHPL yang

menangani surat SKAU pada periode sebelumnya, sedangkan pedagang kayu rakyat yang dijadikan sampel adalah pedagang yang memperjualbelikan kayu dengan berbagai jenis. Hal ini dilakukan karena dalam penelitian ini dilakukan uji beda pada persepsi pedagang kayu rakyat dan pegawai Dinas Kehutanan dengan menggunakan independent sampel t-test.

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 60 terdiri dari pegawai Dinas Kehutanan 30 responden dan pedagang kayu sebanyak 30 responden yang tersebar dalam wilayah UPTD Bantur dan UPTD Donomulyo. Dasar penentuan besarnya sampel, Arikunto (2002) mengemukakan bahwa dalam pengambilan sampel apabila subyeknya kurang dari 100 diambil semua sehingga merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Menurut Roscoe dalam buku *Research Methods For Business* (Sugiyono, 2011) menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 orang. Karena jumlah pegawai Dinas Kehutanan hanya sekitar 30 orang maka untuk menyeimbangkan data penelitian, peneliti mengambil 30 orang pedagang kayu sebagai sampel penelitian sehingga total sampel penelitian sebanyak 60 orang.

3.2.4. Rancangan Uji Hipotesis

3.2.4.1. Pengujian Instrumen Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Validitas atau tingkat ketepatan, kejituan atau keakuratan adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Mas'ud,2004:68). Definisi lain validitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu instrumen (Usman dan Akbar, 2006:287). Dengan kata lain, instrumen tersebut dapat mengukur variabel yang diinginkan oleh peneliti.

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

Alat untuk mengukur validitas adalah Korelasi *Product Moment* dari Pearson. Suatu indikator dikatakan valid, apabila $n = 30$ dan $\alpha = 0,05$, maka $r \text{ tabel} = 0,381$ dengan ketentuan (Nurgiyantoro, dkk,2004:339) :

Hasil $r \text{ hitung} > r \text{ tabel} (0,381) = \text{valid}$

Hasil $r \text{ hitung} < r \text{ tabel} (0,381) = \text{tidak valid}$

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas atau tingkat keandalan, ketepatan atau keajegan adalah tingkat kemampuan instrumen untuk mengumpulkan data secara konsisten dari sekelompok individu (Mas'ud,2004:69). Definisi lain validitas adalah

alat yang digunakan untuk mengukur instrumen terhadap ketepatan/konsisten (Usman dan Akbar,2006:287). Reliabilitas disebut juga keterandalan, keajegan, konsistensi atau stabilitas.

Instrumen yang mempunyai tingkat realibilitas tinggi cenderung menghasilkan data yang sama tentang suatu variabel atau unsur-unsurnya, jika diulangi pada waktu yang berbeda pada sekelompok individu yang sama, sehingga instrumen tersebut dapat dinilai reliabel (dapat diandalkan) (Mas,ud, 2004:69). Setiap alat ukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Pada alat ukur untuk fenomena fisik (berat dan tinggi badan), konsistensi hasil pengukuran mudah dicapai, namun untuk mengukur fenomena sosial (sikap, persepsi dan opini), pengukuran yang konsisten sulit untuk dicapai (Mas,ud, 2004:69).

Alat untuk mengukur reliabilitas adalah Alpha Cronbach. Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila (Nurgiyantoro,2004: 352) :

Hasil $\alpha > 0,60$ = reliabel

Hasil $\alpha < 0,60$ = tidak reliabel

Analisis data merupakan “kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul” (Sugiyono, 2006: 207). Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dan teknik analisis korelasional dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

c. Uji Hipotesis

Data yang digunakan dari kuisioner berupa data ordinal. Untuk bisa diolah menggunakan analisis statistik parametrik, maka data tersebut harus dikonversi menjadi data interval. Selanjutnya dilakukan uji beda persepsi pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu (*independent sample t-test*). Setelah ditabulasikan ke dalam distribusi frekuensi terhadap masing-masing persepsi antara pegawai dan pedagang kayu, maka langkah selanjutnya adalah menentukan apakah terdapat perbedaan persepsi dari kedua belah pihak terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015.

Selain menguji perbedaan persepsi peneliti juga menguji perbedaan kasus perbedaan jumlah kasus *illegal logging* sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015. Berikut adalah langkah-langkah uji beda rata-rata dua sampel independen (*independent sample t-test*) :

a. Hipotesis Perbedaan Persepsi

H₀ : tidak terdapat perbedaan persepsi antara pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang

H₁: terdapat perbedaan persepsi antara pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu terhadap penerapan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang

b. Hipotesis Perbedaan Jumlah Kasus *Illegal Logging*

H0 : tidak terdapat perbedaan kasus *illegal logging* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang

H1: terdapat perbedaan kasus *illegal logging* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang

c. Hipotesis Perbedaan Jumlah kerugian akibat *Illegal Logging*

H0 : tidak terdapat perbedaan jumlah kerugian akibat *illegal logging* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang

H1: terdapat perbedaan jumlah kerugian *illegal logging* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang

d. Menentukan taraf signifikansi

Uji hipotesis menggunakan uji dua pihak (*two tail test*) dengan taraf signifikansi = 5%. Dalam hal ini bila peluang kesalahan = 5% maka

taraf kepercayaannya 95%. Artinya kesalahan pengambilan keputusan dalam menolak hipotesis yang benar adalah maksimal 5%.

e. Menghitung nilai t hitung

T hitung dapat diketahui dengan membandingkan rata-rata persepsi antara pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu serta jumlah kasus dan jumlah kerugian akibat *illegal logging* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang. Perhitungan dilakukan dengan SPSS 17.

f. Menentukan nilai t tabel

Untuk mengetahui nilai t tabel digunakan tabel distribusi t dengan $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (*two tail*) dengan derajat kebebasan (dk) = $n_1 + n_2 - 2$.

g. Pengambilan keputusan

Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel :

- Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka H_0 ditolak, jadi terdapat perbedaan persepsi antara pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu serta jumlah kasus dan jumlah kerugian akibat *illegal logging* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang
- Jika nilai t hitung lebih kecil dari tabel maka H_0 diterima, jadi tidak terdapat perbedaan persepsi antara pegawai Dinas

Kehutanan dan pedagang kayu serta jumlah kasus dan jumlah kerugian akibat *illegal logging* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang.

Dengan melihat nilai probabilitas signifikansi :

- Probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima, jadi tidak terdapat perbedaan persepsi antara pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu serta jumlah kasus *illegal logging* dan jumlah kerugian akibat *illegal logging* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang.
- Probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak, jadi terdapat perbedaan persepsi antara pegawai Dinas Kehutanan dan pedagang kayu serta jumlah kasus dan jumlah kerugian akibat *illegal logging* sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang

3.2.4.2.Operasional Variabel

Tabel 3.3 Operasional Variabel

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator
1	Persepsi petugas terhadap Peraturan	Penerimaan /penyerapan	Menerima pengesahan P.21/MenLHK-II/2015 tanpa adanya keluhan
			Siap menjalankan P.21/MENLHK-II/2015 yang telah disahkan
			Mampu menyerap maksud pengesahan P.21/ MENLHK-II/2015 dengan baik
		Pengertian dan pemahaman	Mampu memahami tujuan dari P.21/MENLHK-II/2015
			Mampu memahami isi pasal P.21/MENLHK-II/2015
			Mampu memahami tugas dan wewenang Dinas Kehutanan khususnya bagian Wasganis PHPL yang terdapat di P.21/MENLHK-II/2015
		Penilaian atau evaluasi	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 akan membawa perubahan yang baik terhadap sistem birokrasi yang ada
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah Dinas Kehutanan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap hasil hutan hak
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 memperjelas tugas Dinas Kehutanan
			Isi dari SKAU & Nota Angkutan P.21/MENLHK-II/2015 mudah diimplementasikan
2	Persepsi pedagang terhadap Peraturan	Penerimaan /penyerapan	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 mampu mengurangi kasus <i>illegal logging</i>
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membawa dampak positif bagi penatausahaan hasil hutan hak
			Menerima pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 tanpa adanya keluhan
			Siap mengikuti aturan dari P.21/MENLHK-II/2015 yang telah disahkan
			Mampu menyerap maksud pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 dengan baik

		Pengertian dan pemahaman	Mampu memahami tujuan dari P.21/MENLHK-II/2015
			Mampu memahami isi pasal P.21/MENLHK-II/2015
		Penilaian atau evaluasi	Mampu memahami hak dan kewajiban pedagang terdapat di P.21/MENLHK-II/2015
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membuat sistem birokrasi lebih efisien
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan bagi petani dan pedagang
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah pedagang dalam pemanenan atau pennebangan
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah pedagang dalam pengangkutan/peredaran dan pengumpulan hasil hutan hak
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 memperingan pengurusan surat-surat
			Isi dari SKAU & Nota Angkutan P.21/MENLHK-II/2015 menguntungkan pedagang
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 mampu mengurangi kasus <i>illegal logging</i>
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membawa dampak positif bagi penatausahaan hasil hutan hak
3	Dampak <i>illegal logging</i>	Dampak positif	Terdapat perbedaan kasus <i>illegal logging</i> yaitu semakin berkurang setelah adanya penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang
		Dampak negatif	Terdapat perbedaan kasus <i>illegal logging</i> yaitu semakin bertambah setelah adanya penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Malang

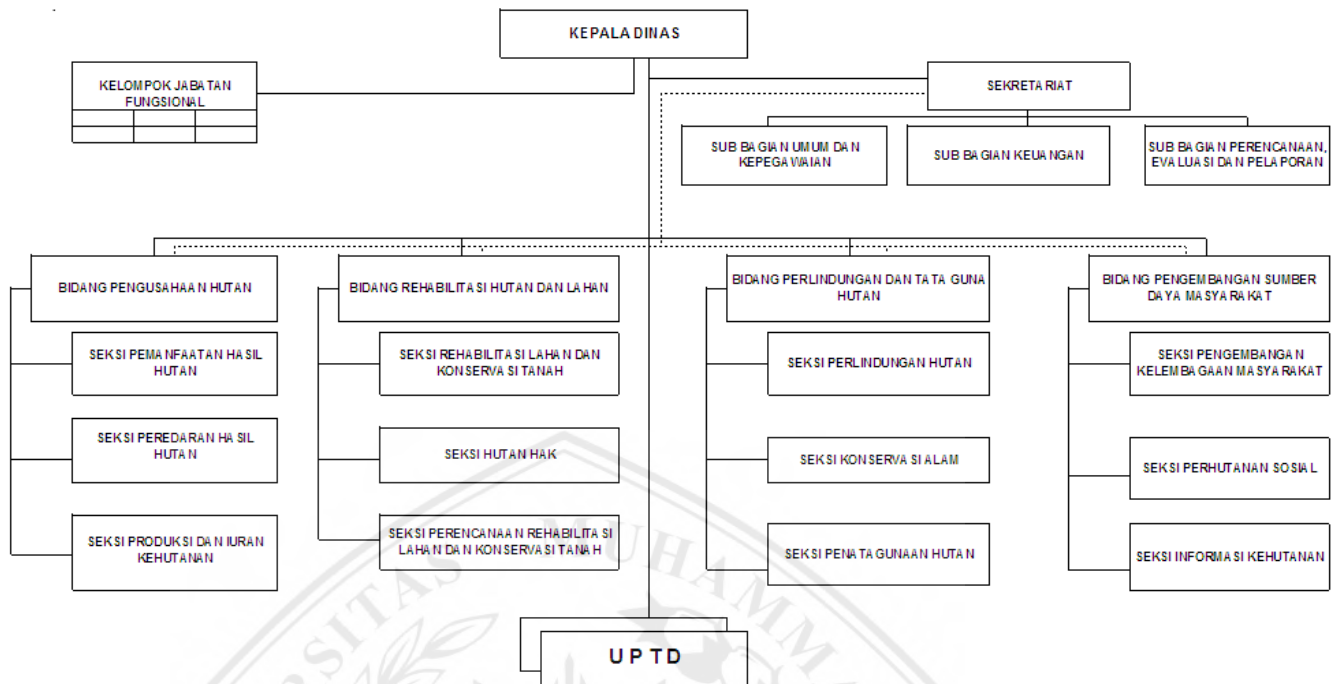
4.1.1. Sejarah Dinas Kehutanan Kabupaten Malang

Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati
- 5) pelaksanaan pendampingan sertifikasi hutan hak dan industri primer hasil hutan kayu di wilayah kerjanya.
- 6) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah kerjanya.
- 7) pelaksanaan pendayagunaan penyuluh kehutanan.
- 8) pelaksanaan dan pembinaan program perhutanan sosial

4.1.2. Struktur Organisasi



(Gambar 4.1 Struktur Organisasi)

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kehutanan Kabupaten Malang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat
- 3) Bidang Pengusahaan Hutan
- 4) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 5) Bidang Perlindungan dan Tata Guna Hutan
- 6) Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

Adapun gambaran secara umum masing-masing fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- (a) Memimpin Dinas Kehutanan dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perizinan, pengendalian teknis pembangunan kehutanan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan kehutanan;
- (b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris mempunyai tugas:

- (a) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- (b) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- (c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- (d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- (e) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan kearsipan;
- (f) Pengelolaan administrasi, perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;

- (g) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- (a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- (b) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- (c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang peralatan serta mendistribusikan;
- (d) Melaksanakan tata usaha barang perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- (e) Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- (f) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- (g) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- (h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- (a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan;
- (b) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

- (c) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- (d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Kehutanan;
- (e) Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja sub bagian keuangan;
- (f) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- (g) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategi Dinas Kehutanan;
- (h) Mengkompilasikan dan menyusun hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Kehutanan;
- (i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- (a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- (b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan bidang kehutanan ;
- (c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Kehutanan;

- (d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerjasama lintas sektor;
- (e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Kehutanan;
- (f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan bidang kehutanan;
- (g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Kehutanan;
- (h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan di bidang kehutanan;
- (i) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di bidang kehutanan;
- (j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- (k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

6) Bidang Pengusahaan Hutan mempunyai tugas :

- (a) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dalam pengawasan, monitoring, evaluasi dan pembinaan dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, pengawasan dan pembinaan industri primer hasil hutan dan pelaksanaan pemungutan

Penerimaan Negara Bukan pajak (PNPB) dan retribusi bidang kehutanan;

- (b) Melaksanakan tugas penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dan/ tanah milik;
- (c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas :

- (a) Menghimpun dan mengolah data serta menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan;
- (b) Melaksanakan program dan kegiatan seksi Pemanfaatan Hasil Hutan;
- (c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana kerja pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan;
- (d) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan;
- (e) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemanfaatan hasil hutan dan hutan hak;
- (f) Melaksanakan pendampingan dan pembinaan pengelolaan hutan dalam rangka sertifikasi pengelolaan hutan lestari pada kawasan hutan dan hutan hak;
- (g) Menyediakan informasi dalam pengelolaan hasil hutan;
- (h) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan seksi pemanfaatan hasil hutan;

- (i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengusahaan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

8) Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas :

- (a) Menghimpun dan mengolah data serta menyusun rencana dan program kerja seksi peredaran hasil hutan;
- (b) Melaksakan program dan kegiatan Seksi Peredaran Hasil Hutan;
- (c) Melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan tenaga pengawas tenaga teknis PKB-PHPL/PKPJ-PHPL;
- (d) Melaksanakan pelayanan penatausahaan hasil hutan;
- (e) Melaksanakan pemantauan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan hak dan/atau tanah milik di wilayahnya;
- (f) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan produksi;
- (g) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan hasil hutan pada industri pengolahan hasil hutan;
- (h) Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap persediaan hasil hutan di industri pengolahan hasil hutan;
- (i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap peredaran dan persediaan hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan produksi;
- (j) Menyenggarakan dan menyediakan informasi peredaran hasil hutan;
- (k) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Peredaran Hasil Hutan;

- (l) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengusahaan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

9) Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan mempunyai tugas :

- (a) Menghimpun dan mengolah data serta menyusun rencana dan program kerja Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan;
- (b) Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Produksi dan Iuran Kehutanan;
- (c) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perizinan usaha industri primer pengolahan hasil hutan;
- (d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap rencana pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan;
- (e) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknik dan metode pengolahan hasil hutan dalam rangka efisiensi bahan baku dan peningkatan daya guna hasil hutan;
- (f) Merumuskan dan menyusun peraturan sebagai sumber pendapatan baru bagi daerah;
- (g) Melaksanakan perhitungan dan penetapan kewajiban provisi sumber daya hutan atas hasil hutan yang diproduksi dari kawasan hutan produksi;
- (h) Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan realisasi pembayaran provisi sumberdaya hutan oleh Perum Perhutani;
- (i) Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang kehutanan;
- (j) Melaksanakan pelelangan terhadap kayu hasil temuan;

- (k) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Produksi dan Iuran Hutan;
- (l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengusahaan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

10) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas :

- (a) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan di bidang penyelenggaraan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) rehabilitasi lahan, konservasi tanah, pengendalian erosi dan sedimentasi, pengembangan hutan hak, mangrove dan hutan kota, perbenihan tanaman kehutanan dan penyusunan perencanaan dan rancangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
- (b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pengusahaan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

11) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas:

- (a) Menghimpun dan mengolah data serta menyusun rencana dan program kerja Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
- (b) Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
- (c) Melaksanakan pengendalian erosi dan sedimen rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah di luar kawasan hutan;

- (d) Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan daya guna lahan serta pencegahan degradasi lahan melalui kegiatan vegetatif dan pembuatan bangunan sipil teknis ;
- (e) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan reboisasi pada area bekas pertambangan dan galian;
- (f) Melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;
- (g) Melaksanakan perbenihan dan persemaian tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan;
- (h) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan reboisasi dan pemeliharaan tanaman dalam kawasan hutan;
- (i) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
- (j) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai dengan bidang tugasnya.

12) Seksi Hutan Hak mempunyai tugas:

- (a) Menghimpun dan mengolah data serta menyusun rencana dan program kerja Seksi Hutan Hak;
- (b) Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Hutan Hak;
- (c) Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi sumberdaya hutan dan lahan pada hutan hak;
- (d) Mengembangkan jenis-jenis tanaman bernilai ekonomi tinggi dalam rangka pengembangan hutan hak;

- (e) Membina dan mengembangkan potensi dan informasi pasar produk hutan hak;
- (f) Melaksanakan bina usaha, kemitraan dan jejaring kerja dalam rangka pengembangan hutan hak;
- (g) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Sekis Hutan Hak;
- (h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai dengan bidang tugasnya.

13) Seksi Perencanaan Rehabilitasi Lahan dan konservasi Tanah mempunyai tugas:

- (a) Menghimpun dan mengolah data serta menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan Rehabilitasi Lahan dan konservasi Tanah;
- (b) Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Perencanaan Rehabilitasi Lahan dan konservasi tanah;
- (c) Menyusun rencana pengelolaan rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang mengacu pada sistem pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- (d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
- (e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kondisi biofisik dan sosial ekonomi wilayah DAS;
- (f) Menyusun data dasar rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;

- (g) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah;
- (h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai dengan bidang tugasnya

14) Bidang Perlindungan dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas:

- (a) Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan di bidang Pembinaan dan pengawasan perlindungan, konservasi dan tata guna hutan;
- (b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

15) Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas:

- (a) Mengimpun dan mengolah data serta menyusun rencana dan program kerja Seksi Perlindungan Hutan;
- (b) Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Hutan;
- (c) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan hutan;
- (d) Melaksanakan penilaian terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan rencana usaha pada kawasan hutan lindung;
- (e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan kawasan pada hutan lindung;
- (f) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Hutan;

- (g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan dan Tata Guna Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

16) Seksi Konservasi Alam mempunyai tugas:

- (a) Menghimpun dan mengolah data serta menyusun rencana dan program kerja Seksi Konservasi Alam;
- (b) Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Konservasi Alam;
- (c) Melaksanakan penilaian terhadap penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman bumi;
- (d) Melaksanakan bimbingan dan pengembangan bina cinta alam dan kader konservasi;
- (e) Melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi kawasan lindung pada daerah sempadan sungai, pantai, waduk, daerah sekitar sumber air dan daerah perlindungan lainnya;
- (f) Melaksanakan pelayanan perizinan usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;
- (g) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Konservasi Alam;
- (h) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan dan Tata Guna Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

17) Seksi Penatagunaan Hutan mempunyai tugas:

- (a) Menghimpun dan mengolah data serta menyusun rencana dan program kerja Seksi Penatagunaan Hutan;
- (b) Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Penatagunaan Hutan;
- (c) Melaksanakan inventarisasi hutan;
- (d) Menyiapkan bahan dan data pengusulan penunjukan kawasan hutan, pengelolaan dengan tujuan khusus perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status lahan milik menjadi kawasan hutan, perubahan status lahan milik menjadi kawasan hutan dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;
- (e) Menyiapkan bahan pertimbangan pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
- (f) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan batas luar kawasan hutan;
- (g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perlindungan dan Tata Guna Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

18) Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat mempunyai tugas:

- (a) Melakukan sebagian tugas Dinas Kehutanan dibidang pengembangan perhutanan sesuai penguatan kelembagaan masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan kehutanan;
- (b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

19) Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas:

- (a) Menghimpun dan mengolah data serta menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat;
- (b) Melaksanakan program dan kegiatan seksi Perhutanan Sosial;
- (c) Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi lembaga masyarakat;
- (d) Melaksanakan pembinaan kelembagaan terhadap masyarakat sekitar hutan dan hutan rakyat;

20) Seksi Perhutanan Sosial mempunyai tugas:

- (a) Menghimpun dan mengolah data serta menyusun rencana dan program kerja Seksi Perhutanan Sosial;
- (b) Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Perhutanan Sosial;
- (c) Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi perhutanan sosial;
- (d) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengembangan agroforestry, silvopasture dan silvofishery;
- (e) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengembangan Aneka Usaha Kehutanan (AUK) berupa pengembangan hutan cadangan pangan, hasil hutan bukan kayu seperti rotan, getah, minyak alami, kulit kayu, buah, bambu, persuteraan alam, perlebahan dan walet;
- (f) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi dan informasi pasar produk-produk kegiatan perhutanan sosial;

- (g) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perhutanan Sosial;
- (h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

21) Seksi Informasi Kehutanan mempunyai tugas:

- (a) Menghimpun dan mengolah data serta menyusun rencana dan program kerja Seksi Informasi Kehutanan;
- (b) Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Informasi Kehutanan;
- (c) Menghimpun dan menyusun data dasar kehutanan;
- (d) Menyebarluaskan informasi-informasi kehutanan;
- (e) Melaksanakan pembinaan dan pelayanan informasi tentang kehutanan;
- (f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan informasi kehutanan;
- (g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

22) UPTD Kehutanan mempunyai tugas:

UPTD Kehutanan dibentuk dengan peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan daerah serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

23) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- (a) Melaksanakan sebagian Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (b) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan tugas dimaksud, mempunyai fungsi :

- (a) Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan.
- (b) Pemeriksaan dokumen penataan hasil hutan dan fisik hasil hutan di industri pengolahan hasil hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan gudang penampungan.
- (c) Pelaksanaan pelayanan penatausahaan hasil hutan, industri pengolahan hasil hutan, tempat penimbunan kayu, pelabuhan dan gudang penampungan.
- (d) Penerbitan dokumen angkutan hasil hutan.
- (e) Pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan industri kepada industri pengolahan kayu dan masyarakat.
- (f) Pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana kejahatan peredaran hasil hutan, berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (g) Pelaksanaan ketatausahaan.
- (h) Pelaksanaan pelayanan masyarakat.
- (i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

**24) Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan,
mempunyai tugas :**

Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di bidang perbenihan tanaman hutan, serta tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud,

Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber benih tanaman hutan serta identifikasi dan inventarisasi sumber benih tanaman hutan.
- (b) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengada dan/atau penangkar serta pengedar benih dan/atau bibit tanaman hutan serta pembangunan sumber benih.
- (c) Pembinaan sertifikasi dan/atau bibit tanaman hutan.
- (d) Pembinaan produksi dan pemasaran benih dan/atau bibit tanaman hutan.
- (e) Penetapan standar produksi benih dan/atau bibit tanaman hutan.
- (f) Pembinaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman hutan.
- (g) Peningkatan kualitas perbenihan tanaman hutan.
- (h) Pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan.

4.1.4. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Malang

(1)Visi

"Terwujudnya pelestarian fungsi hutan dan pemantapan kawasan hutan serta Daerah Aliran Sungai (DAS) secara optimal, untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang".

(2)Misi

- (a) Mewujudkan pemantapan status dan fungsi kawasan hutan serta perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan.
- (b) Mewujudkan pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan.
- (c) Mewujudkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pelaksanaan perhutanan sosial melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.
- (d) Mewujudkan inventarisasi, pengolahan data dan litbang bidang kehutanan serta jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholder dalam pembangunan kehutanan.

(3)Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kehutanan adalah :

- (a) Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan.
- (b) Meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan.
- (c) Meningkatkan pelayanan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan peredaran hasil hutan.

- (d) Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pelaksanaan perhutanan sosial melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan.
- (e) Meningkatnya database kehutanan melalui inventarisasi kehutanan dan perluasan jejaring kerjasama dengan seluruh stakeholder.

(4) Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- (a) Terwujudnya pemeliharaan batas kawasan hutan.
- (b) Meningkatnya keamanan hutan dan tertib peredaran hasil hutan.
- (c) Meningkatnya tertib pelaporan produksi hasil hutan.
- (d) Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
- (e) Tersusunnya data dan informasi sumberdaya hutan.

4.2. Gambaran Umum Responden

Penelitian ini menggunakan dua responden yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dan Pedagang Kayu Kabupaten Malang . Gambaran umum responden menurut karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia dan lama usaha. Berdasarkan karakteristik tersebut diperoleh gambaran yang lebih detail mengenai responden dalam penelitian. Berikut sajian responden berdasarkan keempat karakteristik tersebut:

4.2.1. Responden Dinas Kehutanan Kabupaten Malang

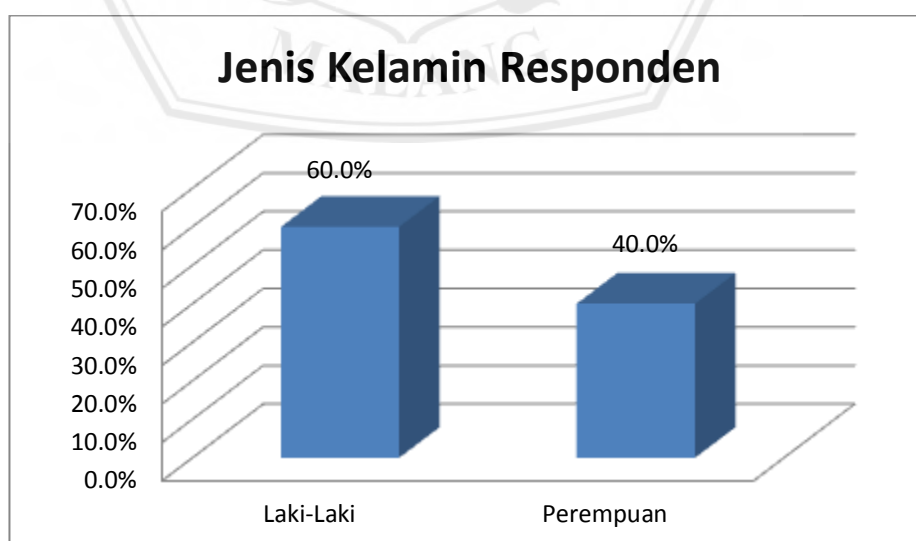
4.2.1.1. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Malang yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin pada sampel penelitian pada Dinas Kehutanan Kabupaten Malang yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	18	60,0%
2	Perempuan	12	40,0%
Jumlah		30	100,0%

Berdasarkan hasil perhitungan responden terdapat 18 orang pegawai Dinas Kehutanan laki-laki dengan presentase 60,0% dan hanya 12 orang dengan persentase 40,0% merupakan responden perempuan. Berdasarkan data tersebut profesi pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Malang didominasi oleh pegawai laki-laki. Adapun perbandingan responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada bagan berikut:



Grafik 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

4.2.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

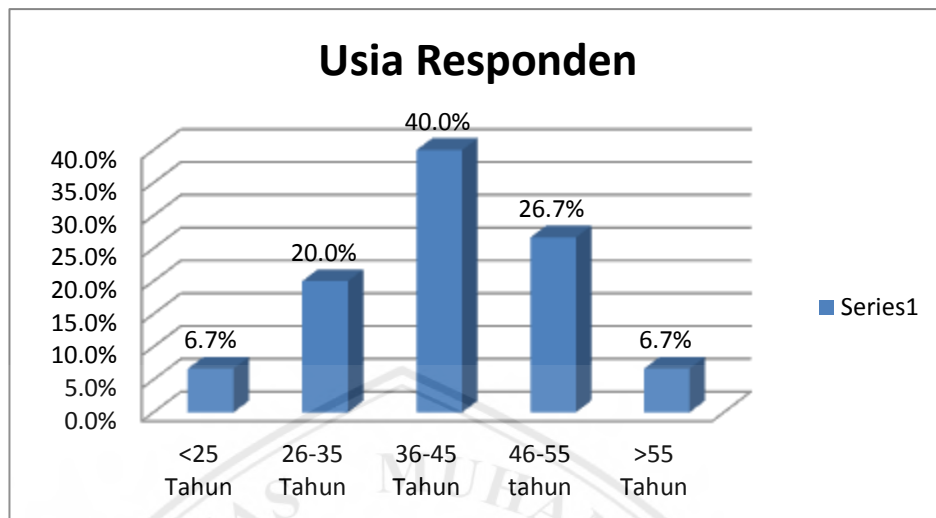
Pegawai Dinas Kehutanan di Kabupaten Malang yang menjadi responden dibagi menjadi lima kategori usia yaitu <25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, >55 tahun. Adapun persebaran responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	<25 Tahun	2	6,7%
2	26-35 Tahun	6	20,0%
3	36-45 Tahun	12	40,0%
4	46-55 tahun	8	26,7%
5	>55 Tahun	2	6,7%
Jumlah		30	100,0%

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa responden atau pegawai Dinas Kehutanan memiliki usia <25 tahun berjumlah sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 6,7%, usia 26-35 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 20,0%, usia antara 36-45 tahun dengan jumlah sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 40,0%, usia 46-55 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 26,7%, dan >55 tahun sebanyak 2 orang atau 6,7%. Berdasarkan kategori tersebut responden atau pegawai Dinas Kehutanan sebagian besar memiliki rentangan usia di atas 36 tahun yakni hampir 40% dari total responden dimana usia 36-45 tahun merupakan kategori usia paling banyak. Hal tersebut disadari karena pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Malang sebagian besar adalah pegawai berpengalaman dengan usia matang.

Adapun perbandingan responden berdasarkan usia dapat di lihat pada bagan berikut:



Grafik 4.2. Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

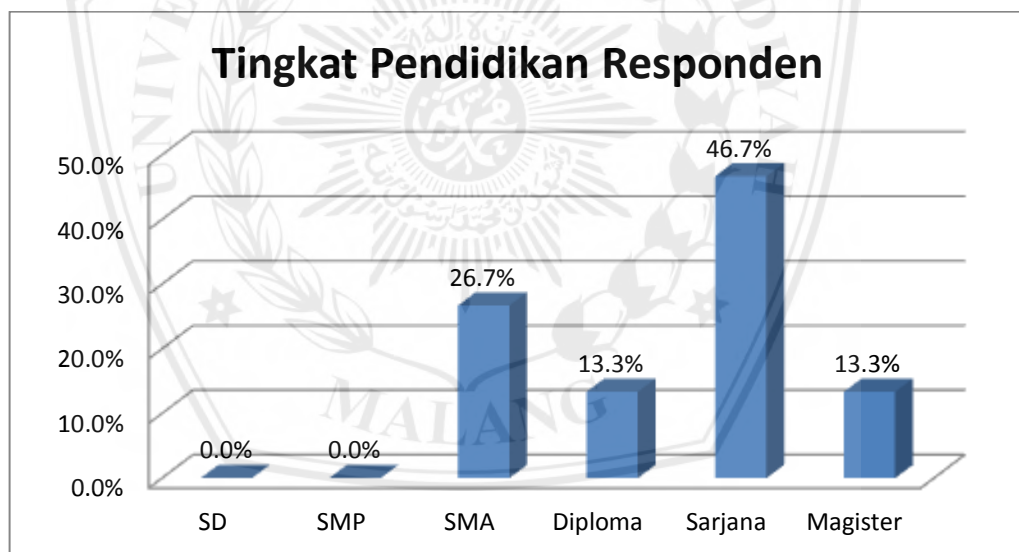
4.2.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan gambaran seberapa tinggi pendidikan yang ditempuh oleh pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Malang di Kabupaten Malang. Adapun persebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	0	0,0%
2.	SMP	0	0,0%
3.	SMA	8	26,7%
4.	Diploma	4	13,3%
5.	Sarjana	14	46,7%
6.	Magister	4	13,3%
Jumlah		30	100,0%

Berdasarkan 4.3 tabel diatas didapatkan hasil bahwa sebanyak 0 orang responden atau 0,0% merupakan pegawai Dinas Kehutanan dengan tingkat pendidikan SD maupun SMP, 8 orang responden atau 26,7% berpendidikan SMA, 4 orang responden atau 13,3% merupakan pegawai Dinas Kehutanan dengan tingkat pendidikan Diploma. 14 orang responden atau 46,7% berpendidikan Sarjana, dan 4 orang responden atau 13,3% merupakan petani dengan tingkat pendidikan magister. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden berasal dari lulusan sarjana. Adapun perbandingan responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada bagan berikut:



Grafik 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

4.2.1.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

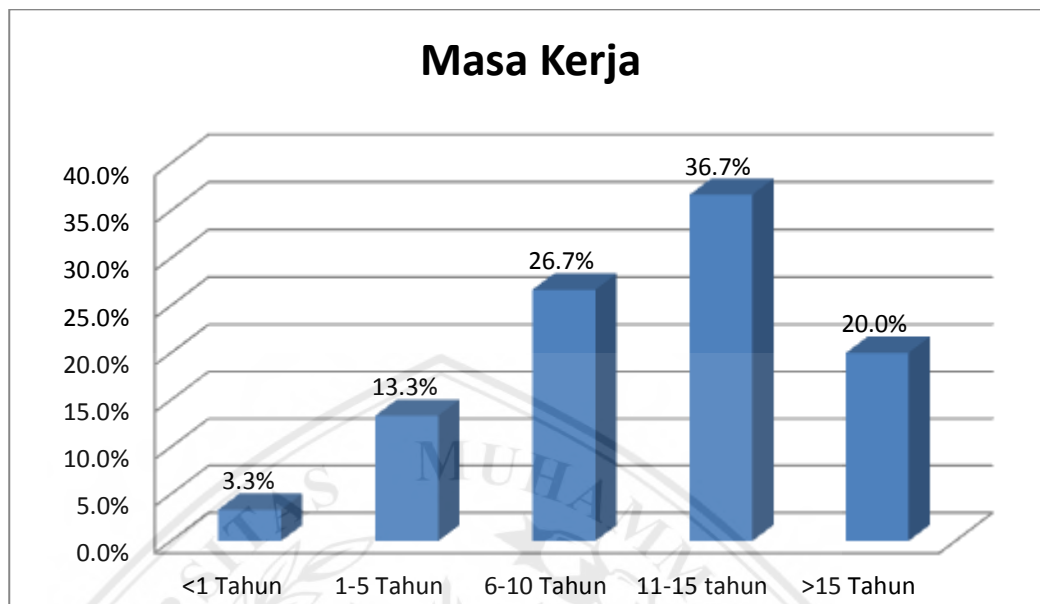
Masa kerja dalam profesi sebagai pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Malang merupakan gambaran seberapa masa kerja yang dijalankan dan ditempuh pegawai Dinas Kehutanan di Kabupaten Malang. Adapun karakteristik masa kerja pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	<1 Tahun	1	3,3%
2	1-5 Tahun	4	13,3%
3	6-10 Tahun	8	26,7%
4	11-15 Tahun	11	36,7%
5	>15 Tahun	6	20,0%
Jumlah		30	100,0%

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil bahwa terdapat 1 responden atau 3,3% dalam menempuh masa kerja sebagai pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Malang kurang lebih dari satu tahun, 4 orang responden atau 13,3% menempuh masa kerja sebagai pegawai Dinas Kehutanan kisaran antara 1-5 tahun, sebanyak 8 orang responden atau 26,7% memiliki kisaran masa kerja antara 6-10 tahun, 11 orang responden atau 36,7% memiliki masa kerja sekitar 11-15 tahun, sedangkan sejumlah 6 responden atau 20,0% memiliki masa kerja kurang lebih 15 tahun. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menempuh masa kerja sebagai pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Malang kisaran antara 11-15 tahun atau 36,7%

yakni berjumlah 11 responden. Adapun perbandingan responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada bagan berikut:



Grafik 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

4.2.2. Gambaran Umum Responden Pedagang Kayu Kabupaten Malang

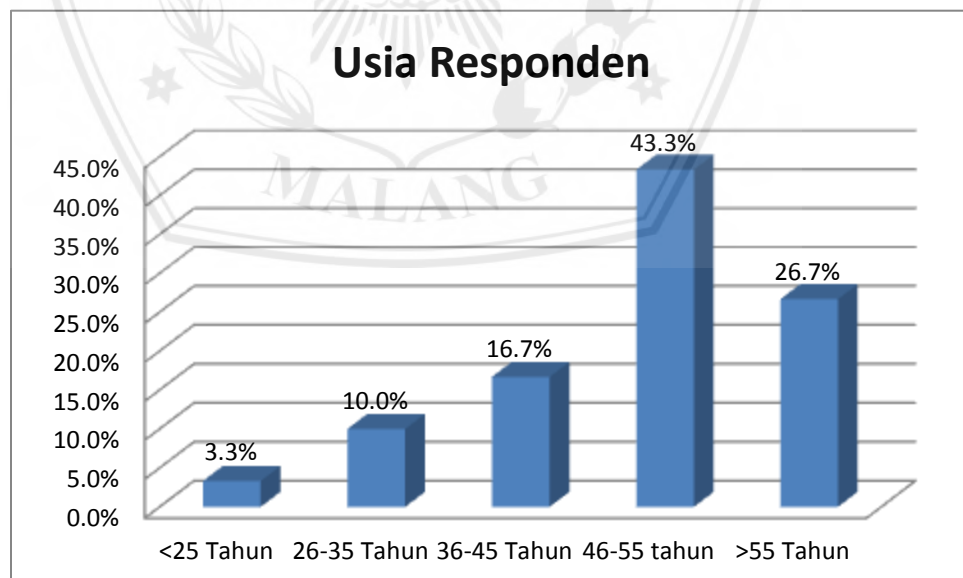
4.2.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Pedagang kayu pada rakyat di Kabupaten Malang yang menjadi responden dibagi menjadi lima kategori usia yaitu <30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, 51-60 tahun, > 60 tahun. Adapun persebaran responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	<25 Tahun	1	3,3%
2	26-35 Tahun	3	10,0%
3	36-45 Tahun	5	16,7%
4	46-55 tahun	13	43,3%
5	>55 Tahun	8	26,7%
Jumlah		30	100,0%

Berdasarkan tabel 4.5 diatas diketahui bahwa responden atau pedagang kayu rakyat Kabupaten Malang memiliki usia < 25 tahun berjumlah sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 3,3%, usia 26-35 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 10,0%, usia antara 36-45 tahun dengan jumlah sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 16,7%, usia 46-55 tahun sebanyak 13 orang dengan persentase sebesar 43,3%, dan > 55 tahun sebanyak 8 orang atau 26,7%. Berdasarkan kategori tersebut responden sebagian besar memiliki rentangan usia di atas 46 tahun yakni hampir 43,3% dari total responden dimana usia 46-55 tahun merupakan kategori usia paling banyak. Hal tersebut disadari karena pedagang kayu rakyat sebagian besar adalah pedagang berpengalaman dengan usia matang. Adapun perbandingan responden berdasarkan usia dapat di lihat pada bagan berikut:



Grafik 4.5 Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

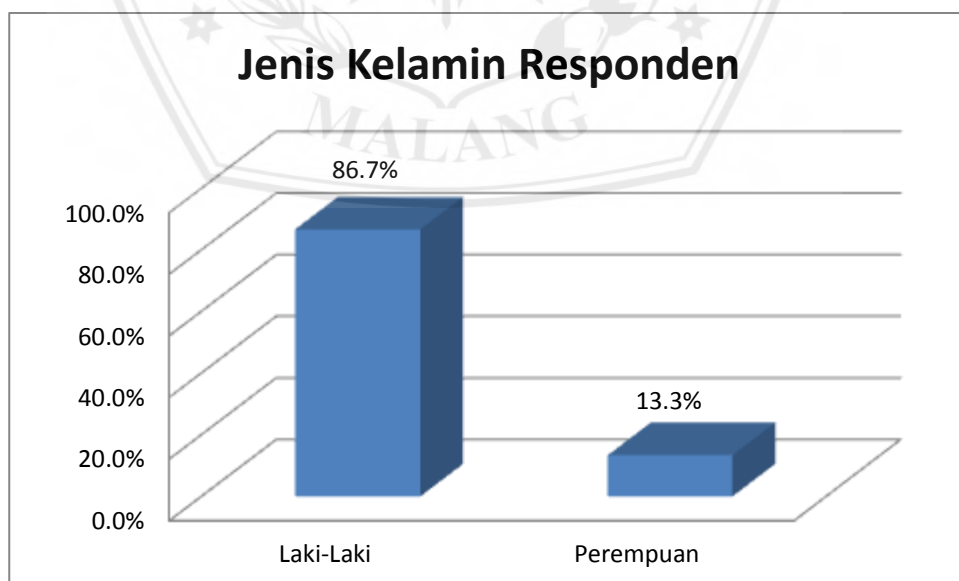
4.2.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pedagang kayu rakyat Kabupaten Malang sebagian besar adalah laki-laki. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin pada sampel penelitian pada petani yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	26	86,7%
2	Perempuan	4	13,3%
Jumlah		30	100,0%

Berdasarkan hasil perhitungan responden terdapat 26 orang pedagang kayu laki-laki dengan presentase 86,7% dan hanya 4 orang dengan persentase 13,3% merupakan responden perempuan. Berdasarkan data tersebut profesi pedagang kayu rakyat Kabupaten Malang didominasi oleh pedagang laki-laki. Adapun perbandingan responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada bagan berikut:



Gambar 4.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

4.2.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

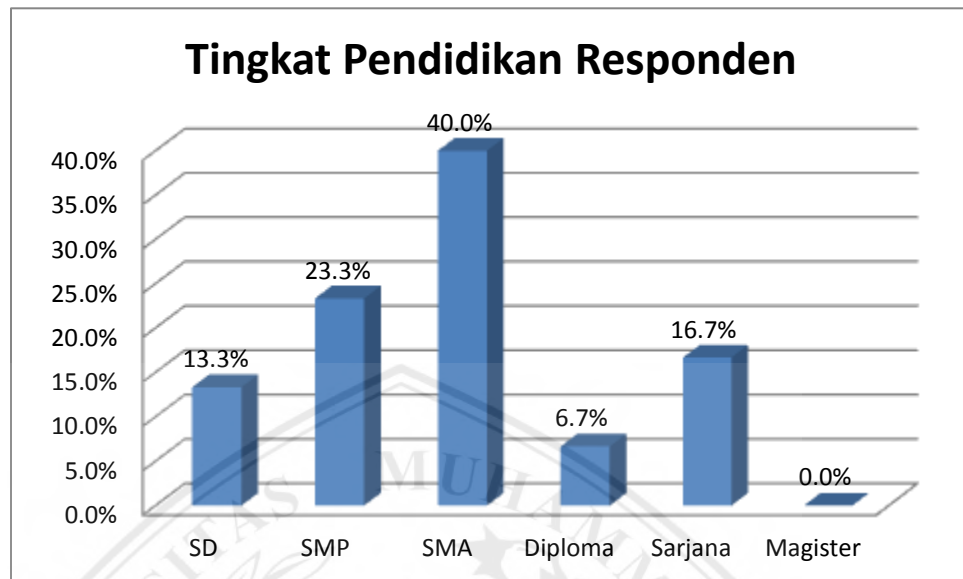
Tingkat pendidikan merupakan gambaran seberapa tinggi pendidikan yang ditempuh oleh pedagang kayu di Kabupaten Malang. Adapun persebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	4	13,3%
2	SMP	7	23,3%
3	SMA	12	40,0%
4	Diploma	2	6,7%
5	Sarjana	5	16,7%
6	Magister	0	0,0%
Jumlah		30	100,0%

Berdasarkan tabel 4.7 diatas didapatkan hasil bahwa, sebanyak 4 orang responden atau 13,3% berpendidikan SD, 7 orang responden atau 23,3% merupakan pedagang kayu dengan tingkat pendidikan SMP, 12 orang responden atau 40,0% berpendidikan SMA, 2 orang responden atau 6,7% merupakan pedagang dengan tingkat pendidikan Diploma. 5 orang responden atau 16,7% berpendidikan Sarjana, dan 0 orang responden atau 0,0% merupakan pedagang dengan tingkat pendidikan magister. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden berasal dari lulusan SMA.

Adapun perbandingan responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada bagan berikut:



Grafik 4.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

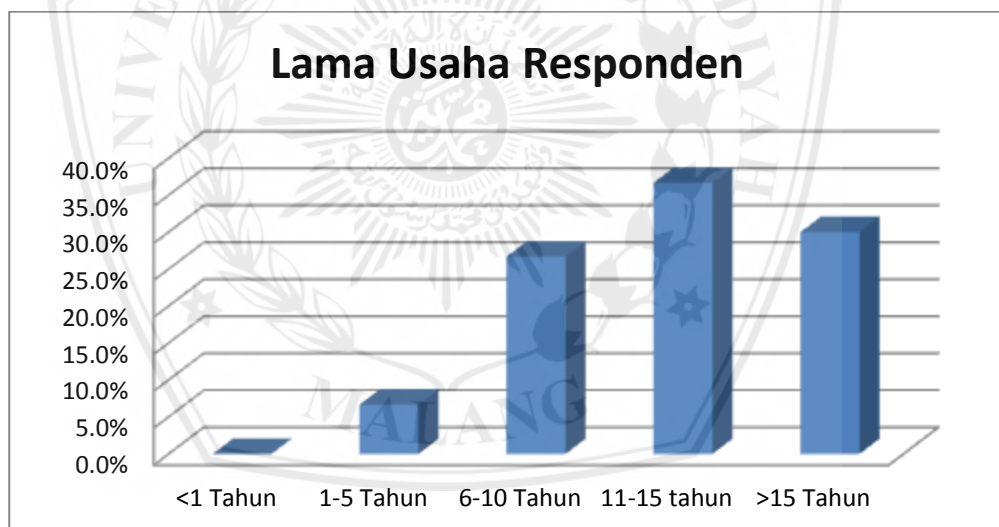
4.2.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama usaha dalam menjalankan usaha sebagai pedagang kayu merupakan gambaran seberapa lama usaha yang dijalankan dan ditempuh pedagang kayu di Kabupaten Malang. Adapun karakteristik lama usaha pedagang kayu Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

No	Lama Usaha	Jumlah	Persentase
1	<1 Tahun	0	0,0%
2	1-5 Tahun	2	6,7%
3	6-10 Tahun	8	26,7%
4	11-15 Tahun	11	36,7%
5	>15 Tahun	9	30,0%
Jumlah		30	100,0%

Berdasarkan tabel 4.8 diatas didapatkan hasil bahwa tidak ada responden dalam menempuh usaha pedagang kayu kurang lebih dari satu tahun, 2 orang responden atau 66,7% menempuh usaha sebagai pedagang kayu kisaran antara 1-5 tahun, sebanyak 8 orang responden atau 26,7% memiliki kisaran lama usaha antara 6-10 tahun, 11 orang responden atau 36,7% memiliki lama usaha sekitar 11-15 tahun, sedangkan sejumlah 9 responden atau 30,0% memiliki lama usaha kurang lebih 15 tahun. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menempuh usaha sebagai pedagang kayu kisaran antara 11-15 tahun atau 36,7% yakni berjumlah 11 responden. Adapun perbandingan responden berdasarkan lama usaha dapat dilihat pada bagan berikut:

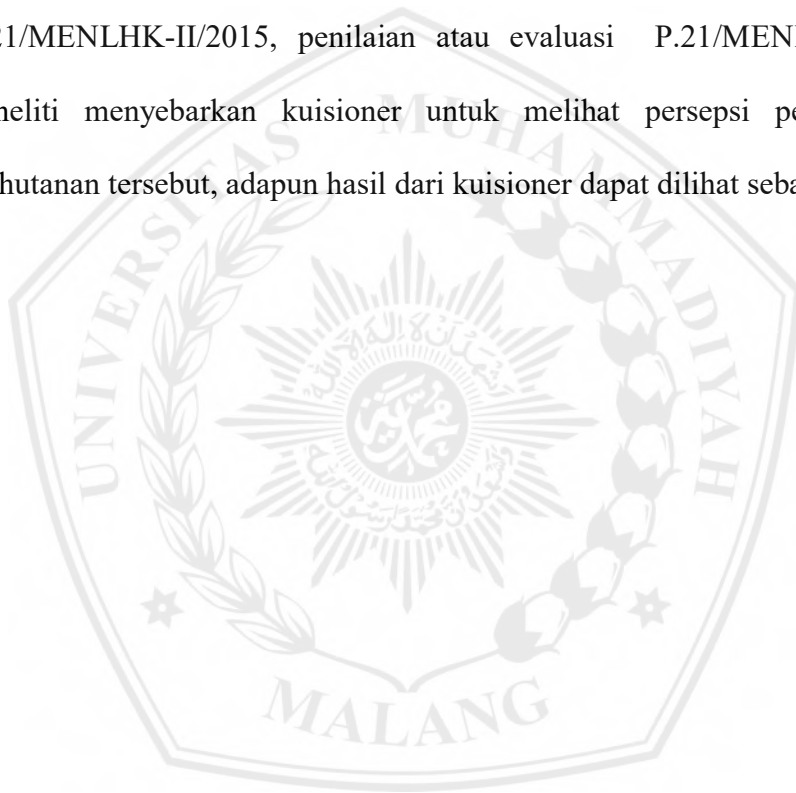


Grafik 4.8. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

4.3. Deskripsi Variabel

4.3.1. Persepsi Petugas Dinas Kehutanan

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Variabel yang digunakan adalah persepsi petugas terhadap P.21/MENLHK-II/2015. Terdapat 3 sub variabel diantaranya penerimaan /penyerapan P.21/MENLHK-II/2015, pengertian dan pemahaman P.21/MENLHK-II/2015, penilaian atau evaluasi P.21/MENLHK-II/2015. Peneliti menyebarkan kuisioner untuk melihat persepsi petugas Dinas Kehutanan tersebut, adapun hasil dari kuisioner dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 4.9. Persepsi Petugas Dinas Kehutanan

No	Indikator Pelaksanaan Program	SS		S		CS		TS		STS		Jumlah Responden	Rata-rata
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Menerima pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 tanpa adanya keluhan	0	0%	6	20%	9	30%	14	47%	1	3%	30	2.67
2	Siap menjalankan P.21/MENLHK-II/2015 yang telah disahkan	0	0%	1	3%	13	43%	11	37%	5	17%	30	2.33
3	Mampu menyerap maksud pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 dengan baik	1	3%	3	10%	10	33%	13	43%	3	10%	30	2.53
4	Mampu memahami tujuan dari P.21/MENLHK-II/2015	1	3%	8	27%	13	43%	7	23%	1	3%	30	3.03
5	Mampu memahami isi pasal P.21/MENLHK-II/2015	0	0%	1	3%	18	60%	11	37%	0	0%	30	2.67
6	Mampu memahami tugas dan wewenang Dinas Kehutanan khususnya bagian Wasganis PHPL yang terdapat di P.21/MENLHK-II/2015	1	3%	8	27%	9	30%	12	40%	0	0%	30	2.93
7	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 akan membawa perubahan yang baik terhadap sistem birokrasi yang ada	0	0%	2	7%	12	40%	12	40%	4	13%	30	2.40
8	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah Dinas Kehutanan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap hasil hutan hak	0	0%	1	3%	7	23%	16	53%	6	20%	30	2.10

9	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 memperingan tugas Dinas Kehutanan	1	3%	1	3%	7	23%	20	67%	1	3%	30	2.37
10	Isi dari SKAU & Nota Angkutan P.21/MENLHK-II/2015 mudah diimplementasikan	1	3%	1	3%	8	27%	14	47%	6	20%	30	2.23
11	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 mampu mengurangi kasus <i>illegal logging</i>	1	3%	3	10%	5	17%	15	50%	6	20%	30	2.27
12	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membawa dampak positif bagi penatausahaan hasil hutan hak	3	10%	2	7%	6	20%	17	57%	2	7%	30	2.57
Rata-Rata Total													2.51

Tabel 4.9 menunjukkan persepsi petugas Dinas Kehutanan pada indikator pelaksanaan menerima pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 tanpa adanya keluhan menjawab sangat setuju 0%; setuju 20%; cukup setuju 30%; tidak setuju 47%; dan sangat tidak setuju 3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi petugas Dinas Kehutanan menyatakan setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,67 dan berada pada rentangan 2,61-3,4 sehingga masuk kategori sedang. Hal tersebut disebabkan rata-rata pegawai masih belum siap menerima peraturan tersebut karena belum disosialisasikan secara maksimal.

Persepsi petugas Dinas Kehutanan pada indikator pelaksanaan siap menjalankan P.21/MENLHK-II/2015 yang telah disahkan menjawab sangat setuju 0%; setuju 3%; cukup setuju 43%; tidak setuju 37%; dan sangat tidak setuju 17%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi petugas Dinas Kehutanan menyatakan cukup setuju terhadap P.21/MenLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,33 dan berada pada rentangan 1,81-2,6 sehingga masuk kategori kurang. Pada umumnya pegawai dinas masih belum siap menjalankan peraturan yang isinya sangat berbeda dengan aturan lama , sehingga banyak aturan baru yang harus dipelajari lagi serta banyak kehilangan data yang harus diantisipasi.

Persepsi petugas Dinas Kehutanan pada indikator pelaksanaan mampu menyerap maksud pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 dengan baik menjawab sangat setuju 3%; setuju 10%; cukup setuju 33%; tidak

setuju 43%; dan sangat tidak setuju 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi petugas Dinas Kehutanan menyatakan tidak setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,53 dan berada pada rentangan 1,81-2,6 sehingga masuk kategori kurang. Kemampuan menyerap aturan baru yang kurang karena pegawai sebagian besar belum mendapat sosialisasi secara maksimal. Perlu penambahan jam materi agar lebih dapat diserap dengan lebih baik.

Persepsi petugas Dinas Kehutanan pada indikator pelaksanaan mampu memahami tujuan dari P.21/MENLHK-II/2015 menjawab sangat setuju 3%; setuju 27%; cukup setuju 43%; tidak setuju 23%; dan sangat tidak setuju 3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi petugas Dinas Kehutanan menyatakan cukup setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,03 dan berada pada rentangan 2,61-3,4 sehingga masuk kategori sedang. Pada dasarnya sebagai seorang pegawai konsekuensi harus setuju dan harus mau menjalankan semua aturan meski banyak hal yang sulit dan perlu dikondisikan.

Persepsi petugas Dinas Kehutanan pada indikator pelaksanaan mampu memahami isi pasal P.21/MENLHK-II/2015 menjawab sangat setuju 0%; setuju 3%; cukup setuju 60%; tidak setuju 37%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi petugas Dinas Kehutanan menyatakan cukup setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban

responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,67 dan berada pada rentangan 2,61-3,4 sehingga masuk kategori sedang. Isi pasal dalam peraturan pada dasarnya adalah ilmu yang dapat dipelajari dan dapat diterapkan, namun memang memerlukan waktu dan pembelajaran khusus agar hasil lebih maksimal.

Persepsi petugas Dinas Kehutanan pada indikator pelaksanaan mampu memahami tugas dan wewenang Dinas Kehutanan khususnya bagian Wasganis PHPL yang terdapat di P.21/MENLHK-II/2015 menjawab sangat setuju 3%; setuju 27%; cukup setuju 30%; tidak setuju 40%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi petugas Dinas Kehutanan menyatakan tidak setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,93 dan berada pada rentangan 2,61-3,4 sehingga masuk kategori sedang. Tugas dan wewenang petugas dinas terhadap alur peredaran kayu rakyat pada dasarnya makin berkurang, namun seiring hal tersebut juga berdampak pada insentif, honor serta pemasukan lain yang otomatis berkurang juga.

Persepsi petugas Dinas Kehutanan pada indikator pelaksanaan Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 akan membawa perubahan yang baik terhadap sistem birokrasi yang ada menjawab sangat setuju 0%; setuju 7%; cukup setuju 40%; tidak setuju 40%; dan sangat tidak setuju 13%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada persepsi petugas Dinas Kehutanan menyatakan cukup setuju dan tidak setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai

rata-rata sebesar 2,40 dan berada pada rentangan 1,81-2,6 sehingga masuk kategori kurang. Adanya aturan baru bagi pegawai dinas dianggap menyebabkan kehilangan data alur kayu masuk dan keluar, sehingga mempersulit pemerintah dalam menentukan kebijakan ke depan terhadap kayu rakyat.

Persepsi petugas Dinas Kehutanan pada indikator pelaksanaan Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah Dinas Kehutanan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap hasil hutan hak menjawab sangat setuju 0%; setuju 3%; cukup setuju 23%; tidak setuju 53%; dan sangat tidak setuju 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi petugas Dinas Kehutanan menyatakan tidak setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,10 dan berada pada rentangan 1,81-2,6 sehingga masuk kategori kurang. Adanya kehilangan data dari alur kayu rakyat secara otomatis mempersulit pencatatan dan pelaporan terhadap hasil hutan hak. Dalam aturan yang baru, kepala desa selaku petugas yang berwenang terdapat alur kayu rakyat juga tidak berkewajiban melaporkan ke dinas terkait sehingga data lebih sulit didapat.

Persepsi petugas Dinas Kehutanan pada indikator pelaksanaan Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 meringankan tugas Dinas Kehutanan menjawab sangat setuju 3%; setuju 3%; cukup setuju 23%; tidak setuju 67%; dan sangat tidak setuju 3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi petugas Dinas Kehutanan menyatakan tidak setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban

responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,37 dan berada pada rentangan 1,81-2,6 sehingga masuk kategori kurang. Sebenarnya secara logika adanya aturan baru menyebabkan tugas Waganis PHPL berkurang, namun sisi lain menyebabkan petugas lebih sulit melakukan lacak balak dan cek lapangan terhadap kemungkinan adanya kayu-kayu hutan yang diselundupkan bersama kayu rakyat.

Persepsi petugas Dinas Kehutanan pada indikator pelaksanaan isi dari SKAU & Nota Angkutan P.21/MENLHK-II/2015 mudah diimplementasikan menjawab sangat setuju 3%; setuju 3%; cukup setuju 27%; tidak setuju 47%; dan sangat tidak setuju 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi petugas Dinas Kehutanan menyatakan tidak setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,23 dan berada pada rentangan 1,81-2,6 sehingga masuk kategori kurang. Aturan baru lebih susah diimplementasikan karena memang baru dan belum disosialisasikan maksimal kepada instansi dan petugas dinas terkait.

Persepsi petugas Dinas Kehutanan pada indikator pelaksanaan Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 mampu mengurangi kasus *illegal logging* menjawab sangat setuju 3%; setuju 10%; cukup setuju 17%; tidak setuju 50%; dan sangat tidak setuju 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi petugas Dinas Kehutanan menyatakan tidak setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,27 dan berada pada rentangan 1,81-2,6 sehingga masuk kategori kurang. *Illegal logging* sejak awal

memang diharapkan selalu ditekan dan dikurangi ada atau tanpa adanya aturan baru. Petugas baik dari Dinas Kehutanan terutama Perum Perhutani rutin melakukan patroli gabungan di lapangan untuk menekan angka kerugian dan kerusakan hutan akibat *illegal logging*.

Persepsi petugas Dinas Kehutanan pada indikator pelaksanaan Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membawa dampak positif bagi penatausahaan hasil hutan hak menjawab sangat setuju 10%; setuju 7%; cukup setuju 20%; tidak setuju 57%; dan sangat tidak setuju 7%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi petugas Dinas Kehutanan menyatakan tidak setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,57 dan berada pada rentangan 1,81-2,6 sehingga masuk kategori kurang. Penatausahaan hutan hak adalah rangkaian peraturan yang saling bersinergi antara pegawai dan pedagang serta kelestarian hutan. Adanya aturan yang hanya berpihak pada kepentingan pedagang saja tanpa memperhatikan dampaknya juga perlu dipertimbangkan kembali.

Sesuai dengan hasil jawaban responden pada persepsi petugas Dinas Kehutanan di atas mengenai indikator pada pelaksanaan program dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program memiliki kategori kurang dengan nilai rata-rata 2,51 karena berada pada rentangan antara 1,81-2,6. Aturan baru memang perlu dilakukan uji kelayakan di lapangan dengan mempertimbangkan berbagai factor, baik dari sisi masyarakat, kebijakan dan kelestarian.

Sedangkan hasil analisis deskriptif untuk masing-masing persepsi petugas Dinas Kehutanan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.10. Rentangan Skala Variabel Persepsi petugas Dinas Kehutanan

No	Rentangan	Kategori
1	4.21-5	Sangat Tinggi
2	3.41-4.2	Tinggi
3	2.61-3.4	Sedang
4	1.81-2.6	Kurang
5	1-1.8	Rendah

4.3.2. Persepsi Pedagang Terhadap P.21/MENLHK-II/2015

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Persepsi pedagang terhadap P.21/MENLHK-II/2015 memiliki 3 sub variabel diantaranya penerimaan /penyerapan P.21/MENLHK-II/2015, pengertian dan pemahaman P.21/MENLHK-II/2015, penilaian atau evaluasi P.21/MENLHK-II/2015. Berikut persepsi pedagang sesuai dengan kuisisioner yang telah dibagikan kepada pedagang.

Tabel 4.11. Persepsi Pedagang Terhadap P.21/MENLHK-II/2015

No	Indikator Pelaksanaan Program	SS		S		CS		TS		STS		Jumlah Responden	Rata-rata
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Menerima pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 tanpa adanya keluhan	14	47%	15	50%	1	3%	0	0%	0	0%	30	4.43
2	Siap mengikuti aturan dari P.21/MENLHK-II/2015 yang telah disahkan	10	33%	14	47%	6	20%	0	0%	0	0%	30	4.13
3	Mampu menyerap maksud pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 dengan baik	20	67%	10	33%	0	0%	0	0%	0	0%	30	4.67
4	Mampu memahami tujuan dari P.21/MENLHK-II/2015	22	73%	8	27%	0	0%	0	0%	0	0%	30	4.73
5	Mampu memahami isi pasal P.21/MENLHK-II/2015	19	63%	11	37%	0	0%	0	0%	0	0%	30	4.63
6	Mampu memahami hak dan kewajiban pedagang terdapat pada P.21/MENLHK-II/2015	10	33%	16	53%	3	10%	1	3%	0	0%	30	4.17
7	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membuat sistem birokrasi lebih efisien	10	33%	14	47%	6	20%	0	0%	0	0%	30	4.13
8	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan bagi petani dan pedagang	7	23%	16	53%	7	23%	0	0%	0	0%	30	4.00

9	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah pedagang dalam pemanenan atau penebangan	11	37%	13	43%	6	20%	0	0%	0	0%	30	4.17
10	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah pedagang dalam pengangkutan/peredaran dan pengumpulan hasil hutan hak	14	47%	11	37%	5	17%	0	0%	0	0%	30	4.30
11	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 meringankan pengurusan surat-surat	8	27%	16	53%	6	20%	0	0%	0	0%	30	4.07
12	Isi dari SKAU & Nota Angkutan P.21/MENLHK-II/2015 menguntungkan pedagang	11	37%	13	43%	6	20%	0	0%	0	0%	30	4.17
13	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 mampu mengurangi kasus <i>illegal logging</i>	12	40%	16	53%	2	7%	0	0%	0	0%	30	4.33
14	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membawa dampak positif bagi penatausahaan hasil hutan hak	14	47%	16	53%	0	0%	0	0%	0	0%	30	4.47
Rata-Rata Total													4.31

Tabel 4.11 menunjukkan persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan menerima pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 tanpa adanya keluhan menjawab sangat setuju 47%; setuju 50%; cukup setuju 3%; tidak setuju 0%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015. Sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,43 dan berada pada rentangan 4,21-5 sehingga masuk kategori sangat tinggi. Pedagang selaku pihak yang sangat diuntungkan dengan aturan baru tersebut langsung menerima aturan tanpa keluhan bahkan sangat mendukung aturan baru tersebut.

Persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan siap mengikuti aturan dari P.21/MENLHK-II/2015 yang telah disahkan menjawab sangat setuju 33%; setuju 47%; cukup setuju 20%; tidak setuju 0%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015. Sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,13 dan berada pada rentangan 3,41-4,2 sehingga masuk kategori tinggi. Adanya dukungan penuh dan keuntungan serta kemudahan dari aturan baru membuat pedagang antusias dan di lapangan faktanya langsung diterapkan meskipun belum semua pihak mendapat sosialisasi dari pemerintah.

Persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan mampu menyerap maksud pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 dengan baik menjawab sangat setuju 67%; setuju 33%; cukup setuju 0%; tidak setuju 0%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan sangat setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata

jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,67 dan berada pada rentangan 4,21-5 sehingga masuk kategori sangat tinggi. Adanya regulasi yang lebih sederhana dan simple membuat pedagang dan pemilik kayu rakyat cepat dapat menyerap maksud aturan dengan baik.

Persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan mampu memahami tujuan dari P.21/MENLHK-II/2015 menjawab sangat setuju 73%; setuju 27%; cukup setuju 0%; tidak setuju 0%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan sangat setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,73 dan berada pada rentangan 4,21-5 sehingga masuk kategori sangat tinggi. Tujuan perturan yang dibuat memang untuk memudahkan masyarakat terutama pedagang kayu dalam mengangkut kayu rakyat. Adanya aturan baru yang lebih memihak masyarakat membuat pedagang antusias mempelajari dan lebih cepat memahami maksud dan tujuan dibuatnya aturan baru.

Persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan mampu memahami isi pasal P.21/MenLHK-II/2015 menjawab sangat setuju 63%; setuju 37%; cukup setuju 0%; tidak setuju 0%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan sangat setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,63 dan berada pada rentangan 4,21-5 sehingga masuk kategori sangat tinggi. Isi pasal dalam aturan baru lebih pro rakuay dan pro masyarakat sehingga pedagang lebih cepat memahami masing-masing isi pasalnya.

Persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan mampu memahami hak dan kewajiban pedagang terdapat di P.21/MENLHK-II/2015 menjawab sangat setuju 33%; setuju 53%; cukup setuju 10%; tidak setuju 3%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,17 dan berada pada rentangan 3,41-4,2 sehingga masuk kategori tinggi. Hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan baru lebih sederhana bagi pedagang karena hanya cukup dengan nota angkut saja, sedangkan aturan sebelumnya mengharuskan pedagang dan pemilik kayu rakyat untuk mengurus berbagai surat dan blangko jika akan menebang atau mengangkut kayu hasil kebunnya sendiri.

Persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membuat sistem birokrasi lebih efisien menjawab sangat setuju 33%; setuju 47%; cukup setuju 20%; tidak setuju 0%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,13 dan berada pada rentangan 3,41-4,2 sehingga masuk kategori tinggi. Sistem birokrasi memang dipangkas lebih praktis dan lebih cepat tanpa adanya blangko yang harus dibawa ke dinas terkait. Hal tersebut juga secara otomatis berdampak pada pungutan-pungutan liar tiap titik birokrasi yang harus dilalui. Adanya aturan baru membuat sistem lebih cepat dan murah.

Persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam

pemilikan/penguasaan bagi petani dan pedagang menjawab sangat setuju 23%; setuju 53%; cukup setuju 23%; tidak setuju 0%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,00 dan berada pada rentangan 3,41-4,2 sehingga masuk kategori tinggi. Pada aturan lama rakyat pemilik kayu serta pedagang banyak direpotkan jika harus menebang kayunya sendiri. Adanya aturan baru dirasa lebih memperhatikan hak mereka untuk dapat menguasai lahannya sendiri dan berkreasi terhadap kepemilikan kayu dan hasilnya.

Persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah pedagang dalam pemanenan atau penebangan menjawab sangat setuju 37%; setuju 43%; cukup setuju 20%; tidak setuju 0%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,17 dan berada pada rentangan 3,41-4,2 sehingga masuk kategori tinggi. Sebelum adanya aturan baru, pemanenan kayu rakyat harus melibatkan pihak dinas terkait untuk mengecek kebenaran dan keaslian kayunya, lalu setelah ditebang juga harus dimintakan surat angkut dari dinas terkait. Adanya aturan baru rakyat cukup minta tanda tangan blangko surat angkut dari kepala desa saja.

Persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah pedagang dalam pengangkutan/peredaran dan pengumpulan hasil hutan hak menjawab sangat setuju 47%; setuju 37%; cukup setuju 17%; tidak setuju 0%; dan sangat tidak

setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,30 dan berada pada rentangan 4,21-5 sehingga masuk kategori sangat tinggi. Untuk mengangkut kayu rakyat sebelum aturan baru harus melalui proses ke dinas dan melibatkan perhutani serta kepolisian agar membuktikan keaslian kayu benar-benar milik rakyat. Sedangkan adanya aturan baru saat rakyat akan mengangkut kayunya cukup dengan membawa dokumen nota angkutan yang ditandatangani kepala desa saja. Artinya pedagang merasa adanya kemudahan dalam hal angkutan kayu rakyat setelah adanya regulasi baru.

Persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 meringankan pengurusan surat-surat menjawab sangat setuju 27%; setuju 53%; cukup setuju 20%; tidak setuju 0%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,07 dan berada pada rentangan 3,41-4,2 sehingga masuk kategori tinggi. Aturan lama mengharuskan surat-surat serta blangko yang harus disertakan dalam pengangkutan kayu rakyat lebih banyak, sedangkan aturan baru cukup nota angkutan saja. Untuk mengurus blangko tersebut juga sering dipungut biaya lain-lain yang sering meresahkan masyarakat.

Persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan isi dari SKAU & Nota Angkutan P.21/MENLHK-II/2015 menguntungkan pedagang menjawab sangat setuju 37%; setuju 43%; cukup setuju 20%; tidak setuju 0%; dan sangat tidak

setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,17 dan berada pada rentangan 3,41-4,2 sehingga masuk kategori tinggi. Dari sisi ekonomi adanya aturan baru sangat menguntungkan pedagang karena banyak pungli yang dihindari. Selain itu juga saat terjadi angkutan dan macet di jalan tidak harus mengeluarkan banyak biaya jika berurusan dengan kepolisian.

Persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 mampu mengurangi kasus *illegal logging* menjawab sangat setuju 40%; setuju 53%; cukup setuju 7%; tidak setuju 0%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,33 dan berada pada rentangan 4,21-5 sehingga masuk kategori sangat tinggi. Adanya pencurian kayu dianggap dapat berkurang karena mereka enggan berurusan dengan kayu hutan lagi, dikarenakan sudah mudah dengan hanya mengurus kayu rakyat saja. Sebenarnya aturan baru membuat susah melacak kayu rakyat atau kayu hutan, karena minimnya dokumen dan tiadanya dilibatkan lagi pemeriksaan petugas di lapangan.

Persepsi pedagang pada indikator pelaksanaan pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membawa dampak positif bagi penatausahaan hasil hutan menjawab sangat setuju 47%; setuju 53%; cukup setuju 0%; tidak setuju 0%; dan sangat tidak setuju 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persepsi pedagang menyatakan setuju terhadap P.21/MENLHK-II/2015,

sedangkan berdasarkan rata-rata jawaban responden diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,47 dan berada pada rentangan 4,21-5 sehingga masuk kategori sangat tinggi. Hal utama dari aturan baru berprinsip pada penyederhanaan dan pemangkasan birokrasi, sehingga banyak menguntungkan masyarakat dan pedagang dan diharapkan ekonomi semakin menggeliat.

Sesuai dengan hasil jawaban responden pada tabel 4.11 di atas mengenai indikator pada pelaksanaan program pada persepsi pedagang terhadap P.21/MENLHK-II/2015 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kategori sangat baik/ sangat tinggi karena memiliki nilai rata-rata 4,31 dan berada pada rentangan antara 4,21-5,00. Aturan baru tersebut prinsipnya adalah memudahkan pedagang dan masyarakat dalam pengurusan dan angkutan kayu rakyat, sehingga penatausahaan hasil hutan rakyat lebih efektif dan efisien.

Tabel 4.12. Rentangan Skala Variabel Persepsi Pedagang Terhadap P.21/MENLHK-II/2015

No	Rentangan	Kategori
1	4,21-5,00	Sangat baik/sangat tinggi
2	3,41-4,20	Baik/tinggi
3	2,61-3,40	Cukup
4	1,81-2,60	Kurang baik/kurang tinggi
5	1,00-1,80	Tidak Baik/rendah

4.4. Uji Instrumen Penelitian

Dalam pengujian instrumen digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Instrumen dikatakan baik apabila memenuhi tiga persyaratan utama yaitu: (1) valid atau sahih; (2) reliabel atau andal; dan (3) praktis (Cooper

dan Schindler, 2003). Bila alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak dapat dipercaya dan tidak andal atau reliabel, hasil penelitian tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk menguji kuesioner sebagai instrumen penelitian maka digunakan uji validitas (*test of validity*) dan uji reliabilitas (*test of reliability*).

Pada uji validitas dan reliabilitas, uji dilakukan dengan menggunakan 30 orang responden dari sebagian sampel dalam penelitian ini. Dalam pengujian validitas, instrumen diuji dengan menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 0,05$. Karena skala pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala likert, uji validitas menggunakan korelasi *product moment*. Instrumen dikatakan valid dengan menggunakan kriteria apabila nilai signifikansi korelasi $\alpha = 0,05$ atau nilai koefisien korelasi (r) $\alpha = 0,30$ Sugiyono (2010).

4.4.1. Uji Validitas

Analisis ini ditujukan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Menurut Singarimbun (2006 : 122), “Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur”. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah r hitung koefisien korelasi lebih besar dari r tabel (nilai kritis) pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Nilai r tabel untuk responden sebanyak 45 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,2429. Jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis, maka alat tersebut dikatakan valid. Adapun hasil uji

validitas untuk instrumen persepsi dinas dengan menggunakan bantuan program SPSS dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.13.
Hasil Uji Validitas Kuesioner Persepsi Dinas

No	Butir Dalam Kuesioner	Koef Korelasi (r-hitung)	R Tabel	Ket
1	Menerima pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 tanpa adanya keluhan	0.802	0.2429	Valid
2	Siap menjalankan P.21/MENLHK-II/2015 yang telah disahkan	0.856	0.2429	Valid
3	Mampu menyerap maksud pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 dengan baik	0.662	0.2429	Valid
4	Mampu memahami tujuan dari P.21/MENLHK-II/2015	0.691	0.2429	Valid
5	Mampu memahami isi pasal P.21/MENLHK-II/2015	0.742	0.2429	Valid
6	Mampu memahami tugas dan wewenang Dinas Kehutanan khususnya bagian Wasganis PHPL yang terdapat di P.21/MENLHK-II/2015	0.664	0.2429	Valid
7	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 akan membawa perubahan yang baik terhadap sistem birokrasi yang ada	0.853	0.2429	Valid
8	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah Dinas Kehutanan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap hasil hutan hak	0.686	0.2429	Valid
9	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 meringankan tugas Dinas Kehutanan	0.764	0.2429	Valid
10	Isi dari SKAU & Nota Angkutan P.21/MENLHK-II/2015 mudah diimplementasikan	0.734	0.2429	Valid
11	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 mampu mengurangi kasus <i>illegal logging</i>	0.782	0.2429	Valid
12	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membawa dampak positif bagi penatausahaan hasil hutan hak	0.670	0.2429	Valid

Sumber: Data SPSS Diolah, 2015

Dari hasil pengujian validitas persepsi dinas pada tabel 4.13 maka dapat dilihat bahwa keseluruhan item variabel persepsi dinas mempunyai r hitung > 0.2429 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, maka dapat diketahui r hasil tiap-tiap item > 0.2429 sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan item variabel persepsi dinas adalah valid untuk digunakan sebagai instrumen dalam penelitian atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

Selanjutnya analisis validitas untuk variabel persepsi dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Kuesioner Pedagang

No	Butir Dalam Kuesioner	Koefisien Korelasi (r-hitung)	R Tabel	Keterangan
1	Menerima pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 tanpa adanya keluhan	0.885	0.2429	Valid
2	Siap mengikuti aturan dari P.21/MENLHK-II/2015 yang telah disahkan	0.806	0.2429	Valid
3	Mampu menyerap maksud pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 dengan baik	0.837	0.2429	Valid
4	Mampu memahami tujuan dari P.21/MENLHK-II/2015	0.743	0.2429	Valid
5	Mampu memahami isi pasal P.21/MENLHK-II/2015	0.767	0.2429	Valid
6	Mampu memahami hak dan kewajiban pedagang terdapat di P.21/MENLHK-II/2015	0.642	0.2429	Valid
7	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membuat sistem birokrasi lebih efisien	0.844	0.2429	Valid
8	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan bagi petani	0.691	0.2429	Valid

	dan pedagang			
9	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah pedagang dalam pemanenan atau penebangan	0.885	0.2429	Valid
10	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah pedagang dalam pengangkutan/peredaran dan pengumpulan hasil hutan hak	0.951	0.2429	Valid
11	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 memperingan pengurusan surat-surat	0.798	0.2429	Valid
12	Isi dari SKAU & Nota Angkutan permen P.21/MENLHK-II/2015 menguntungkan pedagang	0.908	0.2429	Valid
13	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 mampu mengurangi kasus <i>illegal logging</i>	0.501	0.2429	Valid
14	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membawa dampak positif bagi penatausahaan hasil hutan hak	0.870	0.2429	Valid

Sumber: Data SPSS Diolah, 2015

Dari hasil pengujian validitas persepsi dinas pada tabel 4.14 maka dapat dilihat bahwa keseluruhan item variabel persepsi dinas mempunyai r hitung > 0.2429 pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$, maka dapat diketahui r hasil tiap-tiap item > 0.2429 sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan item variabel persepsi dinas adalah valid untuk digunakan sebagai instrumen dalam penelitian atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

4.4.2. Uji Reliabilitas

Sedangkan uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat

ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda.

Untuk uji reliabilitas digunakan teknik *Alpha Cronbach*, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha sebesar 0,60 atau lebih. Adapun hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap instrumen penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.15. Hasil Uji Reliabilitas Persepsi dinas dan Persepsi Pedagang

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Persepsi dinas	0.941	Reliabel
2	Persepsi Pedagang	0.961	Reliabel

Berdasarkan tabel 4.15 tampak bahwa semua variabel penelitian mempunyai reliabilitas yang dapat diterima (semua Alpha Cronbach > 0,60) dimana nilai Alpha Cronbach persepsi dinas sebesar 0.979, sedangkan nilai Alpha Cronbach persepsi dinas sebesar 0.972 sehingga dapat diartikan bahwa instrumen penelitian bersifat reliabel. Hal tersebut dapat dikatakan nilai koefisien reliabilitas berkisar antara 0 sampai dengan 1 semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa item semakin reliabel.

4.4.3. Pengujian Normalitas Data Persepsi Dinas dan Persepsi Pedagang Terhadap P.21/MENLHK-II/2015

Uji Normalitas menurut Gozali (2006:76), bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah

distribusi data normal atau tidak, dilakukan pengujian dengan menggunakan pengujian grafik normal PP Plot dan *One-Sample Kolmogorov Smirnov test* yang terdapat dalam program SPSS 16.0 *for Windows*. Data dikatakan terdistribusi dengan normal apabila residual terdistribusi dengan normal yaitu memiliki tingkat signifikansi diatas 5% (Ghozali, 2005). Pengujian normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual yang diperoleh dari model mengikuti distribusi normal atau tidak. Hasil pengujian menunjukkan residual berdistribusi normal. Berikut adalah hasil pengujian normalitas variabel efektivitas pelaksanaan persepsi dinas dan persepsi pedagang :

Tabel 4.16. Hasil Uji Normalitas Data

Variabel	Persepsi Dinas	Persepsi Pedagang
N	45	45
Kolmogorov-Smirnov Z	0.569	1.127
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.902	0.158
Nilai Kritis	0.05	

Dari Tabel 4.16, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov Z adalah 0.569 untuk persepsi dinas dan 1.127 untuk persepsi pedagang sedangkan nilai nilai signifikansi sebesar 0.902 dan 0.158 > Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan distribusi residual dengan distribusi normal, atau dapat dikatakan residual berdistribusi normal karena data berada pada kategori normal maka kedua variabel tersebut dapat dibandingkan untuk melihat efektivitas hasilnya.

4.5. Hasil Analisis Uji Beda

4.5.1. Uji Perbandingan Persepsi Dinas dengan Persepsi Pedagang tentang P.21/MENLHK-II/2015

Uji perbandingan persepsi dinas dengan persepsi pedagang tentang P.21/MENLHK-II/2015 dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan independent sampel t test. Pengambilan keputusan terhadap uji beda tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel atau nilai signifikansi $<0,05$ maka H_0 ditolak, jadi terdapat perbedaan persepsi pegawai dinas dan pedagang terhadap P.21/MENLHK-II/2015
- b) Jika nilai t hitung lebih kecil dari tabel maka H_0 diterima atau nilai signifikansi $>0,05$, jadi tidak terdapat perbedaan persepsi pegawai dinas dan pedagang terhadap P.21/MENLHK-II/2015

Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan independent sampel t test, akan terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum dari masing-masing persepsi dinas dan persepsi pedagang. Adapun hasil analisis deskriptif dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.17. Deskripsi Persepsi Dinas dan Pedagang

Variabel	Persepsi Dinas	Persepsi Pedagang
Rata-rata	2,508	4,315
Median	2,415	4,290
Modus	2,08	4,79
Standart Deviasi	0,675	0,529
Nilai Minimum	1,50	3,36
Nilai Maximum	4,00	4,93
Jumlah	75,24	129,45

Dari analisis deskriptif diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata persepsi pegawai dinas terhadap P.21/MENLHK-II/2015 adalah 2,508, nilai minimum 1.50 dan nilai maksimum 4.00 sedangkan untuk persepsi pedagang terhadap P.21/MENLHK-II/2015 nilai rata-ratanya adalah 4,315 nilai minimum 3,36 dan nilai maksimum 4,93. Dari data deskripsi tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan persepsi pegawai dinas dan pedagang terhadap P.21/MENLHK-II/2015 dimana persepsi pedagang lebih tinggi dari pada persepsi dinas, sedangkan untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan maka dilakukan dengan uji t. adapun hasil uji independent sampel t-test dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.18. Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means			
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
Persepsi	Equal variances assumed	1.554	.218	11.539	58	.000	1.80700
	Equal variances not assumed			11.539	54.855	.000	1.80700

Berdasarkan hasil independent sampel t-test dapat diketahui bahwa nilai t-hitung adalah 11,539 sedangkan nilai t-tabel yang diperoleh dari 45 responden adalah 1,697. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai t-hitung > dari pada t-tabel, selain itu nilai signifikansi adalah $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak, jadi terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara pedagang dan pegawai dinas terhadap P.21/MENLHK-

II/2015. Dari sisi pegawai jelas didapatkan banyak hal berkurang karena adanya regulasi baru, antara lain honor sebagai pengawas teknis terhadap peredaran kayu rakyat, data yang hilang karena tidak ada kewajiban melaporkan data produksi dan keluar masuk kayu rakyat, serta dikhawatirkan susah lacak balak antara kayu rakyat dan kayu hutan di lapangan

Pedagang kayu dan masyarakat umumnya lebih diuntungkan karena regulasi baru tersebut karena pengurusan penebangan, angkutan dan peredaran kayu rakyat sekarang tidak perlu melibatkan dinas terkait. Selain itu juga tidak diperlukan blangko-blangko yang rumit serta memangkas biaya serta pungutan dalam pengurusan blangko angkutan. Namun di sisi lain mudahnya regulasi peredaran kayu rakyat membuat industri primer berkurang omsetnya karena sekarang masyarakat lebih memilih menjual kayu gelondongan langsung ke perusahaan menengah di luar kota seperti Pasuruan dan lain-lain, dikarenakan mudahnya aturan angkutan kayu.

4.5.2. Uji Perbandingan Jumlah Kasus *Illegal Logging* Sebelum dan Sesudah P.21/MENLHK-II/2015

Uji perbandingan jumlah kasus *illegal logging* setelah P.21/MENLHK-II/2015 dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan independent sampel t test.

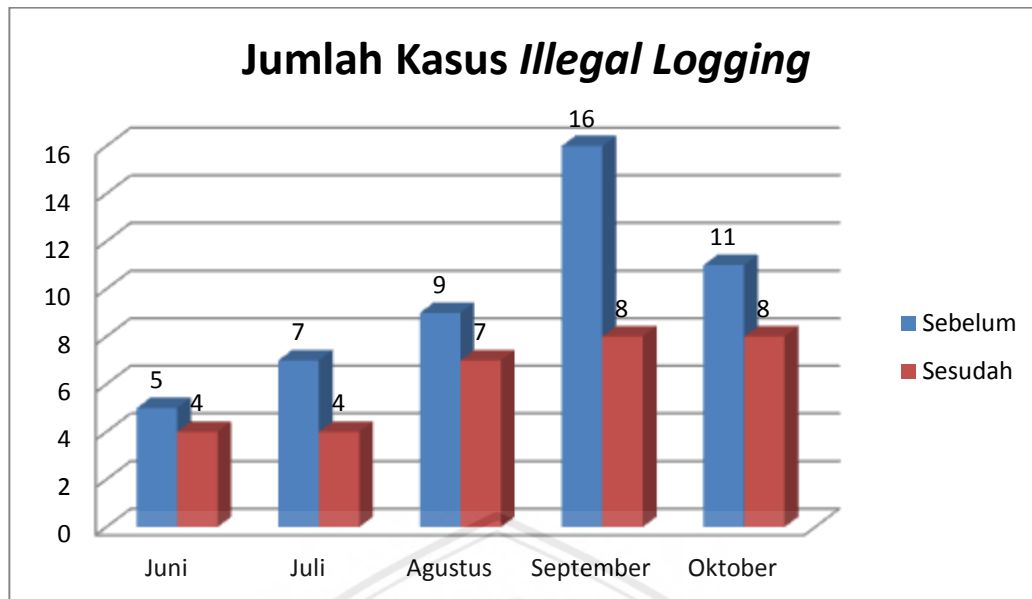
Pengambilan keputusan terhadap uji beda tersebut antara lain sebagai berikut:

- 4.5.2.1. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel atau nilai signifikansi $<0,05$ maka H_0 ditolak, jadi terdapat perbedaan jumlah kasus *illegal logging* setelah P.21/MENLHK-II/2015
- 4.5.2.2. Jika nilai t hitung lebih kecil dari tabel maka H_0 diterima atau nilai signifikansi $>0,05$, jadi tidak terdapat perbedaan jumlah kasus *illegal logging* setelah P.21/MENLHK-II/2015.

Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan independent sampel t test, akan terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum dari masing-masing jumlah kasus sebelum dan sesudah P.21/MENLHK-II/2015. Adapun hasil analisis deskriptif dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.19. Perbandingan Jumlah Kasus *Illegal Logging*

Tahun	Bulan	Jumlah Kasus
2014	Juni	5
	Juli	7
	Agustus	9
	September	16
	Oktober	11
	Jumlah	48
2015	Juni	3
	Juli	5
	Agustus	7
	September	9
	Oktober	6
	Jumlah	30



Grafik 4.9. Perbandingan Jumlah Kasus *Illegal Logging*

Dari analisis deskriptif diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus selama tahun 2014 sebanyak 48 kasus, sedangkan selama tahun 2015 terjadi 30 kasus, dari data deskripsi tersebut terlihat bahwa jumlah kasus yang terjadi berkurang. Sedangkan untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan maka dilakukan dengan uji t. adapun hasil uji independent sampel t-test dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.20. Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means			
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
Persepsi	Equal variances assumed	6.023	.033	1.953	8	.032	1.20000
	Equal variances not assumed			1.953	7.998	.032	1.20000

Berdasarkan hasil independent sampel t-test dapat diketahui bahwa nilai t-hitung adalah 1.953 sedangkan nilai t-tabel yang diperoleh dari 2 tahun (pada Bulan Juni-Oktober) adalah 1,697. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai t-hitung > dari pada t-tabel, selain itu nilai signifikansi adalah $0.032 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H1 diterima, jadi terdapat perbedaan yang signifikan jumlah kasus *illegal logging* sebelum dan setelah P.21/MENLHK-II/2015. Berdasarkan data yang diperoleh dari Perum Perhutani KPH Malang memang terdapat penurunan jumlah pencurian kayu setelah adanya regulasi baru. Saat dikonfirmasi salah satu pihak Perhutani yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa turunnya jumlah kasus pencurian juga karena pihaknya memang berusaha untuk menekan dan menurunkan angka pencurian kayu yang terjadi dalam kawasan hutan melalui operasi rutin dan operasi gabungan.

4.5.3. Uji Perbandingan Jumlah Kerugian *Illegal Logging* Sebelum dan Sesudah P.21/MENLHK-II/2015

Uji perbandingan jumlah jumlah kerugian akibat *illegal logging* setelah P.21/MENLHK-II/2015 dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan independent sampel t test. Pengambilan keputusan terhadap uji beda tersebut antara lain sebagai berikut:

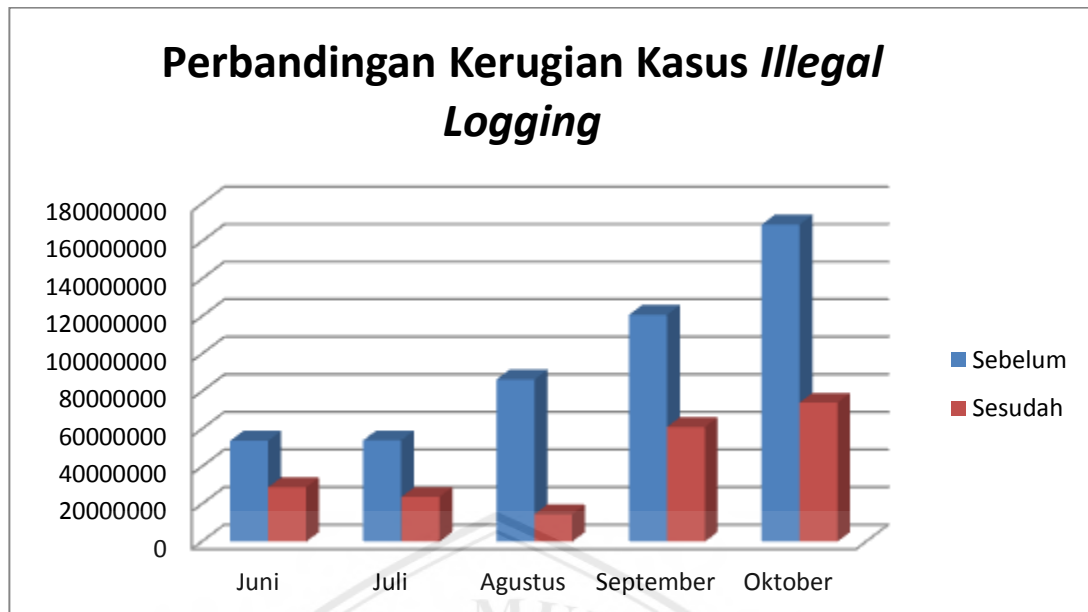
4.5.3.1. Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel atau nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, jadi terdapat perbedaan kerugian akibat *illegal logging* setelah P.21/MENLHK-II/2015

4.5.3.2. Jika nilai t hitung lebih kecil dari tabel maka H_0 diterima atau nilai signifikansi $>0,05$, jadi tidak terdapat perbedaan kerugian akibat *illegal logging* setelah P.21/MENLHK-II/2015

Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan independent sampel t test, akan terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif untuk mengetahui gambaran umum dari masing-masing kasus antara sebelum dan setelah P.21/MENLHK-II/2015. Adapun hasil analisis deskriptif dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.21. Perbandingan kerugian Akibat Kasus *Illegal Logging*

Tahun	Bulan	Jumlah Kerugian
2014	Juni	53765000
	Juli	53994000
	Agustus	86401000
	September	120844000
	Oktober	168943000
	Jumlah	483947000
2015	Juni	28997000
	Juli	23805000
	Agustus	14581000
	September	61104000
	Oktober	74056000
	Jumlah	202543000



Grafik 4.10. Perbandingan Kerugian Akibat Kasus *Illegal Logging*

Dari analisis deskriptif diatas dapat diketahui bahwa jumlah kerugian yang terjadi selama tahun 2014 adalah 483.947.000, sedangkan untuk selama tahun 2015 terjadi 202.543.000 dimana jumlah kerugian lebih tinggi sebelum adanya P.21/MENLHK-II/2015, sedangkan untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan maka dilakukan dengan uji t. adapun hasil uji independent sampel t-test dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.22 . Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means			
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
Jumlah	Equal variances assumed	5.722	.012	1.899	8	.042	4.028087
	Equal variances not assumed			1.899	7.231	.042	4.028087

Berdasarkan hasil independent sampel t-test dapat diketahui bahwa nilai t-hitung adalah 1.899 sedangkan nilai t-tabel yang diperoleh adalah 1,697. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai t-hitung > dari pada t-tabel, selain itu nilai signifikansi adalah $.042 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H1 diterima, jadi terdapat perbedaan yang signifikan jumlah kasus *illegal logging* sebelum dan setelah P.21/MENLHK-II/2015. Jumlah kerugian kasus pencurian kayu tersebut dihitung berdasarkan rumus menghitung volume pohon. Jika satu batang pohon dapat di grade sesuai aturan kubikan, maka kerugian kehilangan sebatang pohon juga akan menyesuaikan. Kerugian yang diderita Perhutani akibat pencurian kayu tersebut dapat dianalogkan dengan kerugian pemerintah secara umum, karena Perhutani adalah kepanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan hutan di Jawa dan Madura

4.6. Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1. Uji Perbandingan Persepsi Dinas dengan Persepsi Pedagang tentang P.21/MENLHK-II/2015

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Terjadi perbedaan persepsi antara Dinas Kehutanan dengan pedagang tentang P.21/MENLHK-II/2015.

Dalam upaya Pemerintahan pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat kebijakan dengan adanya regulasi baru guna lebih meningkatkan kegiatan ekonomi, memangkas ekonomi biaya tinggi, penyederhanaan perizinan, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup adanya regulasi tersebut disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya: 1) Tata kelola hutan belum dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel; 2) Prosedur Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) banyak memberikan ruang bagi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; 3) Pengelolaan hutan produksi belum sepenuhnya dilandasi oleh prinsip *good governance* dan hutan lestari; dan 4) sistem *official assessment* dipandang belum memadai dan rumit. Berdasarkan alasan tersebut maka pemerintah mengeluarkan P.21/MENLHK-II/2015, tentunya dengan adanya peraturan tersebut muncul berbagai persepsi.

Dari analisis deskriptif diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata persepsi dinas terhadap P.21/MENLHK-II/2015 adalah 2.5080, nilai minimum 1.50 dan nilai maksimum 4.00 sedangkan untuk persepsi pedagang terhadap P.21/MENLHK-II/2015 nilai rata-ratanya adalah 4.3150 nilai minimum 3.36 dan nilai maksimum 4.93. Dari data deskripsi tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan persepsi dinas dan pedagang terhadap P.21/MENLHK-II/2015 dimana persepsi pedagang lebih tinggi dari pada persepsi dinas.

Bedasarkan hasil independent sampel t-test dapat diketahui bahwa nilai t-hitung adalah 11.539 sedangkan nilai t-tabel yang diperoleh dari 45 responden adalah 1,697. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai t-hitung > dari pada t-tabel, selain itu nilai signifikansi adalah $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak, jadi terdapat perbedaan yang signifikan persepsi pedagang dan persepsi dinas terhadap P.21/MENLHK-II/2015.

Persepsi yang terjadi antara Dinas Kehutanan dan pedagang memang terdapat perbedaan, hal tersebut didukung dengan t-tes yang dapat disimpulkan dengan hipotesis H_0 ditolak, dan penelitian terdahulu dilaksanakan oleh Astana, dkk (2014) dengan judul “Dapatkah SVLK Mendorong Tata Kelola Kehutanan ke Arah yang Lebih Baik?” menunjukkan hasil bahwa dalam hal pemberantasan pembalakan ilegal dan perdagangannya, skema SVLK juga mempunyai nilai tambah yakni dalam hal mencegah perusahaan melakukan pembalakan ilegal di areal yang dilindungi, menebang pohon pada sisi sungai dan areal kemiringan tajam, melakukan pembalakan berlebihan atau menebang pohon yang tidak sesuai rencana kerja. Penerapan SVLK juga mengendalikan penebangan pohon pada pembukaan jalan tanpa izin, sebuah kajian nilai tambah sistem verifikasi legalitas kayu.

Pedagang kayu sebagai pelaku yang merasa sangat diuntungkan dengan adanya regulasi baru tersebut merasa jauh lebih mudah dan praktis dengan biaya jauh lebih rendah dibandingkan pengurusan kayu dengan menggunakan regulasi lama. Pegawai dinas juga di satu sisi merasa

dimudahkan dan dikurangi bebannya untuk pengurusan ijin kayu rakyat, namun di sisi lain pendapatan sampingan berkurang juga. Selain itu faktor susahny mendapatkan data distribusi kayu rakyat karena kendali terhadap keluar masuknya kayu bukan di dinas lagi melainkan di pedagang dan kepala desa, sedangkan kewajiban memberikan laporan ke dinas tidak ada. Jadi selama ini masih banyak pelaku usaha, kepala desa dan pedagang kayu yang tidak melaporkan keluar masuknya kayu sehingga dinas kesulitan merekap data potensi dan produksi kayu rakyat

4.6.2. Uji Perbandingan Jumlah Kasus *Illegal Logging* Sebelum Dan Sesudah P.21/MENLHK-II/2015.

Perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan dampak sangat luas mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Kejahatan ini merupakan ancaman bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan *illegal logging* secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Sejak tahun 2005 kasus *illegal logging* terus meningkat hingga mencapai 2,8 juta hektar pertahun sampai tahun 2013. Pada tahun 2005 Indonesia memiliki kawasan hutan 126,8 juta hektar dengan berbagai pembagian fungsi, yaitu fungsi konservasi (23,2 juta hektar), kawasan lindung (32,4 juta hektar), hutan produksi terbatas (21,6 juta hektar), hutan produksi (35,6 juta hektar), dan hutan produksi konversi (14,0 juta hektar). Namun tahun 2013, organisasi lingkungan dunia Green Peace

menyebutkan bahwa 72 % hutan Indonesia telah musnah. Setengah wilayah hutan masih ada dalam kondisi terancam musnah karena penebangan komersial, kebakaran hutan, serta pembukaan hutan untuk kebun kelapa sawit dan pertanian. *Illegal Logging* telah menyebabkan 600.000 hektar hutan Sumatera Utara rusak. Kerusakan tersebut terdapat di hutan produksi dan hutan lindung. *Illegal Logging* juga menyebabkan lebih dari 700.000 hektar hutan di Kalimantan Selatan rusak. Departemen Kehutanan memperkirakan jumlah lahan hutan di seluruh Indonesia yang rusak akibat penjarahan mencapai 2,8 juta hektar per tahun. Hingga kini sudah mencapai 60 juta hektare yang telah musnah. Kerugian yang diderita negara mencapai 40 triliun-50 triliun rupiah per tahun (<http://ppid.dephut.go.id/2015>)

Diharapkan dengan adanya peraturan baru maka kasus *illegal logging* menjadi lebih berkurang. Dari hasil independent sampel t-test dapat diketahui bahwa nilai t-hitung adalah 1.953, sedangkan nilai t-tabel yang diperoleh dari 10 tahun responden adalah 1,697. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai t-hitung > dari pada t-tabel, selain itu nilai signifikansi adalah $0.032 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H1 diterima, jadi terdapat perbedaan yang signifikan jumlah kasus *illegal logging* sebelum dan setelah P.21/MENLHK-II/2015.

Uji perbandingan persepsi kasus *illegal logging* sebelum dan sesudah P.21/MENLHK-II/2015 sesuai dengan hasil independent sampel t-test dapat disimpulkan H1 diterima. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu dilaksanakan oleh Ngakan, dkk (2006) dengan judul

Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat Dusun Pampli terhadap hasil hutan adalah sangat besar. Hasil hutan yang mereka manfaatkan adalah, berturut-turut dari yang paling banyak: rotan, kayu bahan bangunan, kayu bakar, sayuran dan obat-obatan, serta udang dan ikan. Semua laki-laki dewasa di Dusun Pampli pernah bekerja sebagai pemungut rotan. Selain beras yang mereka hasilkan dari sawah, hampir semua kebutuhan hidup lainnya mereka penuhi dari bekerja mengumpulkan hasil hutan, terutama rotan. Adanya program pemerintah yang jelas dan memudahkan administrasi akan mendorong masyarakat untuk lebih mampu memanfaatkan hasil hutan sehingga mengurangi kasus *illegal logging*.

4.6.3. Uji Perbandingan Jumlah Kerugian *illegal Logging* Sebelum Dan Sesudah P.21/MENLHK-II/2015.

Menurut data olahan Tempo (22 Juli 2007), sejak tahun 2001 hingga 2006 jumlah penebangan ilegal berkisar antara 19 hingga 27 juta meter kubik per tahun, atau rata-rata 23 juta meter kubik per tahun dalam 5 tahun terakhir. Angka tersebut jika dianalogikan dengan luas hutan yang ditebang mencapai 27 kilometer persegi setiap tahunnya, setara dengan 40 kali luas Jakarta. Epidemi *illegal logging* tidak hanya merambah kawasan hutan produksi negeri ini, tetapi juga kawasan hutan konservasi dan taman-taman nasional yang dilindungi demi menjaga kekayaan dan kelestarian keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hasil independent sampel t-test dapat diketahui bahwa nilai t-hitung adalah 1.899 sedangkan nilai t-tabel yang diperoleh adalah 1,697. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai t-hitung > dari pada t-tabel, selain itu nilai signifikansi adalah $.042 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan H1 diterima, jadi terdapat perbedaan yang signifikan jumlah kerugian akibat *illegal logging* sebelum dan setelah P.21/MENLHK-II/2015.

Hasil analisis tersebut terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah P.21/MENLHK-II/2015. Didukung pula penelitian terdahulu oleh Anik Fatun (2013) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara penegakan peraturan dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), terdapat pengaruh positif antara asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), terdapat pengaruh negatif antara keadilan distributif dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), terdapat pengaruh negatif antara keadilan prosedural dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan kecenderungan kecurangan (*fraud*), tidak terdapat pengaruh antara budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Tindakan kecurangan akan semakin berkurang manakala regulasi dan kebijakan pemerintah dipermudah

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

- 1) Terdapat perbedaan persepsi pegawai dinas dan pedagang terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MENLHK-II/2015, bahwa persepsi pedagang lebih tinggi dari pada persepsi pegawai dinas. Pedagang merasa jauh lebih diuntungkan terhadap adanya regulasi baru tersebut karena terdapat pemangkasan biaya serta percepatan birokrasi terhadap pengurusan surat kayu, sedangkan pegawai dinas masih kurang siap dan harus banyak menyesuaikan diri dengan adanya regulasi baru tersebut.
- 2) Terdapat perbedaan yang signifikan jumlah kasus *illegal logging* sebelum dan setelah P.21/MENLHK-II/2015 yaitu setelah adanya P.21/MENLHK-II/2015 kasus semakin berkurang. Penyederhanaan dan kemudahan regulasi pemerintah mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan pencurian berkurang. Selain itu pihak Perhutani mengklaim bahwa berkurangnya pencurian kayu tidak lepas dari upaya yang rutin mereka lakukan untuk menekan angka pencurian dalam kawasan hutan.
- 3) Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah kerugian akibat kasus *illegal logging* sebelum dan setelah P.21/MENLHK-II/2015 dimana setelah adanya P.21/MENLHK-II/2015 jumlah kerugian diderita oleh Perum Perhutani (selaku pengelola hutan) akibat kasus *illegal logging* semakin berkurang. Turunnya kasus *illegal logging* ternyata juga

- 4) berpengaruh terhadap jumlah kerugian yang ditimbulkan. Secara ekonomi kerugian akibat pencurian kayu dianalogkan atau dihitung berdasarkan harga jual tiap kubik kayu (log) dengan berbagai grade, dikurangi dengan nilai hasil temuan (kayu yang dirampas atau ditemukan dari hasil kasus pencurian).

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan didapatkan beberapa saran antara lain:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dinas masih dalam kategori cukup baik sehingga butuh sosialisasi yang lebih intensif agar implementasi di lapangan dapat lebih baik.
2. Adanya regulasi baru menimbulkan dampak baru yaitu susah nya lacak balak dan data produksi kayu rakyat, sehingga perlu aturan untuk kewajiban bagi pelaku usaha kayu serta kepala desa untuk melaporkan setiap terjadi distribusi kayu ke dinas kehutanan terkait, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan.
3. Dalam pelaksanaan perizinan untuk pemberian hukum pelanggaran penebangan pohon harus lebih ditegakkan lagi dan harus benar-benar sesuai dengan undang-undang yang ada. Penegakan hukum dalam pelanggaran yang ada harus benar-benar dilakukan untuk semua kalangan atau masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dalam penebangan pohon secara ilegal. Hal tersebut dimaksudkan agar mengurangi jumlah kasus *illegal logging* yang masih terjadi selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Astana, dkk. 2014. Dapatkah SVLK Mendorong Tata Kelola Kehutanan ke Arah yang Lebih Baik. *journal the European commission*
- Dirjen Bina Usaha Kehutanan. 2014. *Permasalahan Yang Dihadapi Di Kawasan Hutan Produksi*. Jakarta
- Fatun, Anik. 2013. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY”.
- Hamka, Muhammad. 2002. Hubungan antara Persepsi Terhadap PengawasanKerjadengan Motivasi Berprestasi Skripsi. Surakarta: UniversitasMuhammadiyah Fakultas Psikologi
- Hendroyono, Bambang. 2014. *Arah Kebijakan dan Evaluasi Pembangunan HTR (paparan pada rapat pembahasan percepatan pembangunan HTR 2014)*. Ditjen BUK.
- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Kriyantono, Rakhmat. 2001. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- L. Tubbs, Stewart dan Sylvia Moss. 2000. *Human Communication*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Liliweri, Alo, 2003. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar budaya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mas.ud, Fuad. 2004. *Survai Diagnosis Organisasional Konsep & Aplikasi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mulyana, Dedi. 2001. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ngakan,dkk. 2006. Ketergantungan, Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadapSumberdaya Hayati Hutan. *Journal Forests and Governance Programme Series*
- Nurgiyantoro, Burhan dkk. 2004. *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press

- Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara. Jakarta
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. Jakarta
- Rakhmat, Jalaluddin. 2001 *Psikologi Komunikasi*, Bandung : CV Alfabeta.
- Schermerhorn. 1994. *Management*, John Wiley & Sons. New York: Fifth edition.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2005. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarwan, Ujang. 2000. *Perilaku Konsumen, (Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran)*. Jakarta: Ghalia.
- Tubbs, Stewart & Sylvia Moss. 2003. *Human Communication*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2006. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.21/MenLHK-II/2015

TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi rakyat, dan ketersediaan data dan informasi hasil hutan hak/rakyat, perlu pengaturan kembali ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

/5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran.
2. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
3. Hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yang selanjutnya disebut hasil hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat.
4. Kayu olahan hutan hak/kayu olahan rakyat adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah dengan menggunakan alat gergaji mekanis dan/atau non mekanis.
5. Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.
6. Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).
7. Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disingkat DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh Pemasok berdasarkan telah dapat dibuktikan pemenuhan atas persyaratan.
8. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat/kayu bulat sedang/kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

/9. IPKR

9. IPKR adalah Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah industri yang mengolah kayu tanaman rakyat/hutan hak yang dimiliki orang perorangan atau koperasi atau BUMDes.
10. Industri Pengolahan Kayu Terpadu yang selanjutnya disingkat IPKT adalah industri primer hasil hutan kayu dan industri pengolahan kayu lanjutan yang berada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum.
11. Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT adalah tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan rakyat yang berasal dari satu atau beberapa sumber hutan hak, milik badan usaha atau perorangan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau surat keterangan oleh Kepala Desa/Lurah.
12. Penerbit SKAU dari Desa adalah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Balai.
13. Penerbit SKAU secara *self assessment* adalah pemilik kayu pada hutan hak yang telah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari atau yang disetarakan.
14. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
15. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
16. Penyuluh Kehutanan adalah individu-individu yang berasal dari pejabat pemerintah, swasta dan anggota masyarakat serta pensiunan penyuluh kehutanan yang aktif berperan melakukan penyuluhan kehutanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2

- (1) Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan.

BAB II

TATA CARA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN HAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa :
 - a. Nota Angkutan; atau
 - b. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul).
- (2) Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Penggunaan SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan pada hutan hak di luar Jawa, Bali dan Lombok.

Pasal 4

- (1) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, digunakan untuk seluruh jenis kayu rakyat/kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang berada di Jawa, Bali dan Lombok.

(2) SKAU

- (2) SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, digunakan untuk seluruh jenis kayu rakyat/kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang berada diluar Jawa, Bali dan Lombok.
- (3) Pengecualian penggunaan SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan Nota Angkutan di Luar Jawa, Bali, dan Lombok untuk kayu jenis : Jati, Mahoni, Nyawai (*Ficus Variegata blume*), Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Cempedak, Dadap, Dulcu, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pengangkutan kayu dari areal hutan hak mengalami kesulitan, maka kayu bulat dapat diolah menjadi kayu olahan dengan menggunakan gergaji mekanis dan/atau non mekanis atau *mobile circular saw*.
- (2) Pengangkutan kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menggunakan dokumen Nota Angkutan atau SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pengangkutan kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain jenis kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tetap menggunakan dokumen SKAU untuk di luar Jawa, Bali dan Lombok dengan mencantumkan nomor SKAU asal.

Bagian Kedua Nota Angkutan

Pasal 6

- (1) Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak. Nota Angkutan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini dan tidak perlu ditetapkan Nomor Seri.
- (2) Penerbit Nota Angkutan tidak perlu ditetapkan pengangkatannya, cukup melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat, dengan menunjukkan bukti identitas diri .
- (3) Pengadaan dan pengisian blanko Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digandakan dengan ditulis tangan atau foto copy dengan mengikuti format terlampir.

Bagian Ketiga SKAU

Pasal 7

- (1) SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Balai.
- (3) Dalam hal di wilayah Desa/Kelurahan belum tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sementara dapat dapat dilakukan oleh Kepala Desa paling lama 6 bulan.
- (4) Terhadap Hutan Hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau yang disetarakan, setelah pemilik/personil yang ditunjuk mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, diberikan kewenangan penerbitan SKAU secara *self assessment*, dan yang bersangkutan cukup melaporkan kepada Kepala Balai setempat sebagai penerbit.

(5) Penerbit

- (5) Penerbit SKAU secara *self assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melaporkan hasil tebangan produksi pada hutan hak miliknya kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kehurahan setempat.
- (6) Tata cara permohonan penerbitan SKAU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Penerbitan dokumen SKAU oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan cara :
 - a. Memeriksa jenis, jumlah batang/bundel/ikat, volume/berat yang akan diangkut; dan
 - b. Memeriksa asal lokasi tanaman yang dipanen dari pemohon SKAU.
- (2) Kegiatan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tenaga yang memahami pengukuran hasil hutan.

Pasal 9

- (1) Pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisian serta penerbitannya oleh penerbit SKAU, dengan menggunakan format Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Pengadaan dan pengisian blanko SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digandakan dengan ditulis tangan atau foto copy mengikuti format SKAU.

Pasal 10

Penerbit Nota Angkutan atau penerbit SKAU bertanggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik hasil hutan hak.

Pasal 11

Penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12

- (1) Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya hak atas tanah mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan pada hutan alam.
- (2) Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami setelah memiliki hak atas tanah mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi hasil hutan kayu rakyat/hak atau hasil hutan bulkan kayu dari hutan hak, setiap Industri pengolah akhir yang menerima Nota Angkutan atau SKAU wajib melaporkan ke Balai dan Dinas Provinsi.
- (4) Balai melaporkan kepada Dirjen setiap 6 bulan.

Pasal 13

- (1) Masa berlaku Nota Angkutan atau SKAU ditetapkan oleh masing-masing penerbit Nota Angkutan atau penerbit SKAU dengan mempertimbangkan jarak tempuh normal.

(2) Dalam hal

- (2) Dalam hal terdapat hambatan di perjalanan dan masa berlaku dokumen Nota Angkutan atau SKAU habis, maka dibuatkan surat keterangan yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup dari pengemudi/nakhoda kapal.

Pasal 14

- (1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau SKAU hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggunaan atau hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan dengan 1 (satu) tujuan.
- (2) Setiap alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan hak dengan lebih dari 1 (satu) dokumen angkutan.

Pasal 15

- (1) Setiap pengangkutan hasil hutan hak dengan tujuan IUIPHHK, IPKT, dan TPT, yang mengalami transit dan bongkar di pelabuhan umum, dapat langsung diangkut ke Industri Penerima.
- (2) Setiap pengangkutan hasil hutan hak dari tempat asal kayu ke pelabuhan transit dengan tujuan IUIPHHK, IPKT, dan TPT di pelabuhan umum, dapat menggunakan SAP (Surat Angkutan Pengganti) yang diterbitkan oleh pembeli/pemilik hasil hutan.
- (3) Dokumen angkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan hak dari pelabuhan umum ke tempat tujuan atau transit pengangkutan Nota Angkutan atau SKAU, menggunakan SAP yang diterbitkan oleh pembeli/pemilik hasil hutan.
- (4) Blanko SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sendiri oleh pemilik hasil hutan hak dengan menggunakan format Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak dengan menggunakan peti kemas dengan tujuan IUIPHHK, dan IPKT melalui pelabuhan umum serta mengalami perubahan alat angkut, maka dokumen Nota Angkutan atau SKAU yang menyertainya tetap berlaku sampai di tujuan akhir.
- (6) SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan bagian dari dokumen asal (Nota Angkutan atau SKAU).

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Balai melakukan pembinaan teknis terhadap penerbit SKAU dan penerbit nota angkutan setahun satu kali.
- (2) Penyuluh Kehutanan dapat melakukan pendampingan masyarakat dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.

BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan atau SKAU, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak.

(3) Pelacakan

- (3) Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Balai berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan atau SKAU di tempat tujuan.
- (4) Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pejabat kehutanan yang ditunjuk oleh Balai.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Dalam hal terjadi pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan atau SKAU, seperti terdapat perbedaan jumlah batang atau masa berlaku dokumen habis di perjalanan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Balai.
- (7) Pelanggaran penerbitan SKAU atas hasil hutan hak yang berasal dari luar wilayah Desa/Kelurahan-nya, dikenakan sanksi pencabutan Keputusan Penetapan Penerbit SKAU oleh Kepala Balai.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Surat Keputusan penerbit SKAU yang sudah ada sebelum terbitnya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan tersebut.

BAB VII PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2015
**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 830

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.21/Menlhk-II/2015
TENTANG :
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

NOTA ANGKUTAN

Name _____
 Examen _____
 Laboratorio _____
 Fecha _____

ASAL HANGLIHTUAN

Buku Kuesioneran : _____
 Nomor : _____
 Nama Timbulir : _____
 Alamat Timbulir : _____
 Tempat asal : _____
 Jenis alat angkut : _____

TUJUAN PENGANGKUTAN

Alumina Finestone : _____
Alumina pebblestone : _____

No. urut	Nama Hasil Belajar	Jumlah (Benar/Total)	Persentase (% Benar)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Jumlah			

Catatan: - Rujukan 3 dan 4 menunjukkan kandungan G20, JIS, NRC, serta kajian maya yang telah dibuat secara berkala.
 - Rujukan 5 dan 6 menunjukkan bahawa kajian ini telah dijalankan dengan teliti dan tepat.
 - Rujukan 7 dan 8 menunjukkan bahawa kajian ini telah dijalankan dengan teliti dan tepat.
 - Rujukan 9 dan 10 menunjukkan bahawa kajian ini telah dijalankan dengan teliti dan tepat.

Delain hat KS und KGS direkt an die UPR übergeben, indem sie beide als neue GANES- RING / PAKS.

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| 1. Nama GARCIS-PRATI / RISKI | : | |
| 2. Nomor Register | : | |
| 3. Kota Angkutan diterima tgl. | : | |
| 4. Kota Angkutan dimajukan tgl. | : | |
| 5. Stempel/tap | : | "TELAH DIBAYARKAN" |
| 6. Penerimaan fiskal KB | : | tgl. s.d.tgl. |
| 7. Tanda Tangan | : | |

2000-01-01

(Land/Mar 04) ____

- Lembar ke-1 : Arsip Penelitian
- Lembar ke-2 : Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- Lembar ke-3 : Pemilik Hasil Riset
- Lembar ke-4 : Kepala Dinas Provinsi
- Lembar ke-5 : Kepala Balai
- Lembar ke-6 : Arsip Penelitian

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI.

 tid |

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

 ttd |

SITI NUREBAYA

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : P.21/Menlhk-II/2015
TENTANG :
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN SKAU

Kepada yth. :

Pejabat Penerbit SKAU

Di - Tempat

Memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ..., pada Pasal ... dinyatakan, bahwa pemilik hasil hutan hak, wajib mengajukan permohonan penerbitan dokumen SKAU. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Nama pemilik :
2. Bukti identitas :KTP/.....
3. Bukti legalitas tanah : Sertifikat/Leter C/Girik
4. Telah melakukan pennebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari:
 - a. Jenis Kayu :
 - b. Jumlah Batang :
 - c. Volume :
5. Akan diangkut/dijual dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jenis Kayu :
 - b. Jumlah Batang : batang
 - c. Volume : m3
 - d. Tujuan pengangkutan :

Apabila asal usul hasil hutan tersebut, ternyata tidak sesuai dengan asal lokasi tebangan, maka isi dokumen SKAU menjadi tanggung jawab kami selaku pemilik hasil hutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

....., 20

Pemohon,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)
(KETERANGAN UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAN)
berlaku selama hari, dari tanggal s/d

Wujudan	Jenis Data	Jumlah (Subang/Pas)	Volume (ml)	Catatan
1	2	3	4	5
Jumlah				

Deming Inc. =

SITI NURBAYA

Variabel, Sub Variabel Dan Indikator

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator
1	Persepsi petugas terhadap peraturan	Penerimaan /penyerapan	Menerima pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 tanpa adanya keluhan
			Siap menjalankan P.21/MENLHK-II/2015 yang telah disahkan
			Mampu menyerap maksud pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 dengan baik
		Pengertian dan pemahaman	Mampu memahami tujuan dari P.21/MENLHK-II/2015
			Mampu memahami isi pasal P.21/MENLHK-II/2015
			Mampu memahami tugas dan wewenang Dinas Kehutanan khususnya bagian Wasganis PHPL yang terdapat di P.21/MENLHK-II/2015
		Penilaian atau evaluasi	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 akan membawa perubahan yang baik terhadap sistem birokrasi yang ada
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah Dinas Kehutanan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap hasil hutan hak
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 meringankan tugas Dinas Kehutanan
			Isi dari SKAU & Nota Angkutan P.21/MENLHK-II/2015 mudah diimplementasikan
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 mampu mengurangi kasus <i>illegal logging</i>
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membawa dampak positif bagi penatausahaan hasil hutan hak

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator
2	Persepsi pedagang terhadap peraturan	Penerimaan /penyerapan	Menerima pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 tanpa adanya keluhan
			Siap mengikuti aturan dari P.21/MENLHK-II/2015 yang telah disahkan
			Mampu menyerap maksud pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 dengan baik
		Pengertian dan pemahaman	Mampu memahami tujuan dari P.21/MENLHK-II/2015
			Mampu memahami isi pasal P.21/MENLHK-II/2015
			Mampu memahami hak dan kewajiban pedagang terdapat di P.21/MENLHK-II/2015
		Penilaian atau evaluasi	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membuat sistem birokrasi lebih efisien
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan bagi petani dan pedagang
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah pedagang dalam pemanenan atau penebangan
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah pedagang dalam pengangkutan/peredaran dan pengumpulan hasil hutan hak
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 meringankan pengurusan surat-surat
			Isi dari SKAU & Nota Angkutan P.21/MENLHK-II/2015 menguntungkan pedagang
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 mampu mengurangi kasus <i>illegal logging</i>
			Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membawa dampak positif bagi penatausahaan hasil hutan hak

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator
3	Dampak <i>illegal logging</i>	Dampak positif	Terdapat perbedaan kasus dan kerugian <i>illegal logging</i> yaitu semakin berkurang setelah adanya penerapan P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang
		Dampak negatif	Terdapat perbedaan kasus dan kerugian <i>illegal logging</i> yaitu semakin bertambah setelah adanya penerapan P.21/MENLHK-II/2015 di Kabupaten Malang



Kuesioner 1 (Pegawai Dinas Kehutanan)

Persepsi Pegawai Dinas Kehutanan Dan Pedagang Kayu Terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak

Responden yang terhormat, saya sangat mengharapkan kerja Saudara untuk mengisi angket ini dengan benar. Angket ini hanya digunakan untuk penyelesaian data penelitian dan karya ilmiah semata. Atas perhatian dan kerjasamanya saya sampaikan terima kasih.

A. IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin :

Usia :

Lama Kerja :

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Berilah tanda (√) pada tempat yang telah tersedia sesuai dengan jawaban Anda. Penilaian dilakukan berdasarkan skala berikut :
 - a. Sangat Setuju (SS) = 5
 - b. Setuju (S) = 4
 - c. Kurang Setuju (KS) = 3
 - d. Tidak Setuju (TS) = 2
 - e. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
2. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
3. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya karena tidak akan mempengaruhi pekerjaan anda
4. Setelah mengisi angket mohon Bapak/Ibu berikan kepada yang menyerahkan angket.
5. Terimakasih atas partisipasi Anda.

No	Pernyataan	Skor Jawaban				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Saya menerima pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 tanpa adanya keluhan					
2	Saya siap menjalankan P.21/MENLHK-II/2015 yang telah disahkan					
3	Saya mampu menyerap maksud pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 dengan baik					
4	Saya mampu memahami tujuan dari P.21/MENLHK-II/2015					
5	Saya mampu memahami isi pasal P.21/MENLHK-II/2015					
6	Saya mampu memahami tugas dan wewenang Dinas Kehutanan khususnya bagian Wasganis PHPL yang terdapat di P.21/MENLHK-II/2015					
7	Saya yakin pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 akan membawa perubahan yang baik terhadap sistem birokrasi yang ada					
8	Saya yakin pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah dinas dalam melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap hasil hutan hak					
9	Saya yakin pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 meringankan tugas Dinas Kehutanan					

10	Isi dari SKAU & Nota Angkutan P.21/MENLHK-II/2015 mudah diimplementasikan					
11	Saya percaya pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 mampu mengurangi kasus <i>illegal logging</i>					
12	Saya yakin pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membawa dampak positif bagi penatausahaan hasil hutan hak					



Kuesioner 2 (Pedagang)

Persepsi Pegawai Dinas Kehutanan Dan Pedagang Kayu Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK-II/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak

Responden yang terhormat, saya sangat mengharapkan kerja Saudara untuk mengisi angket ini dengan benar. Angket ini hanya digunakan untuk penyelesaian data penelitian dan karya ilmiah semata. Atas perhatian dan kerjasamanya saya sampaikan terima kasih.

C. IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin :

Usia :

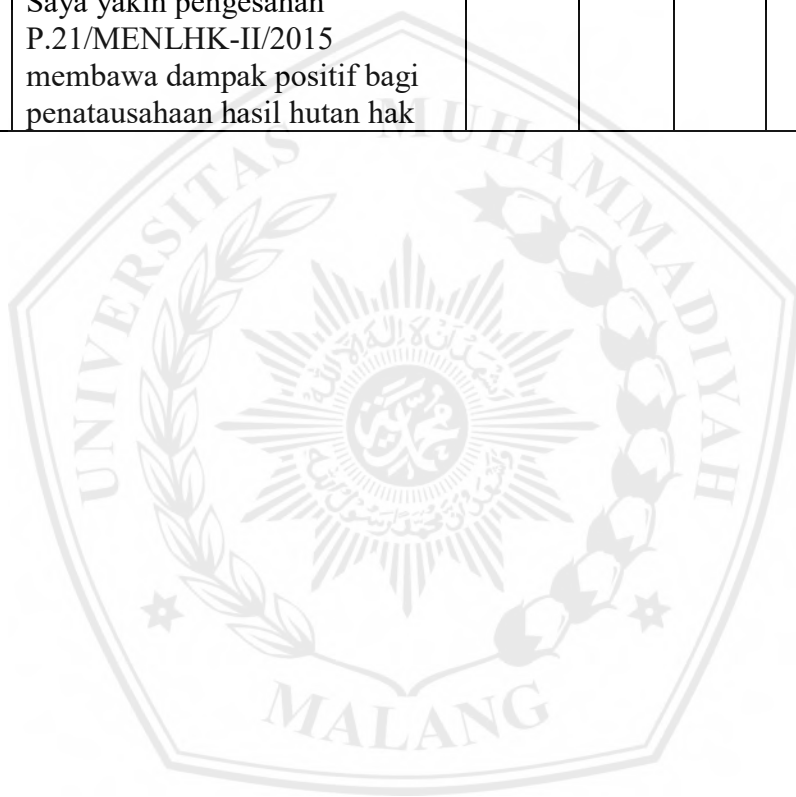
Lama Kerja :

D. PETUNJUK PENGISIAN

1. Berilah tanda (√) pada tempat yang telah tersedia sesuai dengan jawaban Anda. Penilaian dilakukan berdasarkan skala berikut :
 - a. Sangat Setuju (SS) = 5
 - b. Setuju (S) = 4
 - c. Kurang Setuju (KS) = 3
 - d. Tidak Setuju (TS) = 2
 - e. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1
2. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
3. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya karena tidak akan mempengaruhi pekerjaan anda
4. Setelah mengisi angket mohon Bapak/Ibu berikan kepada yang menyerahkan angket.
5. Terimakasih atas partisipasi Anda.

No	Pernyataan	Skor Jawaban				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Saya menerima pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 tanpa adanya keluhan					
2	Saya siap mengikuti aturan dari P.21/MENLHK-II/2015 yang telah disahkan					
3	Saya mampu menyerap maksud pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 dengan baik					
4	Saya mampu memahami tujuan dari P.21/MENLHK-II/2015					
5	Saya mampu memahami isi pasal P.21/MENLHK-II/2015					
6	Saya mampu memahami hak dan kewajiban pedagang terdapat di P.21/MENLHK-II/2015					
7	Saya yakin pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membuat sistem birokrasi lebih efisien					
8	Saya yakin pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam kepemilikan/penguasaan bagi petani dan pedagang					
9	Saya yakin pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah pedagang dalam pemanenan atau penebangan					
10	Saya yakin pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 lebih mempermudah pedagang dalam pengangkutan/peredaran dan pengumpulan hasil hutan hak					

11	Pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 meringankan pedagang dalam pengurusan surat-surat					
12	Isi dari SKAU & Nota Angkutan P.21/MENLHK-II/2015 menguntungkan pedagang					
13	Saya yakin pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 mampu mengurangi kasus <i>illegal logging</i>					
14	Saya yakin pengesahan P.21/MENLHK-II/2015 membawa dampak positif bagi penatausahaan hasil hutan hak					



Potensi Kayu Hutan Rakyat di Kab. Malang
Tabel. Prediksi Produksi Kayu Hutan Rakyat di Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Produksi (m ³)
1	Ampelgading	Argoyuwono	700,14	8240911,58
		Lebakharjo	38,86	386321,03
		Mulyoasri	287,4	2344864,36
		Purwoharjo	101,17	987795,51
		Sidorenggo	401,98	5471827,65
		Simojayan	68,56	434621,27
		Sonowangi	420,39	3843,692
		Tamanasri	159,07	1408781,62
		Tamansari	90,12	875936,13
		Tawangagung	218,31	2058379,15
		Tirtomarto	185,59	1995993,76
		Tirtomoyo	431,65	5359587,13
		Wirotaman	146,15	1234730,14
2	Bantur	Bandungrejo	505,66	2562551,75
		Bantur	26,34	9551,90
		Karangsari	192,55	692251,35
		Rejosari	109,16	685537,45
		Rejoyoso	69,65	374359,52
		Srigonco	948,27	6894438,49
		Sumberbening	144,21	2155589,221
		Wonokerto	193,23	1073246,6
		Wonorejo	6,12	11840,85
3	Bululawang	Gading	15,83	246,49
		Lubangsari	26,85	395,27
		Sukonolo	41,52	23007,94
4	Dampit	Amadanom	71,8	342414,75
		Baturetno	133,28	1346328,60
		Bumirejo	182,97	571549,50
		Dampit	37,71	139564,65
		Jambangan	629,74	3190242,04
		Majang Tengah	462,08	3049916,07
		Pamotan	179,84	646169,81
		Pojok	8,69	46365,81
		Rembun	216,84	983804,86
		Srimulyo	926,06	10647873,34
		Sukodono	641,18	7451040,95
		Sumbersuko	98,18	3563416,90
5	Dau	Area Kehutanan	3,02	180906,98
		Gadingkulon	132,7	81967,98
		Kalisongo	302,88	108711,21
		Karangwidoro	201,28	67285,37

		Kucur	597,88	577923,67
		Landungsari	105,81	5295,69
		Mulyoagung	17,98	7853,94
		Petungsewu	95,83	78466,66
		Selorejo	70,78	28931,26
		Sumbersekar	268,04	204181,62
		Tegalweru	360,38	116193,01
6	Donomulyo	Banjarejo	126,95	744857,75
		Donomulyo	27,95	38509,67
		Kedungsalam	88,15	207454,55
		Mentaraman	26,2	60305,76
		Purworejo	412,84	1614012,92
		Sumberoto	530,79	648258,55
		Tempursari	6,47	9932,14
		Tlogosari	150,99	387194,48
		Tulungrejo	130,6	823574,67
7	Gedangan	Gajahrejo	176,31	480826,69
		Gedangan	753,21	2273945,11
		Segaran	495,36	996205,57
		Sidodadi	217,05	1161405,58
		Sindurejo	619,15	2250837,56
		Sumberejo	272,26	540488,14
		Tumpakrejo	42,57	2355724,83
8	Gondanglegi	Bulupitu	4,45	13871,00
		Ganjaran	4	384,87
		Gondanglegi Kulon	0	0,00
		Gondanglegi Wetan	20,97	1398,71
		Ketawang	56,11	12407,17
		Putat Kidul	50,38	14504,82
		Putat Lor	103,64	52354,58
		Putukrejo	6	1647,13
		Sepanjang	63,35	127196,10
		Sukorejo	0	0,00
		Sumberjaya	3,61	289,89
		Urek-Urek	16,81	18032,55
9	Jabung	Argosari	161,4	389709,16
		Gadingkembar	243,55	101581,64
		Kemiri	215,3	1183187,95
		Kenongo	49,7	1323366,42
		Ngadirejo	48,14	11137,29
		Pandansari Lor	23,66	578125,87
		Sidomulyo	26,93	15707,59
		Slamparejo	176,04	453506,15
		Sukopuro	70,79	219995,90
		Taji	31,88	11107,42

10	Kalipare	Arjowilangun	29,73	2417,21
		Arjosari	359,48	225551,04
		Kaliasri	25,61	27047,80
		Kalipare	167,75	401565,79
		Kalirejo	124,54	29096,94
		Putukrejo	77,2	95453,68
		Sukosari	93,13	142481,29
		Sukowilangun	28,07	12926,96
		Sumberpetung	198,47	310596,16
		Tumpakrejo	221,12	217412,58
11	Karangploso	Bocek	400,94	18516,48
		Donowarih	335,87	29199,16
		Kepuharjo	21,75	881,62
		Ngenep	819,87	20452,45
		Ngijo	32,16	11607,81
		Tawangargo	251,68	18516,84
12	Kasembon	Bayem	42,39	20734,87
		Kasembon	109,6	30678,50
		Pait	32,91	15203,42
		Pondokagung	221,54	69081,97
		Sukosari	43,55	8894,62
		Wonoagung	271,92	117200,28
13	Kepanjen	Kedungpedaringan	5,09	10854,80
14	Kromengan	Karangrejo	1,13	1028,58
		Kromengan	1,41	1630,38
		Ngadirejo	0,25	4,62
		Peniwen	0,1	81,85
		Slorok	4,87	15367,88
15	Lawang	Bedali	190,46	40107,80
		Kalirejo	94,88	19621,70
		Ketindan	222,28	191776,69
		Mulyoarjo	46,62	16182,69
		Sidodadi	62,51	84728,27
		Sidoluhur	101,6	99487,66
		Srigading	150,14	214556,14
		Sumberngepoh	25,21	64084,68
		Wonorejo	61,66	401922,54
16	Ngajum	Babadan	224,99	806131,54
		Balesari	562,34	2147958,82
		Banjarsari	119,56	441380,77
		Kesamben	26,72	106277,21
		Kranggan	147,79	526336,28
		Maguan	176,53	565933,61
		Ngajum	166,24	470393,27
		Ngasem	36,38	109005,38
		Palaan	9,11	7746,84

17	Ngantang	Banjarejo	184,58	59578,01
		Banturejo	18,79	1099,48
		Jombok	78,08	165369,89
		Kaumrejo	12,69	33009,47
		Mulyorejo	46,06	144224,17
		Ngantru	0,66	1233,32
		Pagersari	181,95	541271,00
		Pandansari	104,98	287331,87
		Purworejo	160,21	218991,02
		Sidodadi	224,11	342683,53
		Sumberagung	67,39	376643,37
		Tulungrejo	201,35	1244676,72
		Waturejo	13,57	45095,31
18	Pagak	Gampingan	322,35	119020,24
		Pagak	11,35	3962,74
		Pandanrejo	38,38	66510,58
		Sempol	381,87	1154807,33
		Sumberejo	14,19	327,22
		Sumberkerto	434,31	2322048,82
		Sumbermanjing Kulon	41,21	176137,65
		Tlogorejo	204	77301,90
19	Pagelaran	Balearjo	17,66	2772,53
		Banjarejo	55,63	5752,74
		Brongkal	19,41	3713,07
		Clumprit	55,51	67679,52
		Kademangan	82,55	45280,17
		Kanigoro	31,45	4439,39
		Karangsono	8,96	606,21
		Pagelaran	55,03	8563,1
		Sidorejo	19,24	9056,5
		Suwaru	31,7	18713,16
20	Pakis	Banjarejo	45,72	16114,12
		Kedungrejo	0	0,00
		Pakiskembar	15,3	41911,0
		Pucangsongo	92,38	87711,0
		Saptorenggo	0	0,00
		Sukoanyar	30,9	47656,66
		Sumberkradenan	8,63	22870,34
		Sumberpasir	38,5	22484,92
21	Pakisaji	Jatisari	111,08	97074,88
		Permanu	10,2	3748,79
		Wadung	14,87	84663,36
22	Poncokusumo	Argosuko	83,25	140032,61
		Belung	159,16	99300,46
		Dawuhan	67,79	663646,34
		Gubukklakah	132,37	28206

		Jambesari	1,432	685,77
		Karanganyar	40,33	27659,27
		Karangnongko	0	0,02
		Ngadas	256,29	409354,46
		Ngadireso	2,67	1063,02
		Pandansari	73,25	36160,69
		Poncokusumo	576,45	149132,11
		Sumberejo	269,07	2440065,61
		Wonomulyo	11,47	3353,41
		Wonorejo	49,95	12463,17
		Wringinanom	46,51	113048,33
23	Pujon	Bendosari	54,32	127162,77
		Ngabab	38,52	45504,46
		Ngebrong	309,410	2592743,82
		Ngroto	0	0,07
		Pandesari	61,97	46655,54
		Pujon Kidul	22,67	10898,11
		Pujon Lor	4,99	73,45
		Sukomulyo	24,14	45862,49
		Tawang Sari	10,63	156,43
		Wiyurejo	37,38	25706,31
24	Singosari	Ardimulyo	0,02	0,32
		Baturetno	0,01	0,09
		Dengkol	15,12	4314,77
		Gunungrejo	307,34	76600,04
		Klampok	436,57	60004,99
		Lang-Lang	384,61	23219,22
		Purwoasri	108,74	14604,37
		Randuagung	96,52	12688,28
		Toyomarto	278,3	34192,64
		Wonorejo	14,98	1371,33
25	Sumbermanjing Wetan	Argotirto	304,01	3059369,18
		Druju	828,83	2678529,55
		Harjokuncaran	60,82	250836,71
		Klepu	306,67	1035070,46
		Ringinkembar	293,68	2675540
		Ringinsari	66,32	97920,73
		Sekarbanyu	185,5	1233648,17
		Sitiarjo	17,42	77266,64
		Sumberagung	158,08	1197177,78
		Sumbermanjing Wetan	339,1	1257593,31
		Tambakasri	1179,63	13695704,03
		Tambakrejo	12,53	87358,91
		Tegalrejo	252,35	2464115,51
26	Sumberpucung	Jatigui	1,56	1309,60

		Karangates	7,14	3677,72
27	Tajinan	Jambearjo	102,44	15859,85
		Jatisari	40,74	19635,29
		Ngawonggo	49,2	16908,32
		Pandanmulyo	66,12	10782,68
		Purwosekar	25,69	13367,82
		Randugading	64,48	14473,32
		Sumbersuko	36,78	1131,62
		Tajinan	12,54	3303,94
		Tambakasri	19,87	403,52
		Tangkilsari	63,1	20300,75
28	Tirtoyudo	Ampelgading	180,76	1345410,40
		Gadungsari	45,13	285696,88
		Jogomulyan	13,27	1646913,89
		Kepatihan	151,4	1857034,75
		Sukorejo	27,72	157015,93
		Sumbertangkil	116,22	1219121,57
		Tamankuncaran	131,69	722556,74
		Tamansatriyan	391,5	4642646,11
		Tirtoyudo	60,65	743932,17
		Wonoagung	48,85	258448,53
29	Tumpang	Benjor	28,01	11566,25
		Bokor	20,3	43571,80
		Duwet	164,62	17398,95
		Krajan	127,96	35976,21
		Jeru	12,24	1921,21
		Malangsuko	62,26	9225,97
		Ngingit	12,51	2885,28
		Pandanajeng	12,75	6470,69
		Pulungdowo	213,94	640185,94
		Slamet	20,4	11701,90
		Tulusbesar	194,83	57346,22
		Tumpang	168,22	28248,56
		Wringinsongo	0,4	10,23
30	Turen	Gedog Kulon	6,34	18450,63
		Gedog Wetan	146,81	490284,01
		Jeru	15,77	47603,23
		Kedok	35,89	255615,10
		Kemulan	81,32	232575,51
		Pagedangan	60,2	316823,61
		Sanankerto	53,94	207431,61
		Sananrejo	97,21	417419,03
		Sawahan	36,47	59055,30
		Sedayu	2,48	12192,08
		Talangsuko	14,35	72910,36
		Talok	23,99	40098,19

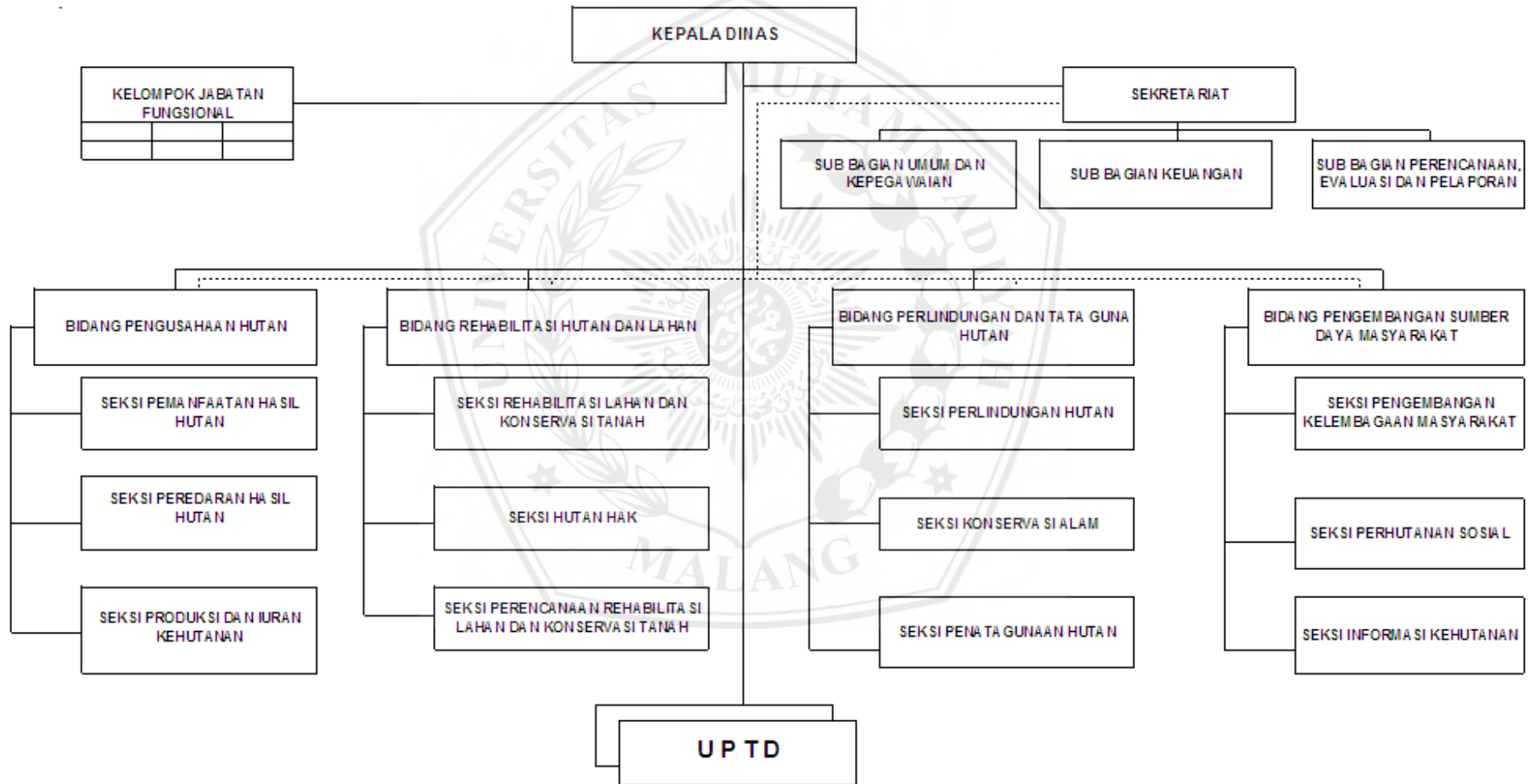
		Tanggung	2,26	14585,13
		Tawangrejeni	127,76	540059,00
		Tumpukrenteng	2,88	16594,74
		Turen	8,12	54470,7
		Undaan	3,08	16808,3
31	Wagir	Dalisodo	524,45	60511,53
		Gondowangi	19,31	246921,34
		Jedong	274,78	34281,06
		Mendalanwangi	11,43	77035,55
		Pandanlandung	267,02	402543,59
		Petungsewu	202,63	121412,36
		Sidorahayu	139,87	997169,06
		Sukodadi	612,97	1923880,96
		Sumbersuko	460,07	1923880,96
32	Wajak	Bambang	75,5	941967,94
		Blayu	6,16	14862,92
		Bringin	148,53	823553,9
		Codo	20,43	137904,69
		Dadapan	82,07	503403,83
		Ngembal	18,51	3022,82
		Patokpici	211,03	2312313,52
		Sukolilo	5,18	42963,09
		Sumberputih	95,66	489270,86
		Wonoayu	45,98	293101,34
33	Wonosari	Bangelan	81,11	259059,00
		Kebobang	139,59	450726,33
		Kluwut	58,34	167351,85
		Plandi	29,39	32139,44
		Plaosan	104,34	320937,44
		Sumbertempur	20,6	59307,74
Jumlah			42646,78	182690812,78

LAPORAN PRODUKSI HASIL HUTAN HAK DI KABUPATEN MALANG

TAHUN 2015

NO	JENIS KAYU	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPT	OKTOBER	NOP	DES	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	AKASIA	55.897.000	204.971	173.132	378.103	551.235	929.338	65.980	82.460	79.920	119.630			58.481.769
2	JATI	1.361.146	1.398.708	1.785.672	3.184.380	4.970.052	8.154.432	542.370	533.652	877.926	1.160.627			23.968.965
3	MAHONI	1.302.181	824.240	1.350.007	2.174.247	3.524.254	5.698.501	416.539	464.711	567.150	609.693			16.931.523
4	MINDI	64.560	577.280	240.620	781.900	986.520	1.768.420	119.150	534.580	375.510	467.150			5.879.690
5	SNGN TEKIK	70.130.554	5.822.305	13.260.029	19.082.334	32.342.363	51.424.697	28.520	5.776		0.820			192.096.578
6	SONO		107.080	120.977	228.057	349.034	577.091	71.190	17.430	61.520	117.790			1.650.169
7	GAMELIA		4.760	1.181.912	1.186.672	2.368.584	3.555.256							8.297.184
8	PINUS		3.080		3.080	3.080	6.160							15.400
9	R. CAMPURAN	78.518	63.281	286.503	349.784	636.287	986.071	7.100	7.420	4.930	8.540			2.428.434
	JUMLAH	128.833.959	9.005.705	18.362.852	27.368.557	45.731.409	73.099.966	1.250.849	1.646.029	1.966.956	2.483.430			309.749.712

STRUKTUR ORGANISASI



Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.941	.945	12

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	2.6667	.84418	30
VAR00002	2.3333	.80230	30
VAR00003	2.5333	.93710	30
VAR00004	3.0333	.88992	30
VAR00005	2.6667	.54667	30
VAR00006	2.9333	.90719	30
VAR00007	2.4000	.81368	30
VAR00008	2.1000	.75886	30
VAR00009	2.3667	.76489	30
VAR00010	2.2333	.93526	30
VAR00011	2.2667	1.01483	30
VAR00012	2.5667	1.07265	30

Inter-Item Correlation Matrix

	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011	VAR00012
VAR00001	1.000	.832	.668	.612	.722	.735	.803	.377	.570	.582	.590	.482
VAR00002	.832	1.000	.627	.563	.812	.647	.898	.566	.581	.674	.692	.534
VAR00003	.668	.627	1.000	.805	.696	.611	.525	.359	.439	.404	.498	.272
VAR00004	.612	.563	.805	1.000	.732	.558	.505	.506	.589	.446	.486	.341
VAR00005	.722	.812	.696	.732	1.000	.510	.698	.499	.467	.495	.539	.333
VAR00006	.735	.647	.611	.558	.510	1.000	.598	.411	.533	.344	.469	.430
VAR00007	.803	.898	.525	.505	.698	.598	1.000	.659	.587	.779	.660	.640
VAR00008	.377	.566	.359	.506	.499	.411	.659	1.000	.588	.743	.591	.648
VAR00009	.570	.581	.439	.589	.467	.533	.587	.588	1.000	.551	.803	.789
VAR00010	.582	.674	.404	.446	.495	.344	.779	.743	.551	1.000	.695	.654
VAR00011	.590	.692	.498	.486	.539	.469	.660	.591	.803	.695	1.000	.712
VAR00012	.482	.534	.272	.341	.333	.430	.640	.648	.789	.654	.712	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011	VAR00012
VAR00001	.713	.563	.529	.460	.333	.563	.552	.241	.368	.460	.506	.437
VAR00002	.563	.644	.471	.402	.356	.471	.586	.345	.356	.506	.563	.460
VAR00003	.529	.471	.878	.671	.356	.520	.400	.255	.315	.354	.474	.274
VAR00004	.460	.402	.671	.792	.356	.451	.366	.341	.401	.371	.439	.325
VAR00005	.333	.356	.356	.356	.299	.253	.310	.207	.195	.253	.299	.195
VAR00006	.563	.471	.520	.451	.253	.823	.441	.283	.370	.292	.432	.418
VAR00007	.552	.586	.400	.366	.310	.441	.662	.407	.366	.593	.545	.559
VAR00008	.241	.345	.255	.341	.207	.283	.407	.576	.341	.528	.455	.528
VAR00009	.368	.356	.315	.401	.195	.370	.366	.341	.585	.394	.623	.647
VAR00010	.460	.506	.354	.371	.253	.292	.593	.528	.394	.875	.660	.656
VAR00011	.506	.563	.474	.439	.299	.432	.545	.455	.623	.660	1.030	.775
VAR00012	.437	.460	.274	.325	.195	.418	.559	.528	.647	.656	.775	1.151

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	27.4333	54.737	.802	.865	.933
VAR00002	27.7667	54.668	.856	.907	.931
VAR00003	27.5667	55.357	.662	.764	.938
VAR00004	27.0667	55.513	.691	.839	.937
VAR00005	27.4333	58.944	.742	.833	.937
VAR00006	27.1667	55.661	.664	.711	.938
VAR00007	27.7000	54.562	.853	.896	.931
VAR00008	28.0000	57.034	.686	.776	.937
VAR00009	27.7333	56.133	.764	.847	.935
VAR00010	27.8667	54.464	.734	.819	.935
VAR00011	27.8333	52.902	.782	.802	.934
VAR00012	27.5333	53.775	.670	.764	.939

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
30.1000	65.472	8.09150	12

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.961	.964	14

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	4.4333	.56832	30
VAR00002	4.1333	.73030	30
VAR00003	4.6667	.47946	30
VAR00004	4.7333	.44978	30
VAR00005	4.6333	.49013	30
VAR00006	4.1667	.74664	30
VAR00007	4.1333	.73030	30
VAR00008	4.0000	.69481	30
VAR00009	4.1667	.74664	30
VAR00010	4.3000	.74971	30
VAR00011	4.0667	.69149	30
VAR00012	4.1667	.74664	30
VAR00013	4.3333	.60648	30
VAR00014	4.4667	.50742	30

Inter-Item Correlation Matrix

	VAR0000	VAR0000	VAR0000		VAR0000	VAR0000	VAR0000		VAR000	VAR000	VAR00	VAR0001		
	1	2	3	VAR00004	5	6	7	VAR00008	09	10	011	2	VAR00013	VAR00014
VAR00001	1.000	.770	.675	.603	.590	.718	.770	.611	.799	.898	.714	.799	.467	.949
VAR00002	.770	1.000	.624	.532	.527	.401	.677	.815	.717	.869	.869	.780	.208	.757
VAR00003	.675	.624	1.000	.853	.929	.546	.722	.621	.738	.767	.693	.738	.514	.661
VAR00004	.603	.532	.853	1.000	.793	.548	.637	.552	.650	.654	.613	.650	.464	.564
VAR00005	.590	.527	.929	.793	1.000	.550	.719	.506	.738	.685	.583	.738	.425	.573
VAR00006	.718	.401	.546	.548	.550	1.000	.590	.199	.629	.585	.378	.629	.635	.698
VAR00007	.770	.677	.722	.637	.719	.590	1.000	.476	.970	.869	.596	.843	.363	.757
VAR00008	.611	.815	.621	.552	.506	.199	.476	1.000	.532	.728	.861	.665	.327	.587
VAR00009	.799	.717	.738	.650	.738	.629	.970	.532	1.000	.893	.646	.876	.406	.789
VAR00010	.898	.869	.767	.654	.685	.585	.869	.728	.893	1.000	.825	.893	.455	.888
VAR00011	.714	.869	.693	.613	.583	.378	.596	.861	.646	.825	1.000	.712	.356	.694
VAR00012	.799	.780	.738	.650	.738	.629	.843	.665	.876	.893	.712	1.000	.482	.789
VAR00013	.467	.208	.514	.464	.425	.635	.363	.327	.406	.455	.356	.482	1.000	.486
VAR00014	.949	.757	.661	.564	.573	.698	.757	.587	.789	.888	.694	.789	.486	1.000

Inter-Item Covariance Matrix

	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007	VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011	VAR00012	VAR00013	VAR00014
VAR00001	.323	.320	.184	.154	.164	.305	.320	.241	.339	.383	.280	.339	.161	.274
VAR00002	.320	.533	.218	.175	.189	.218	.361	.414	.391	.476	.439	.425	.092	.280
VAR00003	.184	.218	.230	.184	.218	.195	.253	.207	.264	.276	.230	.264	.149	.161
VAR00004	.154	.175	.184	.202	.175	.184	.209	.172	.218	.221	.191	.218	.126	.129
VAR00005	.164	.189	.218	.175	.240	.201	.257	.172	.270	.252	.198	.270	.126	.143
VAR00006	.305	.218	.195	.184	.201	.557	.322	.103	.351	.328	.195	.351	.287	.264
VAR00007	.320	.361	.253	.209	.257	.322	.533	.241	.529	.476	.301	.460	.161	.280
VAR00008	.241	.414	.207	.172	.172	.103	.241	.483	.276	.379	.414	.345	.138	.207
VAR00009	.339	.391	.264	.218	.270	.351	.529	.276	.557	.500	.333	.489	.184	.299
VAR00010	.383	.476	.276	.221	.252	.328	.476	.379	.500	.562	.428	.500	.207	.338
VAR00011	.280	.439	.230	.191	.198	.195	.301	.414	.333	.428	.478	.368	.149	.244
VAR00012	.339	.425	.264	.218	.270	.351	.460	.345	.489	.500	.368	.557	.218	.299
VAR00013	.161	.092	.149	.126	.126	.287	.161	.138	.184	.207	.149	.218	.368	.149
VAR00014	.274	.280	.161	.129	.143	.264	.280	.207	.299	.338	.244	.299	.149	.257

item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	55.9667	47.413	.885	.	.956
VAR00002	56.2667	46.133	.806	.	.958
VAR00003	55.7333	48.823	.837	.	.958
VAR00004	55.6667	49.747	.743	.	.960
VAR00005	55.7667	49.151	.767	.	.959
VAR00006	56.2333	47.495	.642	.	.962
VAR00007	56.2667	45.789	.844	.	.957
VAR00008	56.4000	47.559	.691	.	.960
VAR00009	56.2333	45.220	.885	.	.956
VAR00010	56.1000	44.576	.951	.	.954
VAR00011	56.3333	46.644	.798	.	.958
VAR00012	56.2333	45.013	.908	.	.955
VAR00013	56.0667	49.995	.501	.	.964
VAR00014	55.9333	48.271	.870	.	.957

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
60.4000	54.662	7.39338	14

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Dinas	Pedagang
N		30	30
Normal Parameters ^a	Mean	2.5080	4.3150
	Std. Deviation	.67524	.52895
Most Extreme Differences	Absolute	.104	.206
	Positive	.104	.122
	Negative	-.088	-.206
Kolmogorov-Smirnov Z		.569	1.127
Asymp. Sig. (2-tailed)		.902	.158
a. Test distribution is Normal.			

PERSEPSI

Group Statistics

	Permen LHK	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Persepsi	1	30	2.5080	.67524	.12328
	2	30	4.3150	.52895	.09657

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Persepsi	Equal variances assumed	1.554	.218	11.539	58	.000	1.80700	.15660	-2.12048	-1.49352
	Equal variances not assumed			11.539	54.855	.000	1.80700	.15660	-2.12086	-1.49314

		Statistics	
		Persepsi_Dinas	Persepsi_Pedagang
N	Valid	30	30
	Missing	0	0
Mean		2.5080	4.3150
Median		2.4150	4.2900
Mode		2.08 ^a	4.79
Std. Deviation		.67524	.52895
Minimum		1.50	3.36
Maximum		4.00	4.93
Sum		75.24	129.45

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

JUMLAH KASUS

Group Statistics

Permen LHK	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Jumlah_Kasus 1	5	9.6000	4.21900	1.88680
2	5	8.4000	4.15933	1.86011

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Jumlah_Kasus	Equal variances assumed	.023	.883	.453	8	.663	1.20000	2.64953	-4.90982	7.30982
	Equal variances not assumed			.453	7.998	.663	1.20000	2.64953	-4.91004	7.31004

Group Statistics

Permen LHK	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Jumlah_Kerugian 1	5	96789400.0000	48926551.80268	21880619.14709
2	5	56508600.0000	34873737.17140	15596009.38894

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Jumlah_Kerugian	Equal variances assumed	.722	.420	1.499	8	.172	4.02808E7	2.68700E7	-2.16815E7	1.02243E8
	Equal variances not assumed			1.499	7.231	.176	4.02808E7	2.68700E7	-2.28483E7	1.03410E8